



Katalog: 4401002
ISSN 2089-5291

STATISTIK KRIMINAL 2024

Volume 15, 2024



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 4401002
ISSN 2089-5291

STATISTIK KRIMINAL 2024

Volume 15, 2024

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Statistik Kriminal 2024

Volume 15, 2024

Katalog: 4401002

ISSN: 2089-5291

Nomor Publikasi: 04300.2306

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xxx+210 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penyunting:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Pembuat Kover:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, flaticon.com, canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

ISSN 2089-5291

Tim Penyusun

**Statistik Kriminal 2024
Volume 15, 2024**

Pengarah:

Dr. Ateng Hartono, SE., M.Si.

Penanggung Jawab:

Dr. Nurma Midayanti, S.Si., M.Env.Sc.

Editor:

Trophy Endah Rahayu, S.ST., M.Si.

Pengolah Data dan Penulis Naskah:

Hendry Syaputra, S.Sos, M.I.Kom

Diane Putri Prahastiwi, SST., M.E.K.K.

Riyana Dewi, S.ST.

Novita Sari, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Riyana Dewi, S.ST.

KATA PENGANTAR



Keamanan merupakan salah satu fondasi utama dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terjaganya keamanan di tengah masyarakat akan menciptakan suasana yang kondusif, yang memungkinkan aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata dapat berkembang dengan baik. Dalam hal ini, statistik kriminal memegang peranan penting sebagai acuan dalam menilai dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan ketertiban.

Publikasi Statistik Kriminal 2024 hadir untuk memenuhi kebutuhan data terkait tingkat kriminalitas di Indonesia. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik bagi para pengambil kebijakan, akademisi, maupun masyarakat luas. Data yang dihadirkan bersumber dari tiga entitas utama, yaitu registrasi dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), serta Pendataan Potensi Desa (Podes). Meskipun data tersebut dikumpulkan dengan metode yang berbeda, ketiganya saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait fenomena kriminalitas di Indonesia.

Atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap data dan informasi yang terkandung dalam publikasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan di bidang keamanan, serta mendukung arah pembangunan di masa mendatang.

Jakarta, Desember 2024
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti

RINGKASAN EKSEKUTIF



Publikasi Statistik Kriminal 2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai tren keamanan serta perubahannya dalam beberapa tahun terakhir. Data yang disajikan berfungsi sebagai dasar perencanaan pembangunan di sektor keamanan dan hukum, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam publikasi ini mencakup tiga aspek utama dalam statistik kriminal, yakni pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan aspek kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes).

Data registrasi kepolisian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kejadian kejahatan yang tercatat, dari 372.965 kejadian pada tahun 2022 menjadi 584.991 kejadian pada tahun 2023, dengan *crime rate* atau tingkat risiko menjadi korban kejahatan yang meningkat dari 137 menjadi 214. Kenaikan jumlah kasus ini mungkin tidak hanya mencerminkan peningkatan aktivitas kejahatan, tetapi juga oleh adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan pencatatan oleh kepolisian. Selain itu, interval kejahatan (*crime clock*) memperlihatkan penurunan waktu antara kejadian dari 1 menit 24 detik pada tahun 2022 menjadi hanya 53 detik pada tahun 2023, yang menandakan adanya peningkatan frekuensi kejadian kejahatan.

Berdasarkan data survei, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menunjukkan pola fluktuatif. Persentase ini meningkat dari 0,47 persen pada tahun 2021 menjadi 0,53 persen pada tahun 2022, tetapi turun kembali menjadi 0,45 persen pada tahun 2023. Tingkat pelaporan ke pihak kepolisian selama periode 2021–2023 juga masih tergolong rendah, dari yang semula sebanyak 23,36 persen pada tahun 2021 turun menjadi 22,98 persen pada tahun 2022 dan kembali meningkat menjadi 23,31 persen pada tahun 2023.

Sementara itu, data Potensi Desa menyoroti kejadian kriminal di tingkat desa atau kelurahan. Jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah pencurian, yang berkisar antara 26 persen hingga 45 persen dari total desa atau kelurahan di Indonesia sepanjang periode 2018 hingga 2024.

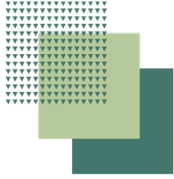


DAFTAR ISI

Statistik Kriminal 2024
Volume 15, 2024

Kata Pengantar	v
Ringkasan Eksekutif	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xv
Penjelasan Umum	xxi
Penjelasan Teknis	xxiii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Penyajian	5
BAB II Kejadian Kejahatan	7
2.1 Angka Kejahatan Nasional	9
2.2 Angka Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah (Polda)	12
2.3 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	13
2.4 Kejahatan Terhadap Nyawa	15
2.5 Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain	20
2.6 Kejahatan Terhadap Kesusilaan	22
2.7 Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	24
2.8 Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan	25
2.9 Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-Obatan	28
2.10 Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	30
2.11 Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	32
2.12 Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara	33
2.13 Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup	35

2.14	Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan	37
2.15	Perkelahian Massal	43
2.16	Upaya Menjaga Keamanan	47
BAB III	Korban Kejahatan	53
3.1	Penduduk Korban Kejahatan	53
3.2	Tingkat Pelaporan	60
BAB IV	Indikator <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terkait Keamanan	65
	Daftar Pustaka	79
	Lampiran	83



DAFTAR GAMBAR



II. Kejadian Kejahatan

2.1	Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2022–2023	10
2.2	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan, 2022–2023	11
2.3	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Daerah, 2023	13
2.4	Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023	14
2.5	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2022–2023	18
2.6	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Kepolisian Daerah, 2023	19
2.7	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain, 2022–2023	20
2.8	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain Menurut Kepolisian Daerah, 2023	21
2.9	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2022–2023	22
2.10	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Kepolisian Daerah, 2023	23
2.11	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan, 2022–2023	24
2.12	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2023	25
2.13	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan, 2022–2023	26
2.14	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2023	27
2.15	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-Obatan, 2022–2023	28
2.16	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-Obatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023	29

2.17	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2022–2023	30
2.18	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Kepolisian Daerah, 2022–2023	29
2.19	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, 2022–2023	32
2.20	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Menurut Kepolisian Daerah, 2023	33
2.21	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara, 2022–2023	34
2.22	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara Menurut Kepolisian Daerah, 2023	35
2.23	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup, 2022–2023	36
2.24	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Menurut Kepolisian Daerah, 2023	37
2.25	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2018, 2021, dan 2024	38
2.26	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	40
2.27	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	40
2.28	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	41
2.29	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	42
2.30	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	42
2.31	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2018, 2021, dan 2024	44
2.32	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah	

Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2018, 2021, dan 2024 ...	45
2.33 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2018, 2021, dan 2024	46
2.34 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024	47
2.35 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018, 2021, dan 2024	48
2.36 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2024	49
2.37 Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2024	50

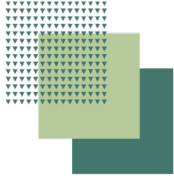
III. Korban Kejahatan

3.1 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2021–2023	54
3.2 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2021–2023	55
3.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021–2023	56
3.4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2021–2023	56
3.5 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2023	57
3.6 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi, 2023	58
3.7 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2023	59
3.8 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2021–2023	61
3.9 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Berdasarkan Provinsi, 2023	62

IV. Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Terkait Keamanan

4.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2021–2023	71
4.2	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2020	72
4.3	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2021–2023	74
4.4	Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi, 2012–2024	76
4.5	Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2022–2024	77
4.6	Persentase Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2022–2024	78

<https://www.bps.go.id>



DAFTAR LAMPIRAN



II. KEJADIAN KEJAHATAN

Sumber Data: Kepolisian RI

Lampiran 1	Indikator Kriminalitas Nasional, 2022–2023	89
Lampiran 2	Peringkat Kepolisian Daerah Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2023	90
Lampiran 3	Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2022–2023	91
Lampiran 4	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2022–2023	92
Lampiran 5	Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2022–2023	93
Lampiran 6	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2022–2023	94
Lampiran 7	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2022–2023	95
Lampiran 8	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2022–2023	96
Lampiran 9	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2023	97
Lampiran 10	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2022	101
Lampiran 11	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2023	109

Sumber Data: Potensi Desa (Kejadian Kejahatan)

Lampiran 12	Jumlah Desa/Kelurahan, 2018, 2021, dan 2024	119
Lampiran 13	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2018, 2021, dan 2024	120
Lampiran 14	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir	

	Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	121
Lampiran 15	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	122
Lampiran 16	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	123
Lampiran 17	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	124
Lampiran 18	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	125
Lampiran 19	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	126
Lampiran 20	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	127
Lampiran 21	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	128
Lampiran 22	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	129
Lampiran 23	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	130
Lampiran 24	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	131

Sumber Data: Potensi Data (Konflik Massal)

Lampiran 25	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang
-------------	--

	Terjadi, 2018, 2021, dan 2024	135
Lampiran 26	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	136
Lampiran 27	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018	137
Lampiran 28	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021	139
Lampiran 29	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2024	141
Lampiran 30	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018	143
Lampiran 31	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021	145
Lampiran 32	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2024	147
Lampiran 33	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	149

Sumber Data: Potensi Data (Upaya Menjaga Keamanan)

Lampiran 34	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018, 2021, dan 2024	153
Lampiran 35	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018	154
Lampiran 36	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2021	156
Lampiran 37	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya	

	untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2024	158
Lampiran 38	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018	160
Lampiran 39	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2021	162
Lampiran 40	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2024	164
Lampiran 41	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	166
Lampiran 42	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024 ...	167
Lampiran 43	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	168
Lampiran 44	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan) Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024	169
Lampiran 45	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	170
Lampiran 46	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021	171
Lampiran 47	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2024	172
Lampiran 48	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	173
Lampiran 49	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2021	174
Lampiran 50	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2024	175

III. KORBAN KEJAHATAN

Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Lampiran 51	Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2021–2023	179
Lampiran 52	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021–2023	180
Lampiran 53	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, 2021–2023	181
Lampiran 54	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2021–2023	182
Lampiran 55	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2021–2023	183
Lampiran 56	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2021–2023	184
Lampiran 57	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2021–2023	185
Lampiran 58	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Provinsi, 2021–2023	186
Lampiran 59	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2021–2023	187
Lampiran 60	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2021–2023	188
Lampiran 61	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2021–2023	189

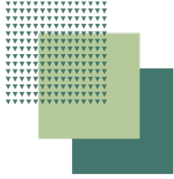
IV. INDIKATOR *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs) TERKAIT KEAMANAN

Lampiran 62	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2021–2023	193
Lampiran 63	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian pada Siang Hari Menurut Provinsi, 2020	194
Lampiran 64	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2020	195
Lampiran 65	Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berkendara	

(Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) Sendirian pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2020	196
Lampiran 66 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	197
Lampiran 67 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2021–2023	198

ESTIMASI SAMPLING ERROR

Lampiran 68 Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2023	201
Lampiran 69 Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Korban Kejahatan Laki-Laki Menurut Provinsi, 2023	203
Lampiran 70 Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Korban Kejahatan Perempuan Menurut Provinsi, 2023	205
Lampiran 71 Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2023	207
Lampiran 72 Estimasi <i>Sampling Error</i> Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2020	209



PENJELASAN UMUM



Pada publikasi ini, terdapat beberapa tanda/symbol yang digunakan. Berikut adalah penjelasan terkait penggunaan tanda/symbol tersebut:

- Data tidak tersedia : ...
- Tidak ada atau nol : –
- Data dapat diabaikan : 0
- Tanda desimal : ,
- Angka diperbaiki : r

<https://www.bps.go.id>



PENJELASAN TEKNIS

Jenis dan Sumber Data

Publikasi ini memanfaatkan tiga sumber data utama, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian kejahatan, yang berasal dari Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk tahun 2022 dan 2023.
2. Data korban kejahatan, yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2022, 2023, dan 2024.
3. Data jumlah dan persentase desa/kelurahan terkait kejadian kejahatan, konflik massal, serta berbagai karakteristik dan upaya dalam menjaga keamanan, yang bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) untuk tahun 2018, 2021, dan 2024.

Melalui kombinasi ketiga sumber data ini, publikasi ini dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang situasi kriminalitas di Indonesia, termasuk aspek kejahatan, korban, dan keamanan di tingkat desa/kelurahan.

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun Kepolisian Daerah.

Dalam hal data kriminalitas, informasi yang disajikan mencakup karakteristik kejadian kejahatan, profil pelaku kejahatan, dan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa data ini hanya mencakup peristiwa kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat atau kasus di mana pelaku kejahatan tertangkap tangan oleh aparat kepolisian.

Masih tingginya keengganan masyarakat untuk melaporkan kejadian kriminal berakibat pada angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif tinggi. Akibatnya, data yang tersedia seringkali *underestimate*, di mana jumlah kejahatan sebenarnya diduga lebih tinggi daripada yang tercatat dalam laporan resmi.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2022–2024

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) adalah survei tahunan yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan terdiri dari dua jenis data utama, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok yang meliputi berbagai aspek kesejahteraan rakyat, termasuk data kriminalitas, dengan informasi terkait jumlah dan karakteristik rumah tangga atau individu yang menjadi korban kejahatan. Survei ini mengambil sampel dari 300.000 rumah tangga, sehingga memungkinkan estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Sementara itu, Modul Susenas terfokus pada satu aspek kesejahteraan tertentu dengan cakupan yang lebih lengkap dan rinci dibandingkan Kor. Modul-modul ini memiliki nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, yaitu Modul Kesehatan dan Perumahan, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan, dan Modul Ketahanan Sosial. Modul ini diselenggarakan dengan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga, yang hanya memungkinkan estimasi hingga tingkat provinsi.

Sejak pelaksanaan pertama Susenas pada tahun 1963, modul kriminalitas menjadi bagian penting dari survei ini, mencakup data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku, dampak fisik maupun psikologis, serta kerugian yang ditimbulkan. Namun, sejak tahun 1995, modul ini tidak lagi dilaksanakan secara reguler. Pada tahun 2015, BPS memperluas cakupan jenis kejahatan dalam Susenas Kor menjadi lima jenis: pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya, guna meningkatkan akurasi survei terkait pengalaman korban kejahatan.

Perubahan tersebut membuat data Susenas lebih representatif dalam menangkap berbagai bentuk kriminalitas, tetapi berdampak pada tidak bisa dilakukannya perbandingan langsung dengan data kriminalitas dari tahun-tahun sebelum 2015. Susenas 2022, 2023, dan 2024 masing-masing menggambarkan pengalaman responden selama satu tahun terakhir, yakni 2021, 2022, dan 2023.

Statistik Potensi Desa (Podes) 2018, 2021, dan 2024

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendataan Potensi Desa (Podes) dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden utama untuk Pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan

lainnya. Selain itu, narasumber tambahan seperti petugas kesehatan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) juga berpartisipasi.

Salah satu fungsi utama Pendataan Podes adalah menyajikan data dan informasi tentang desa/kelurahan untuk mendukung perencanaan kegiatan sensus. Data yang dikumpulkan mencakup luas wilayah, jumlah RW dan RT, satuan lingkungan setempat (SLS), keadaan geografis dan topografis, jumlah dan struktur penduduk, serta struktur perekonomian. Pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus untuk mempersiapkan data yang lebih rinci dan akurat.

Selain itu, data yang dikumpulkan dalam Podes mencakup jenis dan jumlah fasilitas umum di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi, bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya. Pendataan ini juga mencakup data tentang jenis dan jumlah kejadian penting yang terjadi di desa, seperti bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antarwarga desa maupun antardesa.

Data dari Pendataan Podes memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan potensi desa/kelurahan di seluruh Indonesia, yang sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan di berbagai sektor.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini didasarkan pada definisi yang digunakan oleh sumber data yang relevan. Penjelasan mengenai konsep dan definisi ini disusun berdasarkan urutan sumber data yang digunakan untuk menghasilkan publikasi. Dengan demikian, publikasi ini mengacu pada konsep dan definisi yang berlaku dari setiap sumber data untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian interpretasi.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Polri

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

2. Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah:
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa;
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum);
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian;
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia; dan
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan
- Orang yang turut melakukan kejahatan
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan

C. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

D. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur:

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih

C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- Perkelahian antarkelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari;
- Perkelahian warga antardesa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya;
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan;
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah;
- Perkelahian antarpelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain;
- Perkelahian antarsuku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi

di desa/kelurahan/nagari; dan

- Lainnya: perkelahian antarwarga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antaragama, perkelahian antaraparatur keamanan, dan sebagainya.

Penghitungan Indikator

1. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk/*Crime Rate*

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

2. Selang Waktu Kejahatan Tahun t/*Crime Clock*

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada Tahun } t} \quad (\text{detik})$$

3. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan/*Crime Clearance*

$$\text{Crime Clearance} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan}} \times 100\%$$

4. Persentase Penduduk Korban Kejahatan

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penduduk} \\ \text{korban} \\ \text{kejahatan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

5. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{korban kejahatan} \\ \text{yang melapor} \\ \text{Polisi} \end{array} = \frac{\text{Jumlah penduduk korban kejahatan yang melapor ke Polisi dalam 12 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk korban kejahatan}} \times 100\%$$

6. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Kekerasan

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penduduk} \\ \text{korban} \\ \text{kejahatan} \\ \text{kekerasan} \end{array} = \frac{\text{Jumlah penduduk korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk korban kejahatan kekerasan}} \times 100\%$$

7. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{korban kejahatan} \\ \text{kekerasan yang} \\ \text{melapor Polisi} \end{array} = \frac{\text{Jumlah penduduk korban kejahatan kekerasan yang melapor ke Polisi dalam 12 bulan terakhir}}{\text{Jumlah penduduk korban kejahatan kekerasan}} \times 100\%$$

8. Persentase Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari

Persentase penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari = $\frac{\text{Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$

Penghitungan *Sampling Error*

Dalam teori survei, terdapat dua jenis kesalahan utama yang dapat mempengaruhi hasil survei, yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*.

1. *Non-sampling error* mencakup kesalahan yang terjadi selama proses pengumpulan atau pengolahan data. Contoh *non-sampling error* meliputi kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan di kuesioner, kesalahan dalam pencatatan, atau kesalahan pada tahap input data. Kesalahan ini tidak terkait dengan metode pengambilan sampel, tetapi dapat mempengaruhi kualitas keseluruhan data yang dikumpulkan.
2. *Sampling error*, di sisi lain, adalah kesalahan yang muncul karena penggunaan teknik pengambilan sampel. Kesalahan ini terjadi karena hasil dari sampel yang diambil mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi yang lebih besar.

Dalam publikasi ini, dilakukan penghitungan *sampling error* untuk beberapa indikator yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024. Untuk menggambarkan ukuran *sampling error*, digunakan *standard error* (galat baku) yang menunjukkan tingkat variabilitas hasil survei. Tingkat presisi dari indikator yang diukur ditentukan oleh nilai *Relative Standard Error* (RSE), yang menunjukkan perbandingan antara nilai *standard error* dan estimasi indikator dalam satuan persen.

Selain itu, *standard error* juga digunakan untuk menghitung selang kepercayaan (*confidence interval*), yang memberi gambaran tentang rentang nilai yang mungkin mencakup nilai sebenarnya dari populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, rentang ini ditentukan oleh estimasi ditambah atau dikurangi dua kali lipat *standard error*. Semakin kecil nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan, semakin akurat estimasi indikator yang dihasilkan.

Mulia, dkk (2007) menyebutkan bahwa kualitas dari hasil estimasi survei dapat diukur dari nilai RSE. Estimasi yang didasarkan pada jumlah observasi yang

kecil cenderung memiliki kesalahan relatif yang besar. Oleh karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan akurasi estimasi adalah dengan memperbesar ukuran sampel, yang pada akhirnya akan menurunkan nilai RSE dan meningkatkan keakuratan hasil estimasi.

<https://www.bps.go.id>

01

PENDAHULUAN



Statistik kriminal akan menjadi tolok ukur dan acuan publik dalam **menilai tingkat keamanan suatu wilayah**



Publikasi disajikan dalam **tiga pendekatan utama**, meliputi kejadian (data registrasi Kepolisian RI), korban (data Susenas), dan kewilayahan (data Podes)

Publikasi Statistik Kriminal 2024 dimaksudkan untuk **memenuhi kebutuhan data statistik kriminal** secara berkala dan berkesinambungan





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kondisi yang aman dan tertib memerlukan data dan informasi yang akurat serta terkini mengenai situasi kriminalitas di Indonesia. Ketersediaan data kriminal yang akurat, terpercaya, dan berkelanjutan menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Data tersebut mendukung pemerintah dalam penegakan hukum, pencegahan kejahatan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terciptanya kondisi tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai cita-cita menjadi negara yang aman, adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Keberadaan data kriminal yang andal juga merupakan instrumen penting dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS), yang menekankan pada pentingnya statistik kriminal yang harmonis dan dapat diandalkan sebagai dasar pembuatan kebijakan penanggulangan kejahatan yang efektif. Data tersebut memungkinkan pemerintah memantau tren kriminalitas, mengevaluasi efektivitas program pencegahan kejahatan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan upaya penegakan hukum.

Dengan informasi yang komprehensif mengenai situasi kriminalitas, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Selain itu, ketersediaan statistik kriminal yang berkualitas mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan tidak dapat tercapai ketika tidak ada rasa aman di masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Publikasi Statistik Kriminal ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan data kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini menjadi dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Data tersebut juga dibutuhkan pada tingkat internasional, termasuk untuk memenuhi *United Nations Surveys on Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems* (UN-CTS) untuk United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta untuk memenuhi indikator SDGs, khususnya Tujuan 16 terkait dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dalam rangka menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Selanjutnya, publikasi ini disusun untuk menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara spesifik, tujuan penyusunan publikasi ini juga adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai karakteristik dari kejadian dan korban kejahatan di Indonesia.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai kejadian dan korban kejahatan di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Khusus untuk data yang diperoleh dari Mabes Polri, informasi disusun berdasarkan wilayah yurisdiksi Kepolisian pada level Kepolisian Daerah (Polda) dan pada tingkat nasional. Sesuai dengan ketersediaan data, keseluruhan statistik dan indikator tentang kejadian tindak kejahatan disajikan dalam rentang waktu dua tahun terakhir, yaitu 2022 dan 2023, sedangkan indikator korban kejahatan disajikan dalam rentang waktu tiga tahun terakhir secara berurutan, yaitu pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Sementara itu, untuk semua statistik dan indikator yang bersumber dari Potensi Desa akan disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu 2018, 2021, dan 2024.

1.4 Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.
- Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi serta gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahan bersumber dari Podes.
- Bab III menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi.
- Bab IV menyajikan data yang merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait keamanan.

02

KEJADIAN KEJAHATAN



Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) tahun 2023



584.991



214 /100.000 penduduk

Tingkat risiko kejahatan (*crime rate*) tahun 2023

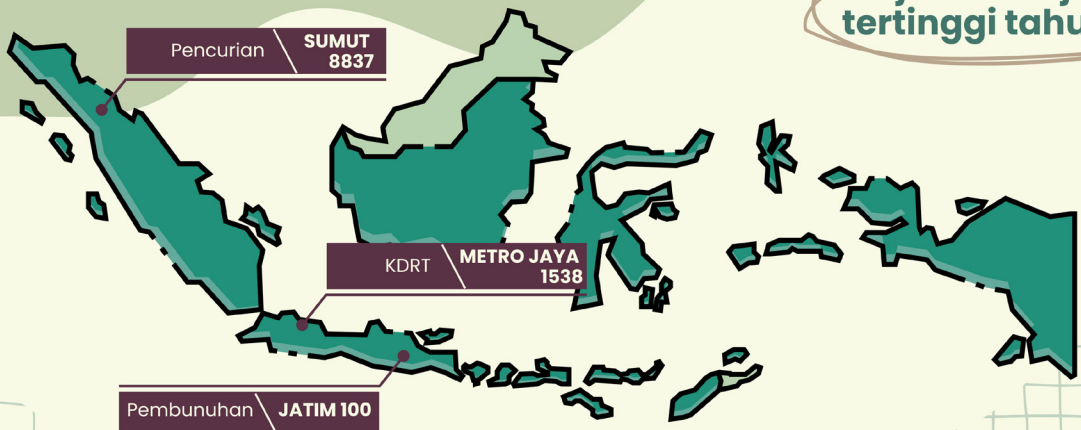
Selang waktu kejahatan (*crime clock*) tahun 2023



00. 00' 53"



Jumlah kejadian kejahatan tertinggi tahun 2023





BAB II

KEJADIAN KEJAHATAN

2.1 Angka Kejahatan Nasional

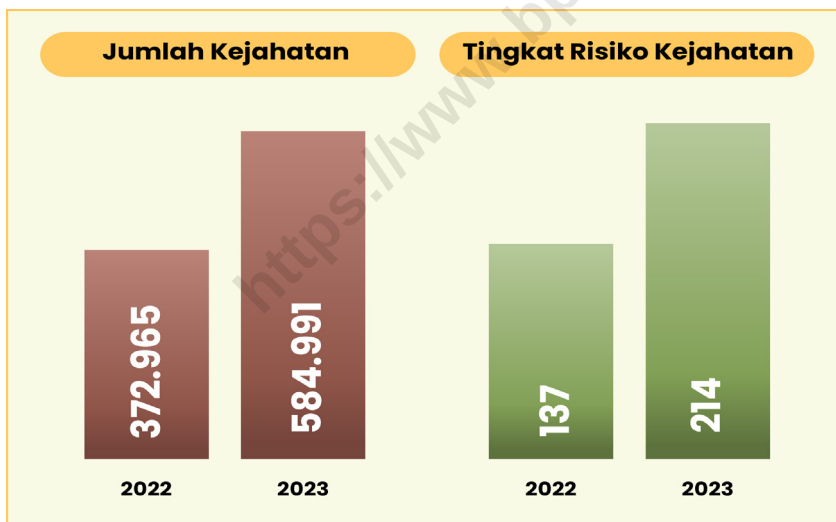
Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Keberlakuan UUD 1945 ini berlandaskan pada legitimasi kedaulatan rakyat sehingga UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Puspitasari et al., 2018). Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan tujuan negara Indonesia, salah satunya yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Melalui tujuan tersebut, negara Indonesia berkomitmen untuk melindungi seluruh komponen di Indonesia yang meliputi rakyat, kekayaan alam, kekayaan budaya, maupun nilai-nilai luhur bangsa. Indonesia merupakan negara dengan beragam etnis dan suku bangsa yang secara keseluruhan mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain jenisnya yang beragam, jumlah atau ukuran populasi dari setiap jenis suku bangsa juga sangat bervariasi (Na'im & Syaputra, 2011).

Sejalan dengan itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan seluruh warganya dari segala bentuk kejahatan sebagai upaya mewujudkan tujuan perlindungan bangsa. Karena pada dasarnya kejahatan merupakan ancaman bagi keamanan, administrasi, dan yurisdiksi suatu negara (Saeed & Abdulmohsin, 2023). Ketersediaan statistik kriminal/kejahatan merupakan satu hal yang fundamental untuk mengevaluasi tingkat keamanan di suatu wilayah. Menurut (Hatta, 2008), angka statistik kriminal/kejahatan merupakan gambaran jumlah kerugian yang diakibatkan dari terjadinya suatu kejahatan. Dari berbagai studi, kejahatan memiliki dampak sebagai beban bagi perekonomian sebuah negara. Bahkan efeknya dapat menghambat investasi domestik dan asing, melemahkan daya saing bisnis, serta mengalihkan sumber daya yang menciptakan ketidakpastian dan inefisiensi (Detotto & Otranto, 2010).

Oleh karena itu, statistik kriminal/kejahatan berfungsi sebagai dasar penting dalam merumuskan kebijakan dengan menyediakan data akurat

tentang tingkat kriminalitas dan ancaman keamanan. Informasi ini membantu pemerintah mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani, mengalokasikan sumber daya secara tepat, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Selain itu, statistik kriminal/kejahatan memungkinkan prediksi tren kejahatan di masa depan sehingga tindakan preventif dapat diambil. Dengan berbasis pada data yang jelas, kebijakan yang dibuat menjadi lebih efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dari sisi makro, terdapat beberapa indikator yang menggambarkan tentang tingkat kejahatan, yaitu jumlah kejahatan (*crime total*), tingkat risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Namun, pemaknaan indikator kriminalitas/kejahatan tersebut dalam konteks makro memerlukan kehati-hatian karena merupakan agregat dari semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz, 1978).

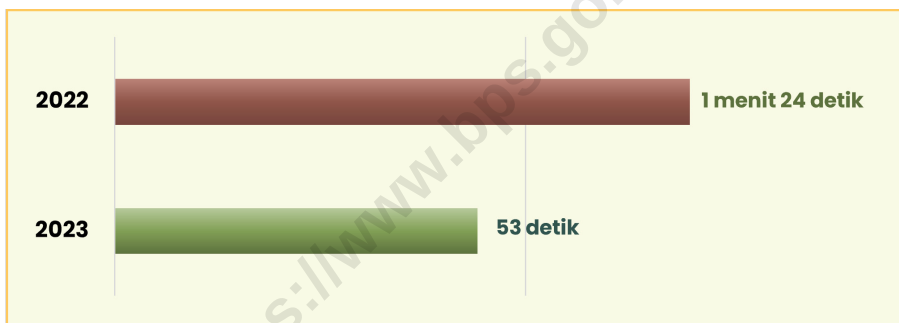


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.1 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2022–2023

Berdasarkan Gambar 2.1, terjadi peningkatan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) yang cukup drastis pada tahun 2023, dari sebanyak 372.965 di tahun 2022 menjadi 584.991 kejadian. Fenomena yang serupa juga tergambar dari indikator tingkat risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*). Nilai *crime rate* mengalami peningkatan dari 137 pada tahun 2022 menjadi 214 pada tahun 2023. Nilai *crime rate* tahun 2023 ini dapat dimaknai bahwa dari 100.000 penduduk, terdapat 214 orang yang mengalami kejahatan.

Sebagai catatan, berdasarkan informasi dari Polri, tahun 2022 merupakan awal perbaikan sistem pelaporan di Kepolisian RI. Dengan sistem yang lebih efisien dan akurat, diharapkan lebih banyak kasus kejahatan yang terlapor dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa perubahan drastis pada angka *crime total* lebih dari 50 persen dan *crime rate* pada 2023 bukan semata-mata karena peningkatan kejadian kriminal saja, melainkan juga karena adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan pencatatan di Kepolisian. Selain itu, tingkat *awareness* masyarakat terhadap permasalahan tindak pidana juga dapat meningkatkan pelaporan kejahatan. Hal ini sejalan dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, di mana indikator *crime report* (persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi) juga meningkat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.2 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan, 2022–2023

Jika kita menganalisis selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*), data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, interval waktu antara satu kejadian kejahatan dan kejadian berikutnya adalah 00.01'24" (1 menit 24 detik). Namun, pada tahun 2023, interval waktu ini semakin menyusut menjadi 00.00'53" (53 detik). Interval waktu yang semakin pendek ini menunjukkan bahwa intensitas kejadian tindak kejahatan semakin meningkat pada periode tahun tersebut.

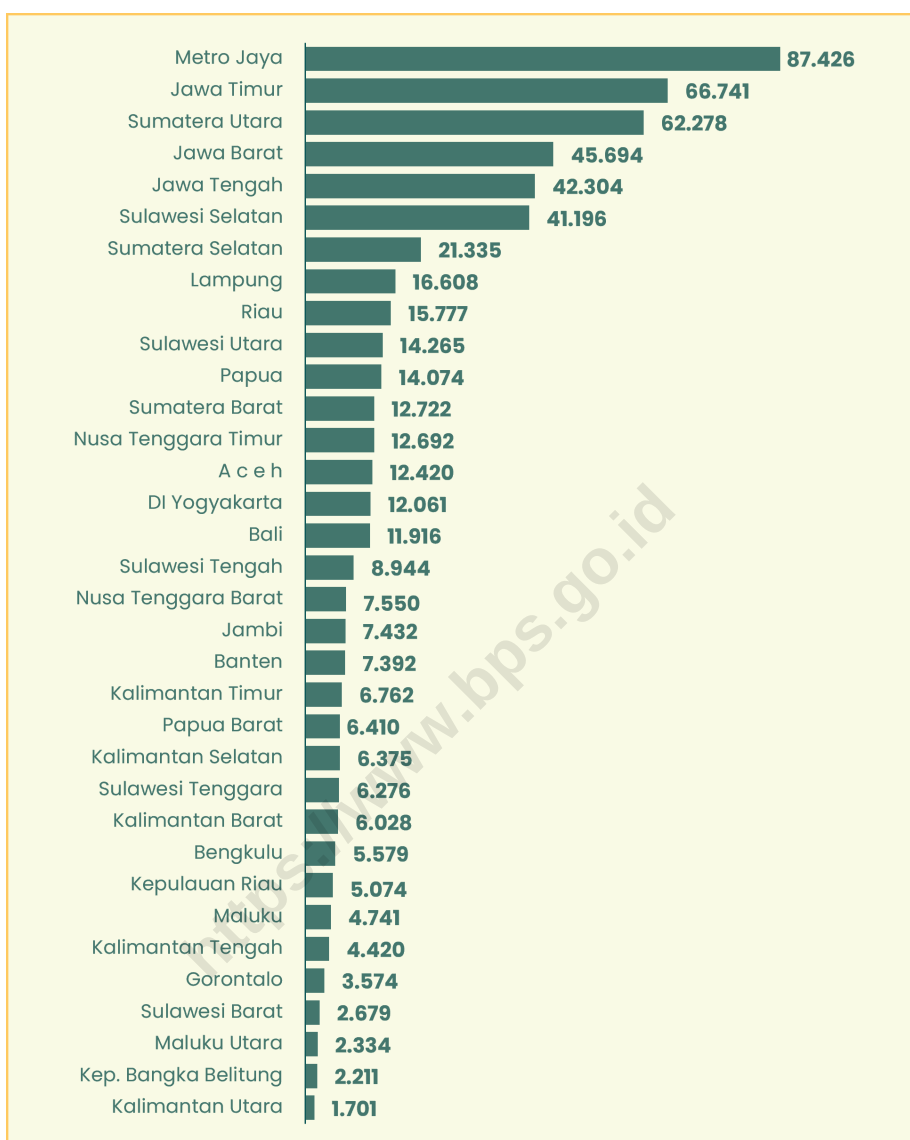
Dengan kata lain, meskipun ada perbaikan dalam sistem pelaporan dan pencatatan di kepolisian, penurunan interval waktu kejahatan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga keamanan masyarakat tetap ada. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif yang lebih agresif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah ini, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat. Beberapa hal yang bisa dilakukan adalah peningkatan patroli keamanan, penerapan teknologi terkini dalam pemantauan, serta peningkatan kerja sama antara masyarakat dan Kepolisian.

2.2 Angka Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah (Polda)

Statistik kejahatan yang bersumber dari data registrasi/administrasi kepolisian dapat disajikan menurut Kepolisian Daerah (Polda) sesuai dengan wilayah yurisdiksinya masing-masing. Secara umum, Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat daerah I, yaitu provinsi (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia). Namun, perlu menjadi perhatian bahwa ada sedikit perbedaan antara wilayah administrasi pemerintah daerah dengan wilayah yurisdiksi Polda. Misalnya untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan wilayah Polda Metro Jaya yang mencakup seluruh Provinsi DKI Jakarta dan beberapa daerah penyangga di sekitarnya, yaitu Kota Depok dan Kota serta Kabupaten Bekasi di Jawa Barat, serta Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di Banten. Dalam publikasi ini, jumlah kejahatan Polda Metro Jaya termasuk juga jumlah kejahatan yang ditangani oleh Mabes Polri (sekitar 1.024 kejadian pada 2023).

Pada Gambar 2.3. disajikan jumlah kejahatan untuk level Polda selama tahun 2023. Wilayah Polda Metro Jaya menjadi Polda dengan jumlah kejahatan terbanyak pada tahun 2023 (87.426 kejadian), disusul oleh Polda Jawa Timur sebanyak 66.741 kejadian, dan Polda Sumatera Utara (62.278 kejadian). Ketiga wilayah ini menyumbang bagian terbesar dari total 584.991 kejahatan di Indonesia, dengan Metro Jaya menyumbang 14,94 persen, Jawa Timur 11,41 persen, dan Sumatera Utara 10,64 persen. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Maluku Utara merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.701 kejadian, 2.211 kejadian, dan 2.334 kejadian.

Wilayah dengan angka kejahatan tinggi, seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, cenderung memiliki ciri-ciri yang sama yakni populasi yang padat, pusat ekonomi yang besar, dan banyaknya aktivitas urban yang dinamis. Di sisi lain, wilayah dengan angka kejahatan rendah seperti Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara adalah daerah yang jumlah penduduknya relatif sedikit, dengan aktivitas ekonomi yang tidak sekompleks pada wilayah tiga tertinggi.



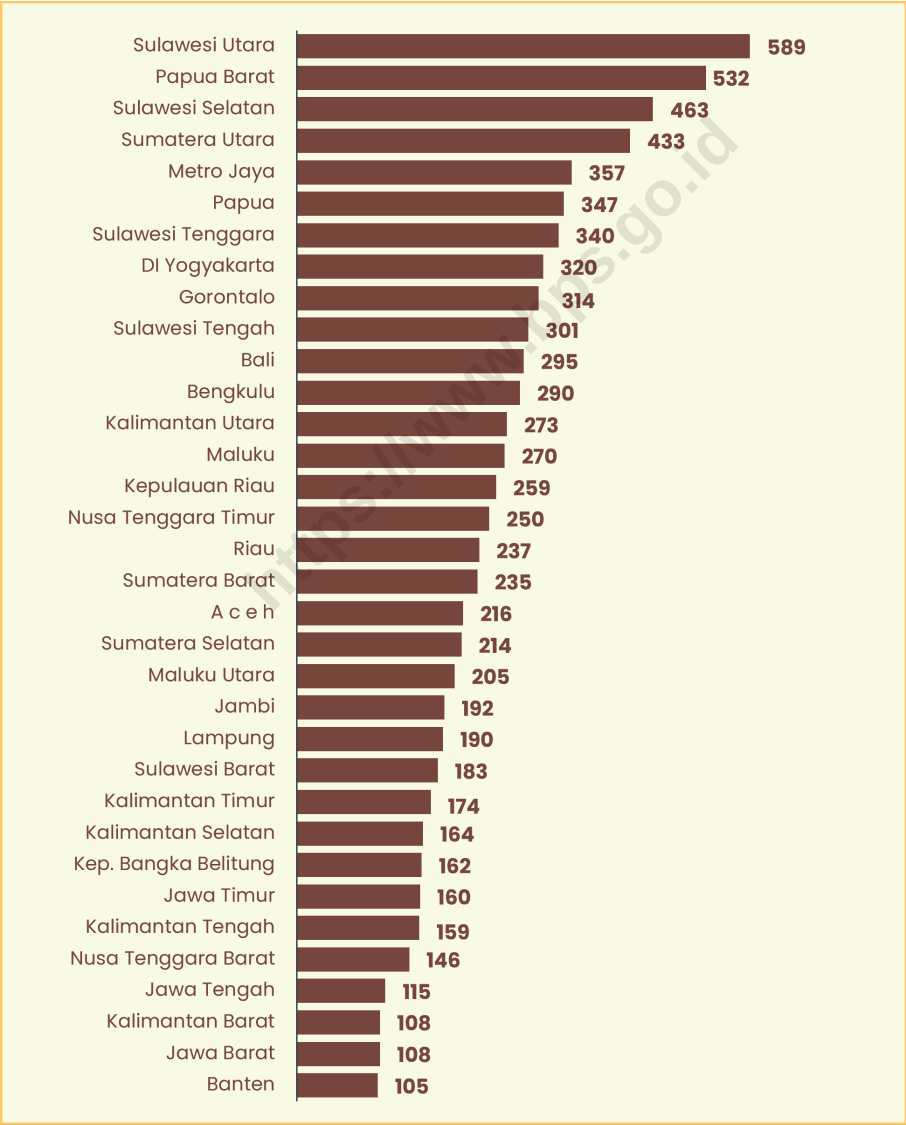
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.3 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Daerah, 2023

Data berikutnya menunjukkan tingkat risiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*) di berbagai wilayah yurisdiksi Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia. Sulawesi Utara memiliki tingkat risiko tertinggi dengan 589 kejadian per 100.000 penduduk, diikuti oleh Papua Barat dengan 532 kejadian, dan Sulawesi Selatan dengan 463 kejadian. Menariknya, meskipun Polda Metro Jaya memiliki jumlah kejahatan tertinggi secara keseluruhan, tingkat risiko kejahatan di sana berada di urutan kelima dengan 357 kejadian.

Di sisi lain, wilayah dengan risiko terendah adalah Banten dengan 105

serta Kalimantan Barat dan Jawa Barat masing-masing dengan 108. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kejahatan di beberapa daerah bisa tinggi, ketika disesuaikan dengan jumlah populasi, risiko yang dihadapi setiap individu di beberapa wilayah besar seperti Jawa Barat dan Banten relatif lebih rendah dibandingkan daerah-daerah kecil atau terpencil dengan populasi yang lebih sedikit. Secara keseluruhan, tingkat risiko kejahatan rata-rata di Indonesia adalah 214 per 100.000 penduduk, dengan variasi yang cukup signifikan antara wilayah yang berbeda.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.4 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.3 Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi



Tidak semua jenis kejahatan dijelaskan dalam publikasi ini. Jenis kejahatan yang dicantumkan hanya jenis kejahatan dengan skala besar dan menjadi kasus menonjol yang dilaporkan kepada polisi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jumlah kejahatan (*crime total*), risiko penduduk terkena kejahatan (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) merupakan agregat dari semua jenis kejahatan sehingga hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara makro dan umum. Pendekatan yang menggabungkan semua jenis kejahatan ke dalam satu total angka telah lama dianggap kurang akurat dan *misleading* (Sherman et al., 2016). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap jenis kejahatan memiliki tingkat keparahan dan dampak yang berbeda-beda, sehingga memperlakukan semuanya secara setara dapat menciptakan gambaran yang keliru.

Penyajian indikator kriminal yang lebih detail dan spesifik dapat lebih bermanfaat untuk menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta membantu memberikan fokus dan prioritas penyelesaian pada jenis kejahatan tertentu. Dengan melakukan klasifikasi maka risiko yang sebenarnya dihadapi masyarakat menjadi lebih jelas, alokasi sumber daya untuk penegakan hukum dapat menjadi lebih efisien, dan pertanggungjawaban pihak terkait dalam menangani berbagai jenis kejahatan pun menjadi lebih baik. Pendekatan yang lebih tepat memerlukan klasifikasi dan evaluasi berdasarkan jenis dan beratnya kejahatan, sehingga strategi penanggulangan dapat disesuaikan secara efektif. Oleh karena itu, publikasi ini juga menyajikan statistik kejahatan berdasarkan klasifikasi kejahatan yang didasarkan pada beberapa kriteria berikut:

- Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya).

- Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
- Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Penyajian klasifikasi jenis kejahatan pada publikasi ini sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Tujuan dari ICCS adalah untuk menyediakan dasar dan klasifikasi yang sama untuk metadata serta standar untuk statistik kriminal di seluruh dunia (Bisogno et al., 2015). Berikut klasifikasi kejahatan yang disajikan dalam publikasi ini:

Tabel 2.1 Koresponden Tabel Klasifikasi Kejahatan yang Disajikan dalam Publikasi Statistik Kriminal 2024

No	Klasifikasi Indonesia (Publikasi Statkrim)	ICCS No	ICCS Section
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kejahatan Terhadap Nyawa	01	<i>Acts Leading To Death Or Intending To Cause Death</i>
	Pembunuhan	0101	<i>Intentional Homicide</i>
	Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	0103	<i>Non-Intentional Homicide</i>
2	Kejahatan Terhadap Fisik Yang Menyebabkan Luka Atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain	02	<i>Acts Causing Harm Or Intending To Cause Harm To The Person</i>
	Penganiayaan	02011	<i>Assaults And Threats , Assault</i>
	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0201	<i>Assaults And Threats</i>
	Pengeroyokan	0201	<i>Assaults And Threats</i>
	Pengancaman	02012	<i>Assaults And Threats , Threats</i>
	Penculikan	02022	<i>Deprivation Of Liberty, Kidnapping</i>
	Kejahatan Perdagangan Manusia	0204	<i>Trafficking In Persons (TIP)</i>
	Pemerasan	0205	<i>Coercion</i>
	Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	0206	<i>Negligence</i>
	Penghinaan	0209	<i>Defamation Or Insult</i>
3	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	03	<i>Injurious Acts Of A Sexual Nature</i>
	Perkosaan	03011	<i>Sexual Violence, Rape</i>
	Pencabulan	03012	<i>Sexual Violence, Sexual Assault</i>
	Kekerasan Seksual	0301	<i>Sexual Violence</i>
	Persetubuhan Terhadap Anak	030113	<i>Sexual Violence, Statutory Rape</i>
4	Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Dengan Penggunaan Kekerasan	04	<i>Acts Against Property Involving Violence Or Threat Against A Person</i>
	Pencurian Dengan Kekerasan	0401	<i>Robbery</i>

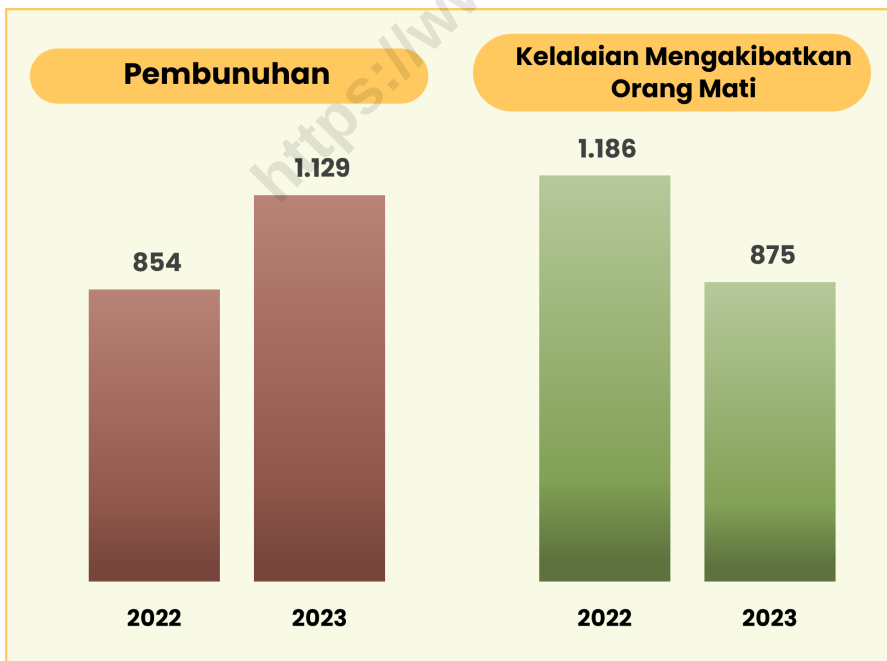
Lanjutan Tabel 2.1

No	Klasifikasi Indonesia (Publikasi Statkrim)	ICCS No	ICCS Section
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan	05	Acts Against Property Only
	Pencurian	05022	Theft, Theft of Personal Property
	Pencurian Dengan Pemberatan	0501	Burglary
	Pencurian Kendaraan Bermotor	05021	Theft, Theft of A Motorized Vehicle
	Pengrusakan/Penghancuran Barang	0504	Property Damage
	Pembakaran Dengan Sengaja	0504	Property Damage
6	Kejahatan Terkait Narkotika Dan Obat-Obatan	06	Acts Involving Controlled Drugs or Other Psychoactive Substances
	Narkotika Dan Psikotropika	0601	Unlawful Acts Involving Controlled Drugs or Precursors
	Menjual Atau Mengedarkan Obat Keras/ Bebas Terbatas Tanpa Izin	0602	Unlawful Acts Involving Alcohol, Tobacco or Other Controlled Substances
7	Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, Dan Korupsi	07	Acts Involving Fraud, Deception or Corruption
	Penipuan/Perbuatan Curang	0702	Forgery/Counterfeiting
	Penggelapan	0701	Fraud
	Korupsi	0703	Corruption
	Penadahan		
8	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	08	Acts Against Public Order, Authority And Provisions of The State
	Terhadap Ketertiban Umum	0801	Acts Against Public Order Behavioural Standards
9	Kejahatan Terhadap Keamanan Publik Dan Negara	09	Acts Against Public Safety And State Security
	Membahayakan Keamanan Umum	0904	Acts Against State Security
	Penyalahgunaan Sajam, Senpi, Dan Handak	0901	Acts Involving Weapons, Explosives and Other Destructive Materials
	Kecelakaan Lalu Lintas	0907	Non-Injurious Traffic Violations
10	Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup	10	Acts Against The Natural Environment
	Kejahatan Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Illegal Logging)	10041	Acts That Result In The Depletion or Degradation of Natural Resources, Illegal Logging
	Kejahatan Perkebunan	1009	Other Acts Against The Natural Environment
	Kejahatan Perikanan (Illegal Fishing)	10042	Acts That Result In The Depletion or Degradation of Natural Resources, Illegal Hunting, Fishing or Gathering of Wild Fauna and Flora
	Kejahatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Illegal Mining)	10043	Acts That Result In The Depletion or Degradation of Natural Resources, Illegal Mining
	Kejahatan Minyak Dan Gas (Migas)	1009	Other Acts Against The Natural Environment

2.4 Kejahatan Terhadap Nyawa

Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental (Uddin et al., 2023). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A juga secara tegas menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Oleh karena itu, kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) menjadi kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional serta memiliki hukuman yang paling berat dalam KUHP Indonesia .

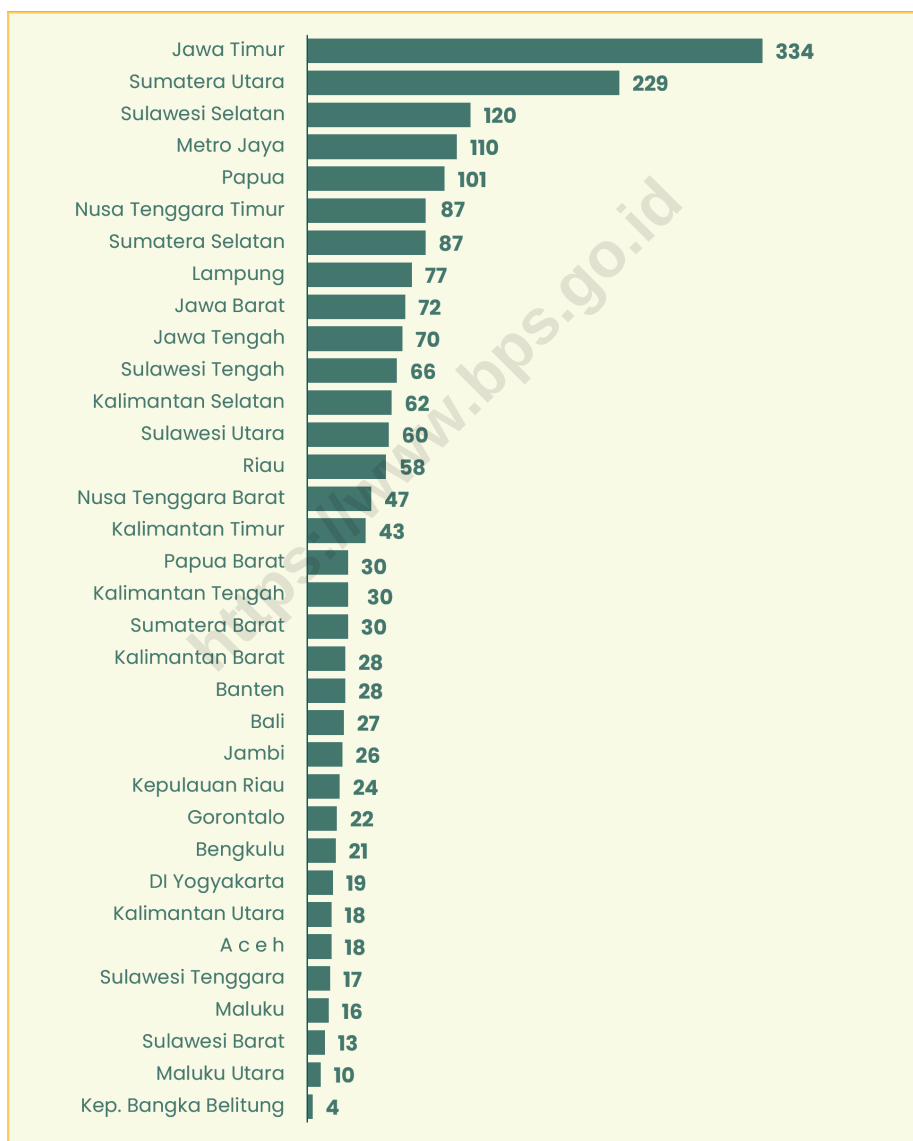
Pada publikasi ini, kejahatan terhadap nyawa mencakup dua jenis, yakni pembunuhan dan kelalaian mengakibatkan orang mati. Berdasarkan Gambar 2.5 menunjukkan perubahan jumlah kasus untuk dua jenis kejahatan terhadap nyawa antara tahun 2022 dan 2023. Kasus pembunuhan meningkat dari 854 pada tahun 2022 menjadi 1.129 pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan dalam jumlah kejadian. Sebaliknya, kasus kelalaian yang mengakibatkan orang mati menurun dari 1.186 pada tahun 2022 menjadi 875 pada tahun 2023, menunjukkan adanya penurunan dalam jenis kejahatan ini.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.5 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2022–2023

Tiga wilayah Kepolisian Daerah yang memiliki jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar pada tahun 2023 adalah Polda Jawa Timur (334 kejadian), Polda Sumatera Utara (229 kejadian), dan Polda Sulawesi Selatan (120 kejadian). Di lain sisi, wilayah Kepolisian Daerah dengan jumlah kejadian paling sedikit terdapat di Polda Kepulauan Bangka Belitung dengan empat kejadian, diikuti oleh Polda Maluku Utara (10 kejadian) dan Polda Sulawesi Barat dengan jumlah kejadian 13 kejadian (Gambar 2.6).



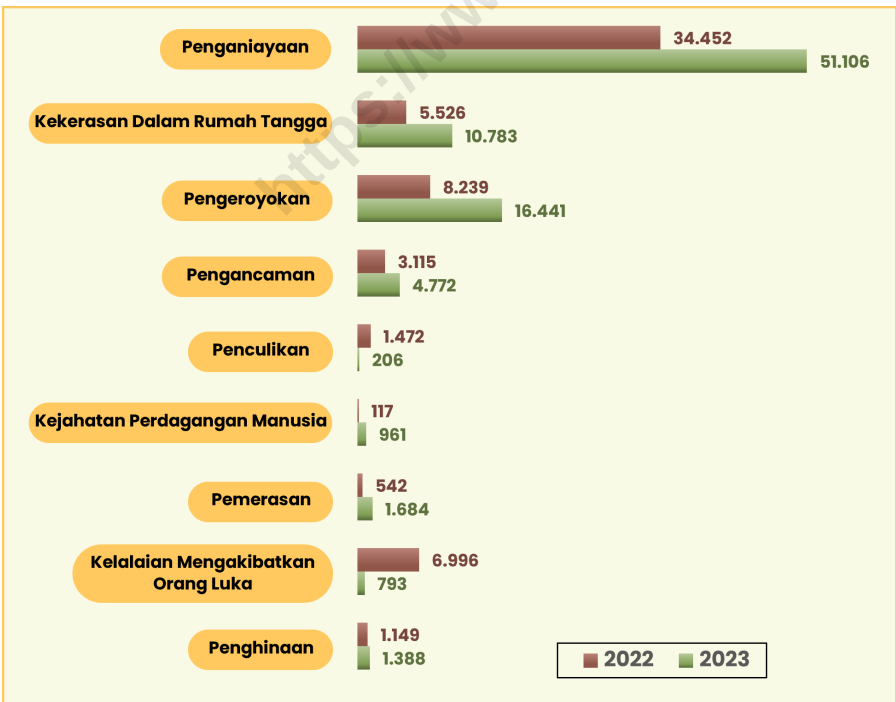
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.5 Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain

Pada publikasi ini, kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain mencakup beberapa jenis kejahatan yakni penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, pengeroyokan, pengancaman, penculikan, kejahatan perdagangan manusia, pemerasan, kelalaian mengakibatkan orang luka, dan penghinaan.

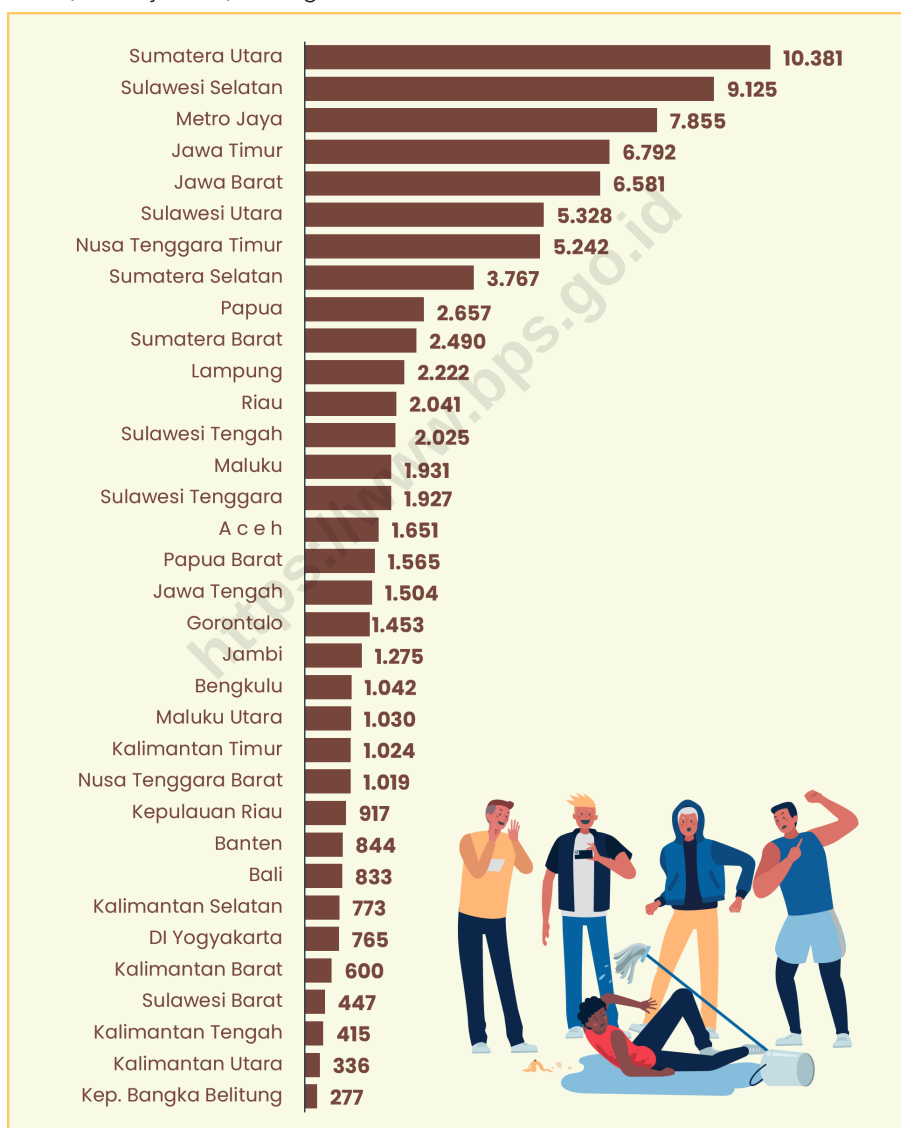
Dilihat dari perkembangannya, secara total jumlah kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain mengalami peningkatan selama periode 2022–2023 (Gambar 2.7). Tiga jenis kejahatan terbesar dalam kategori kejahatan ini adalah penganiayaan, pengeroyokan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada tahun 2022, penganiayaan tercatat sebanyak 34.452 kejadian dan meningkat signifikan menjadi 51.106 kejadian pada 2023. Pengeroyokan juga mengalami peningkatan, dari 8.239 kejadian pada 2022 menjadi 16.441 kejadian pada 2023. Sementara itu, KDRT meningkat dari 5.526 kejadian pada 2022 menjadi 10.783 kejadian pada 2023.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.7 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain, 2022–2023

Pada tahun 2023, wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan luka atau bertujuan menyakiti orang lain terbanyak adalah Polda Sumatera Utara dengan 10.381 kejadian, diikuti oleh Polda Sulawesi Selatan dengan 9.125 kejadian, dan Polda Metro Jaya dengan 7.855 kejadian. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit berada di Polda Sulawesi Barat (447 kejadian), Polda Kalimantan Tengah (415 kejadian), dan Polda Kalimantan Utara (336 kejadian) sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.8.

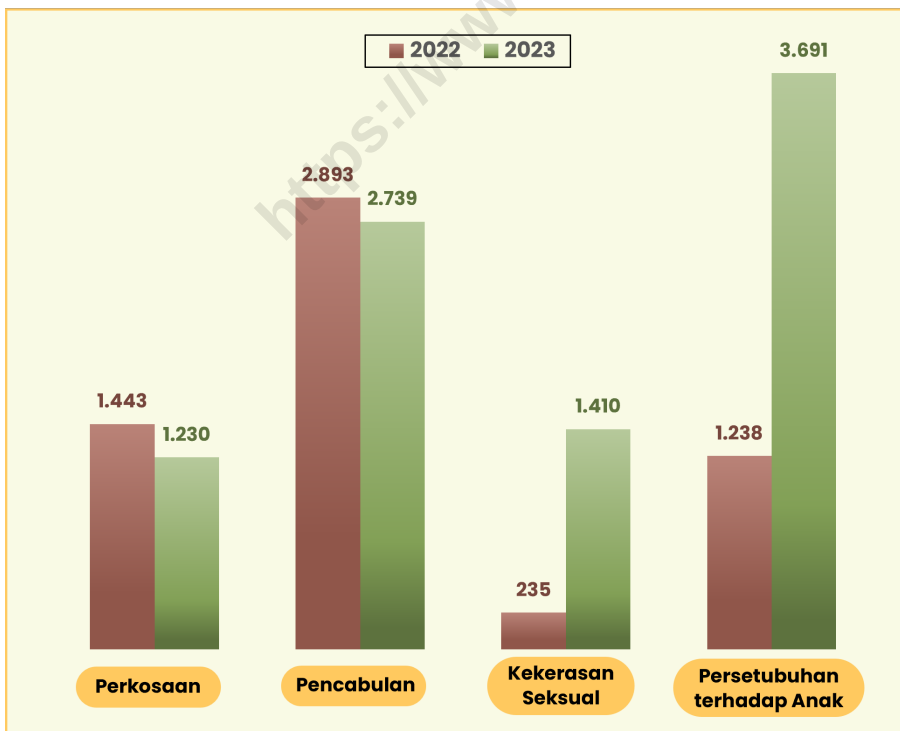


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.6 Kejahatan Terhadap Kesusilaan

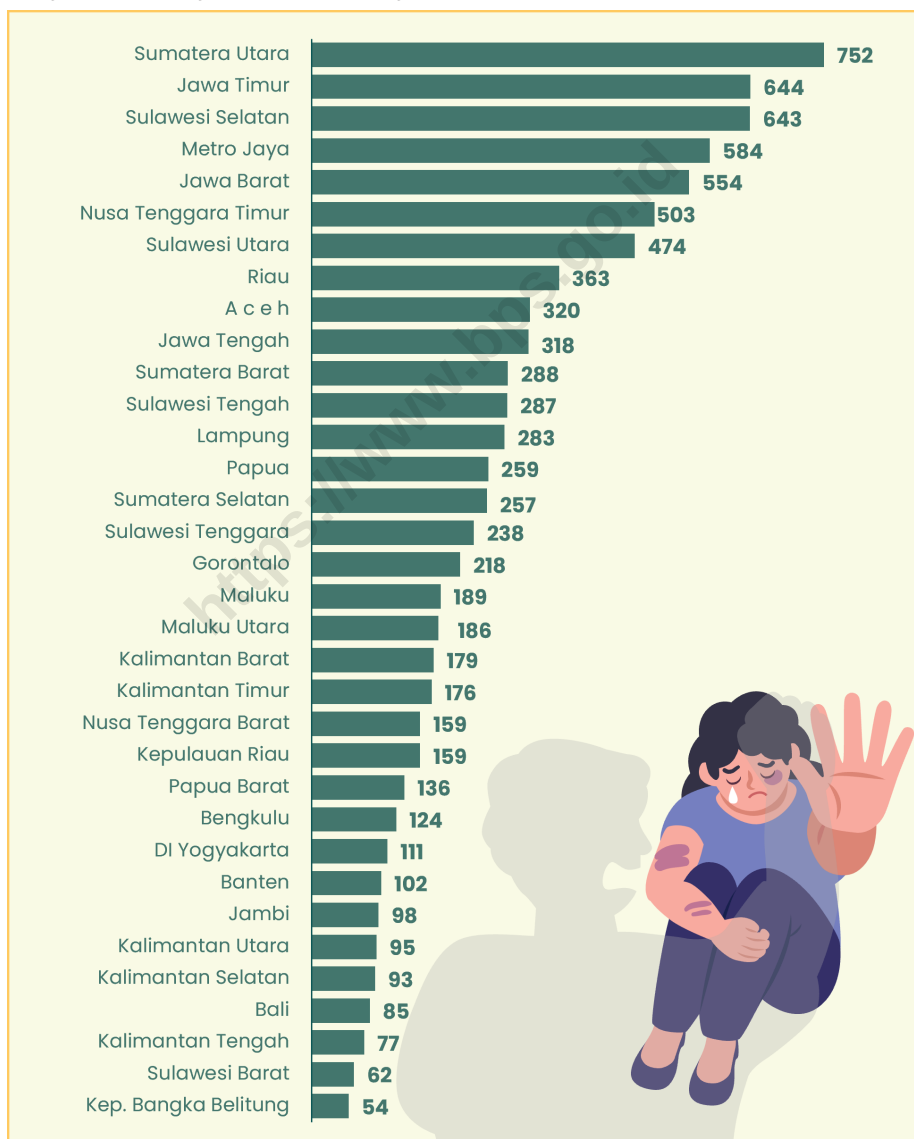
Pada publikasi ini, klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan, pencabulan, kekerasan seksual, dan persetubuhan terhadap anak. Apabila dikaji perkembangannya, terjadi peningkatan jumlah kejahatan terhadap kesusilaan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, dari 5.809 kejadian menjadi 9.070 kejadian. Berdasarkan Gambar 2.9, kasus perkosaan dan pencabulan mengalami penurunan, dari 1.443 menjadi 1.230 untuk perkosaan dan dari 2.893 menjadi 2.739 untuk pencabulan. Namun, ada peningkatan pada kategori kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak. Kekerasan seksual meningkat dari 235 menjadi 1.410 kejadian, sedangkan persetubuhan terhadap anak melonjak dari 1.238 menjadi 3.691 kejadian. Peningkatan ini mungkin mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaporan kasus, tetapi juga menunjukkan adanya tren kekerasan seksual yang lebih mengkhawatirkan, khususnya terhadap anak-anak. Berdasarkan data Kepolisian, kejahatan terhadap kesusilaan juga mengalami peningkatan ketika awal pandemi (Syaputra, 2022).



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2022–2023

Gambar 2.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 752 kejadian. Di posisi kedua dan ketiga adalah Polda Jawa Timur dan Polda Sulawesi Selatan, masing-masing sebanyak 644 kejadian dan 643 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Sulawesi Barat, dan Polda Kalimantan Tengah. Jumlah kejadian di ketiga wilayah tersebut masing-masing 54 kejadian, 62 kejadian, dan 77 kejadian.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.10 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.7 Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan

Dalam hierarki klasifikasi jenis kejahatan, jenis kejahatan terhadap hak milik/ barang dengan penggunaan kekerasan tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti, juga merupakan kejahatan terhadap fisik.

Berdasarkan Gambar 2.11 terlihat bahwa pada tahun 2023, kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, khususnya pencurian dengan kekerasan, mengalami peningkatan. Jumlah kejadian pencurian dengan kekerasan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.335 kejadian, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 6.573 kejadian. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan sekitar 51 persen.

Berdasarkan Gambar 2.12, wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan terbanyak pada tahun 2023 adalah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 1.050 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Polda Sumatera Selatan dengan 796 kejadian dan diikuti oleh Polda Jawa Barat dengan 607 kejadian.

Adapun tiga wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan paling sedikit



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.11 Jumlah Kejadian Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan, 2022–2023

adalah Polda Maluku Utara (satu kejadian), Polda Gorontalo (dua kejadian), dan Polda Sulawesi Barat (empat kejadian).



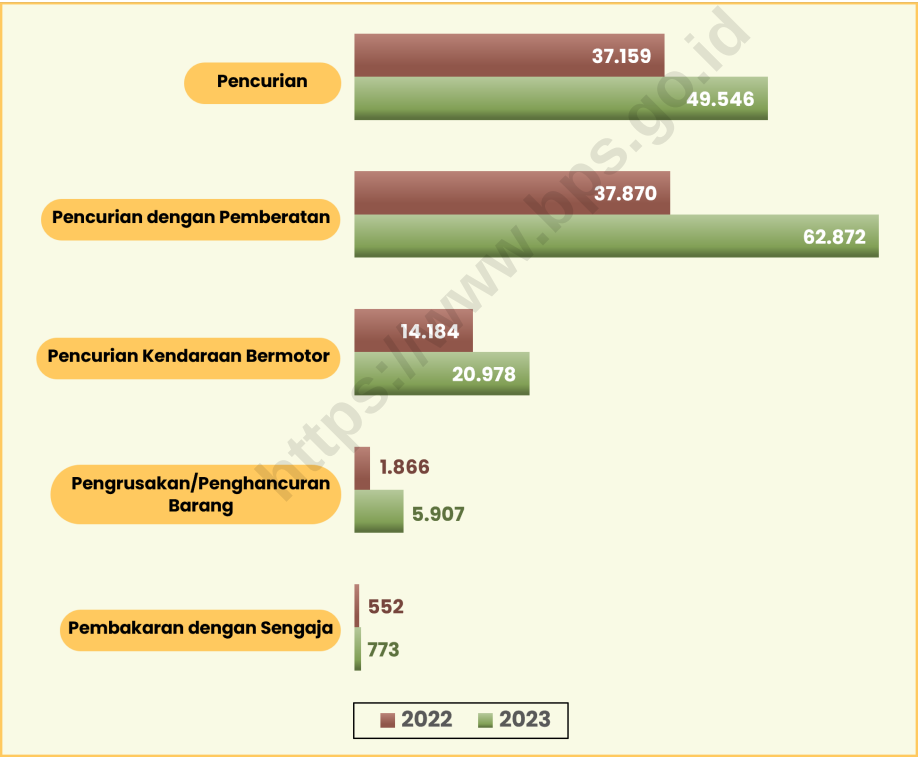
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.12 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.8 Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan

Kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan terdiri dari pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, dan pembakaran dengan sengaja.

Tiga jenis kejahatan terbesar terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan pada tahun 2023 adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian, dan pencurian kendaraan bermotor. Pencurian dengan pemberatan menjadi jenis kejahatan terbesar dengan total 62.872 kejadian, menyumbang sekitar 45 persen dari total 140.076 kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan. Di posisi kedua, pencurian biasa tercatat sebanyak 49.546 kejadian atau sekitar 35 persen dari total kejahatan. Pencurian kendaraan bermotor berada di posisi ketiga dengan 20.978 kejadian, yang merupakan sekitar 15 persen dari keseluruhan kejahatan. Ketiga jenis kejahatan ini bersama-sama mendominasi lebih dari 90 persen total kejadian dalam kategori kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan pada tahun 2023.

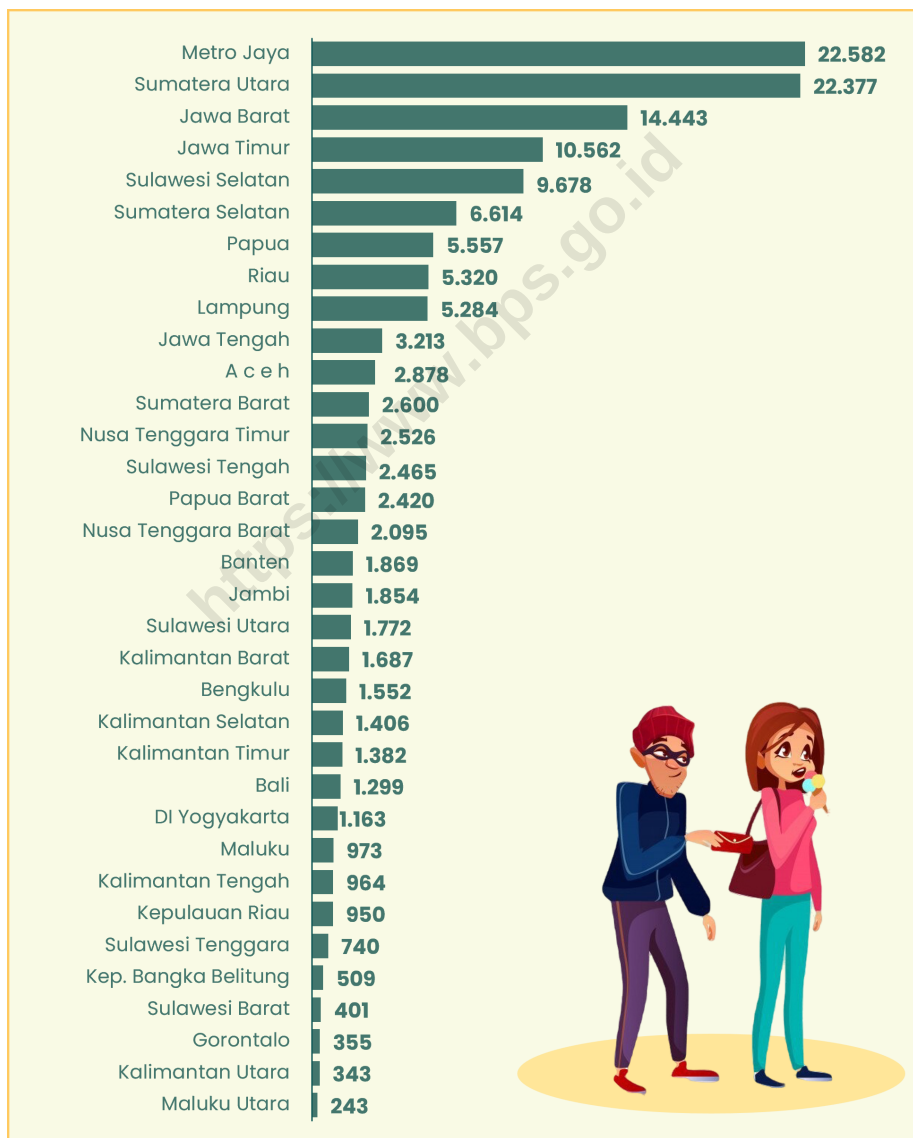


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan, 2022–2023

Dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2023, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan mengalami peningkatan, dengan total kejadian melonjak dari 91.631 pada 2022 menjadi 140.076. Kategori pencurian dengan pemberatan mencatat lonjakan terbesar, dari 37.870 menjadi 62.872 kejadian, diikuti oleh pencurian kendaraan bermotor yang meningkat dari 14.184 menjadi 20.978 kejadian. Pengrusakan/penghancuran barang juga mengalami

peningkatan dari 1.866 menjadi 5.907 kejadian, sementara pembakaran dengan sengaja bertambah dari 552 menjadi 773 kejadian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan mencakup situasi yang dianggap lebih serius, seperti pencurian pada malam hari, di tempat bencana, atau dengan cara masuk paksa. Karena kondisi tersebut meningkatkan bahaya dan kerugian, hukuman yang diberikan juga lebih tinggi, mencerminkan dampak kejahatan yang lebih besar.



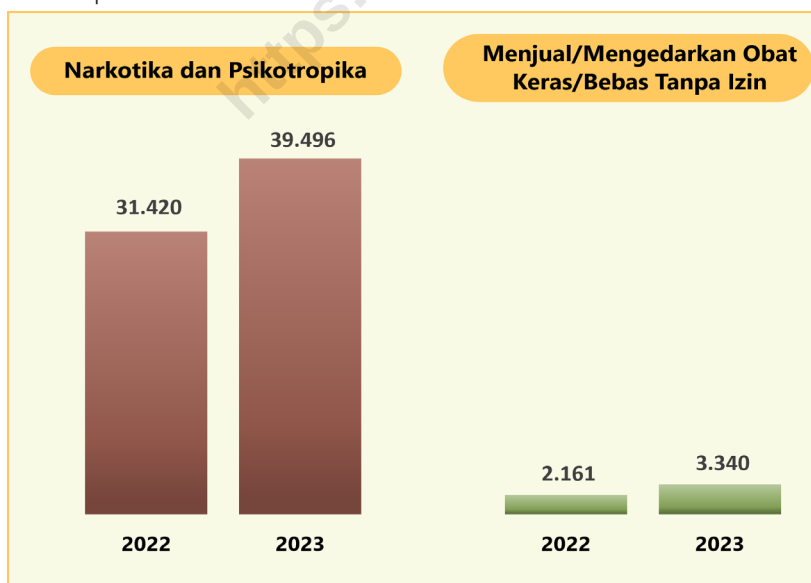
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2023

Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan menurut Kepolisian Daerah (Polda) disajikan pada Gambar 2.14. Wilayah Polda Metro Jaya dan Sumatera Utara merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan terbanyak pada tahun 2023, yaitu masing-masing sebanyak 22.582 dan 22.377 kejadian kejahatan. Di posisi selanjutnya, terdapat wilayah Polda Jawa Barat dengan jarak yang cukup jauh dibandingkan dua wilayah sebelumnya, yaitu 14.443 kejadian. Sementara itu, tiga wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan paling sedikit adalah Polda Maluku Utara (243 kejadian), Polda Kalimantan Utara (343 kejadian), dan Polda Gorontalo (355 kejadian).

2.9 Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-obatan

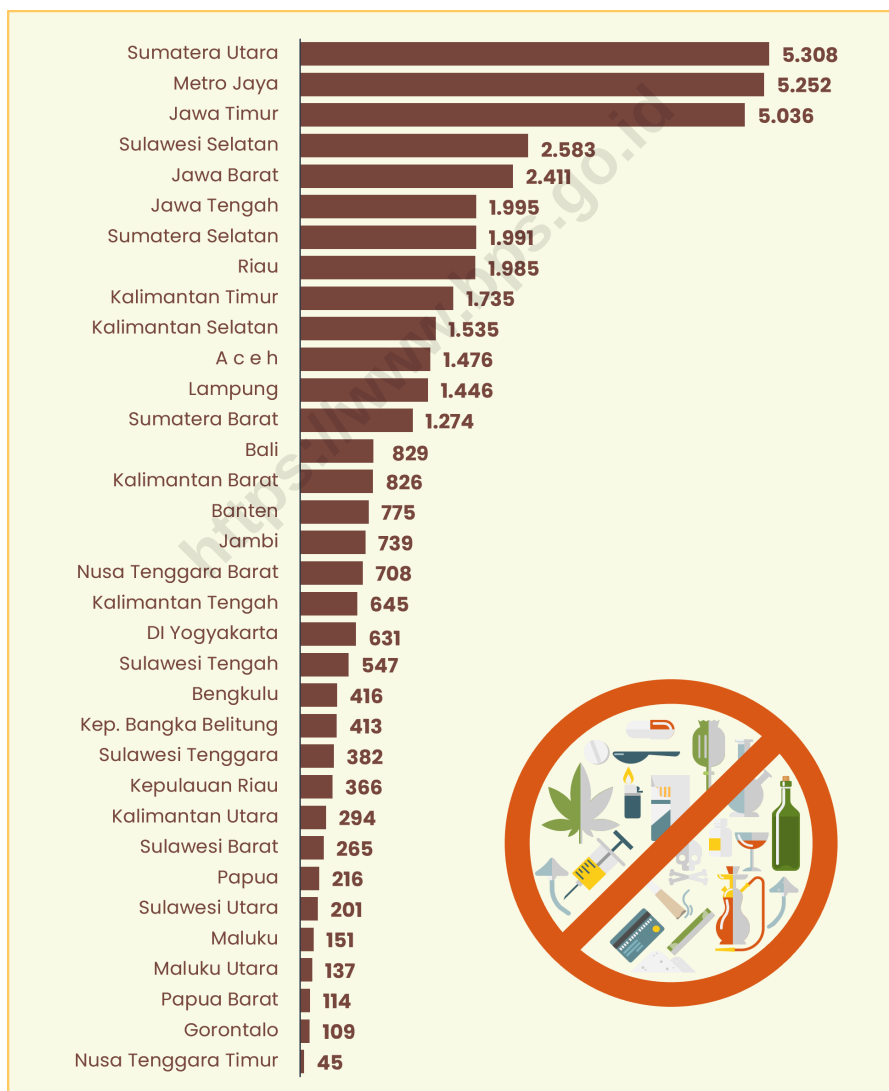
Kejahatan terkait narkotika dan obat-obatan merupakan jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) (Hartanto & Ningrum Amin, 2021). Pada publikasi ini, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkotika dan obat-obatan mencakup kejahatan narkotika dan psikotropika serta kejahatan menjual atau mengedarkan obat keras/bebas terbatas tanpa izin.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika dan Obat-obatan, 2022–2023

Dilihat dari perkembangannya selama periode 2022–2023, jumlah kejahatan terkait narkoba dan obat-obatan cenderung meningkat (Gambar 2.15). Pada kategori narkoba dan psikotropika, terdapat sebanyak 31.420 kejadian pada 2022, kemudian meningkat menjadi 39.496 kejadian pada 2023. Kejahatan terkait penjualan atau pengedaran obat keras/bebas terbatas tanpa izin juga mengalami peningkatan, dari 2.161 kejadian pada 2022 menjadi 3.340 pada 2023. Total kejahatan dalam kategori ini meningkat dari 33.581 pada 2022 menjadi 42.836 pada 2023, mengindikasikan semakin tingginya masalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di masyarakat.



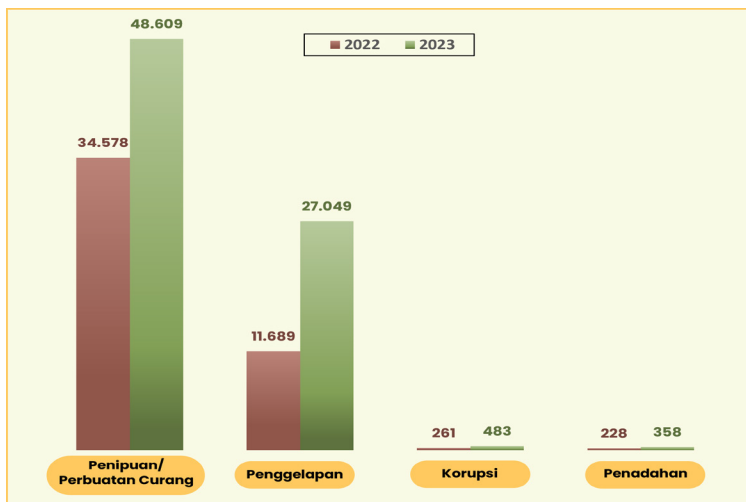
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Terkait Narkoba dan Obat-obatan Menurut Kepolisian Daerah, 2023

Gambar 2.16 menunjukkan bahwa jumlah kejahatan terkait narkoba dan obat-obatan tahun 2023 paling banyak terjadi di wilayah Polda Sumatera Utara dengan jumlah sebanyak 5.308 kejadian, kemudian diikuti oleh Polda Metro Jaya (5.252 kejadian) dan Polda Jawa Timur (5.036 kejadian). Tiga wilayah Polda tersebut mencakup lebih dari 36 persen dari seluruh kejadian di Indonesia pada tahun 2023. Sementara itu, wilayah Polda Papua Barat, Polda Gorontalo, dan Polda Nusa Tenggara Timur menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terkait narkoba dan obat-obatan yang paling sedikit, masing-masing sebanyak 114 kejadian, 109 kejadian, dan 45 kejadian.

2.10 Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

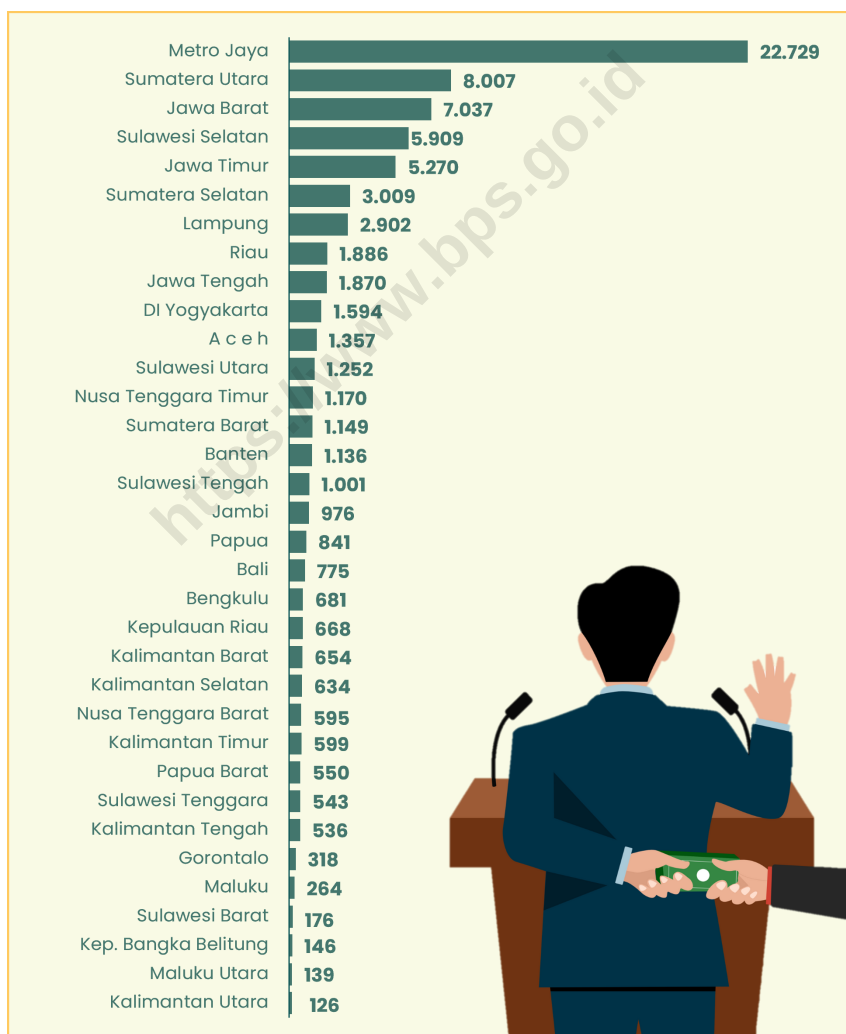
Klasifikasi kejahatan ini mencakup kejahatan penipuan/perbuatan curang, penggelapan, korupsi, dan penadahan. Kejadian kejahatan yang tercatat di Polri mengalami peningkatan selama periode 2022–2023 (Gambar 2.17). Kejahatan penipuan atau perbuatan curang tercatat sebanyak 48.609 kejadian pada 2023, meningkat dari 34.578 pada 2022, menjadikannya jenis kejahatan terbesar dalam kategori klasifikasi ini. Kemudian, penggelapan juga meningkat, dari 11.689 kejadian pada 2022 menjadi 27.049 pada 2023. Sementara itu, kejahatan korupsi meningkat dari 261 menjadi 483 kasus, dan penadahan bertambah dari 228 menjadi 358 kejadian. Secara keseluruhan, total kejadian kejahatan dalam kategori ini naik dari 46.756 pada 2022 menjadi 76.499 pada 2023.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2022–2023

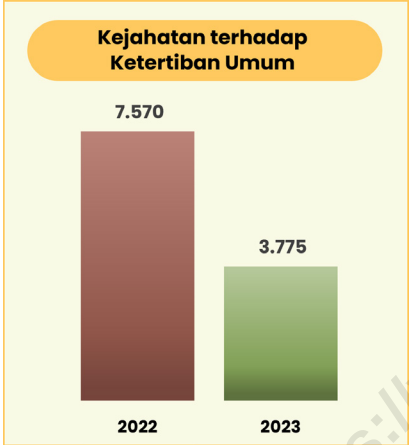
Berdasarkan Gambar 2.18, wilayah Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) sebanyak 22.729 kejadian. Di posisi selanjutnya, terdapat Polda Sumatera Utara dan Polda Jawa Barat dengan selisih jumlah kasus yang cukup jauh dibandingkan Polda Metro Jaya, yaitu masing-masing sebanyak 8.007 kejadian dan 7.037 kejadian. Gambar 2.18 juga menunjukkan bahwa Polda Kepulauan Bangka-Belitung, Polda Maluku Utara, dan Polda Kalimantan Utara adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 146 kejadian, 139 kejadian, dan 126 kejadian.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.18 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.11 Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

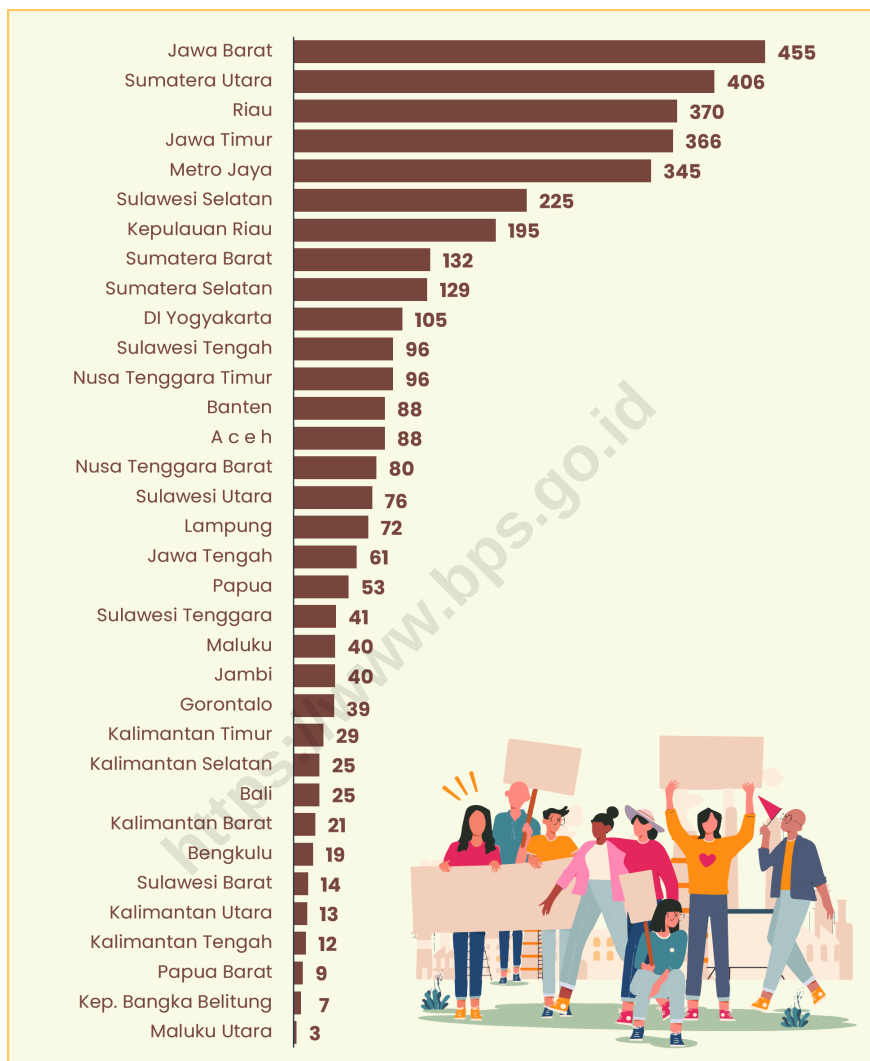
Gambar 2.19 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, 2022–2023

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, kejahatan terhadap ketertiban umum mencakup berbagai tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan sosial. Beberapa di antaranya adalah pelanggaran terhadap ketertiban umum seperti kerusuhan dan kebisingan (Pasal 218–225 KUHP) serta penyebaran berita bohong atau provokasi yang dapat menciptakan keresahan (Pasal 160 KUHP). Penanganan jenis kejahatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat, menghindari kekacauan, dan memastikan ketertiban di ruang publik.

Klasifikasi kejahatan ini mencakup kejahatan terhadap ketertiban umum. Data kejahatan terhadap ketertiban umum menunjukkan penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan 2022. Pada tahun 2022, terdapat 7.570 kejadian, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 3.775 kejadian.

Gambar 2.20 menunjukkan bahwa jumlah kejahatan terhadap ketertiban umum tahun 2023 paling banyak terjadi di wilayah Polda Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 455 kejadian, kemudian diikuti oleh Polda Sumatera Utara (406 kejadian) dan Polda Riau (370 kejadian). Sementara itu, wilayah Polda Papua Barat, Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Polda Maluku Utara menjadi wilayah

dengan jumlah kejadian terhadap ketertiban umum yang paling sedikit, masing-masing sebanyak 9 kejadian, 7 kejadian, dan 3 kejadian



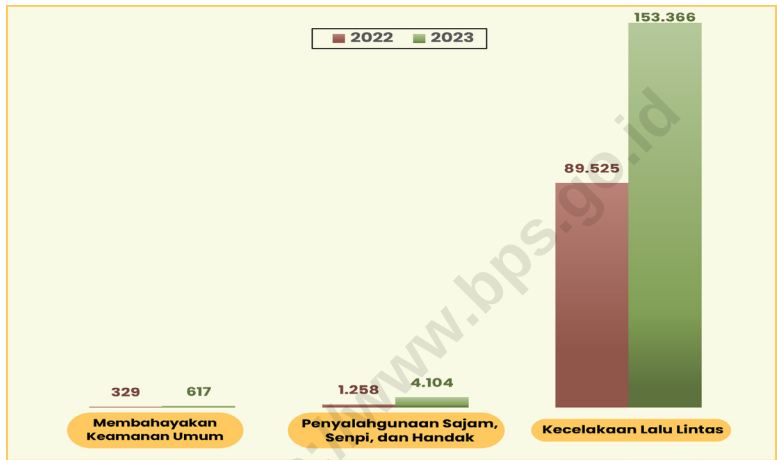
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.20 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.12 Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara

Pada publikasi ini, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap keamanan publik dan negara mencakup kejahatan yang membahayakan keamanan umum, penyalahgunaan senjata tajam (sajam), senjata api (senpi), dan bahan peledak (handak), serta kecelakaan lalu lintas.

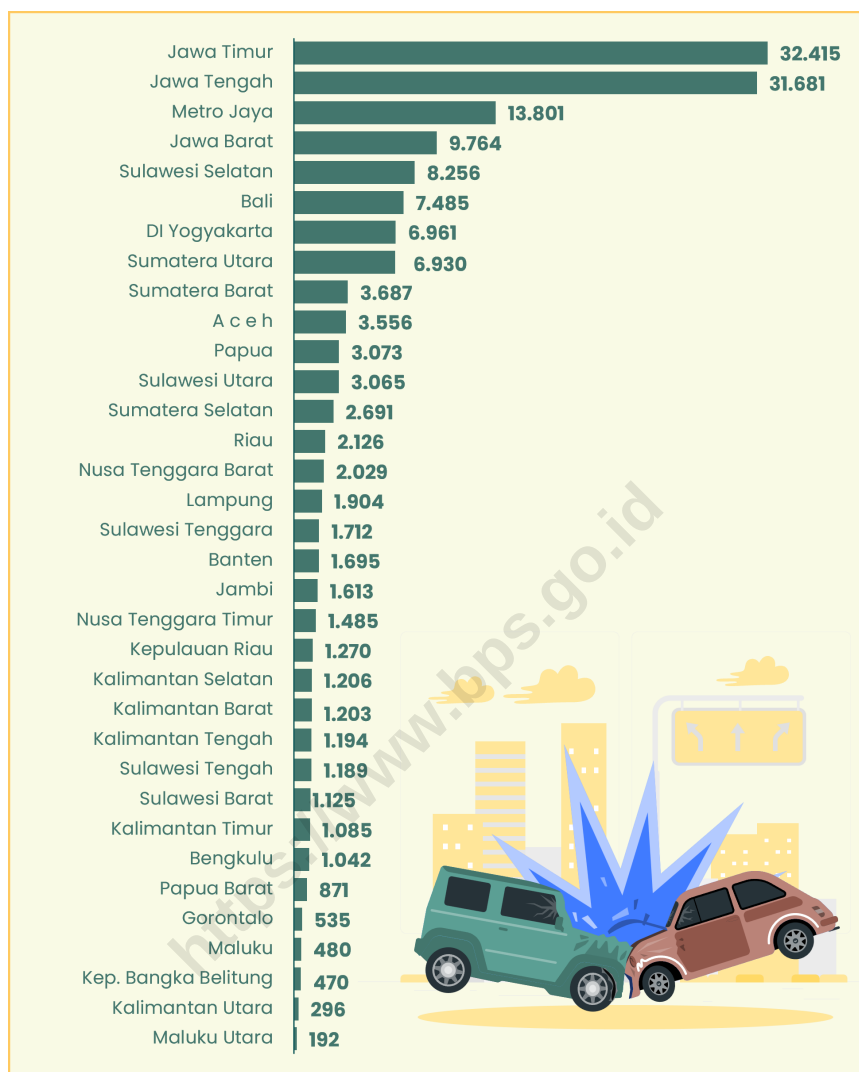
Pada tahun 2023, kejahatan terhadap keamanan publik dan negara mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Kejahatan yang membahayakan keamanan umum tercatat sebanyak 617 kejadian, naik dari 329 pada tahun sebelumnya. Penyalahgunaan senjata tajam (sajam), senjata api (senpi), dan bahan peledak (handak) juga meningkat dari 1.258 menjadi 4.104 kejadian. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas mencatat jumlah tertinggi, dengan 153.366 kejadian pada 2023, naik dari 89.525 pada 2022. Secara total, kejahatan dalam kategori ini naik dari 91.112 menjadi 158.087 kejadian, dengan kecelakaan lalu lintas menjadi penyumbang terbesar.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.21 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara, 2022-2023

Berdasarkan Gambar 2.22, wilayah Polda dengan jumlah kejadian terhadap keamanan publik dan negara terbanyak adalah Polda Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 32.415 kejadian dan 31.681 kejadian. Di posisi selanjutnya, terdapat Polda Metro Jaya dengan selisih jumlah kasus yang cukup jauh dibandingkan dua Polda sebelumnya, yaitu 13.801 kejadian. Gambar 2.22 juga menunjukkan bahwa Polda Kepulauan Bangka-Belitung, Polda Kalimantan Utara, dan Polda Maluku Utara adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap keamanan publik dan negara yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 470 kejadian, 296 kejadian, dan 192 kejadian.



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

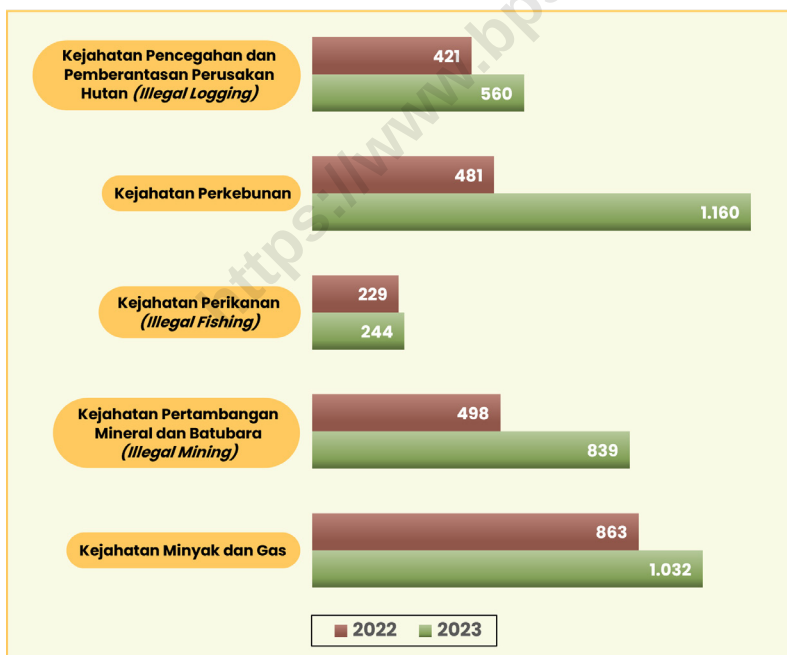
Gambar 2.22 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Keamanan Publik dan Negara Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.13 Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup

Pada publikasi ini, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap lingkungan hidup mencakup kejahatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (*illegal logging*), kejahatan perkebunan, kejahatan perikanan (*illegal fishing*), kejahatan pertambangan mineral dan batubara (*illegal mining*), serta kejahatan minyak dan gas (migas). Pada tahun 2023, kejahatan terhadap lingkungan hidup mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Kejahatan pencegahan dan pemberantasan

perusakan hutan (*illegal logging*) tercatat sebanyak 560 kejadian, naik dari 421 pada tahun sebelumnya. Kejahatan perkebunan juga meningkat dari 481 menjadi 1.160 kejadian. Kejahatan perikanan (*illegal fishing*) mengalami sedikit kenaikan dari 229 menjadi 244 kejadian, sementara kejahatan pertambangan mineral dan batubara (*illegal mining*) naik dari 498 menjadi 839 kejadian. Selain itu, kejahatan minyak dan gas (migas) meningkat dari 863 menjadi 1.032 kejadian. Secara keseluruhan, jumlah kejahatan lingkungan hidup meningkat dari 2.492 pada 2022 menjadi 3.835 pada 2023.

Dari total 3.835 kejahatan terhadap lingkungan hidup pada tahun 2023, dua kejahatan terbesar adalah kejahatan perkebunan serta kejahatan minyak dan gas (migas). Kejahatan perkebunan menyumbang 1.160 kejadian, yang mencakup sekitar 30 persen dari total kejahatan lingkungan hidup. Sementara itu, kejahatan minyak dan gas (migas) tercatat sebanyak 1.032 kejadian, atau sekitar 27 persen dari total. Kedua kategori ini bersama-sama mencakup sekitar 57 persen dari keseluruhan kejahatan lingkungan hidup pada tahun 2023.

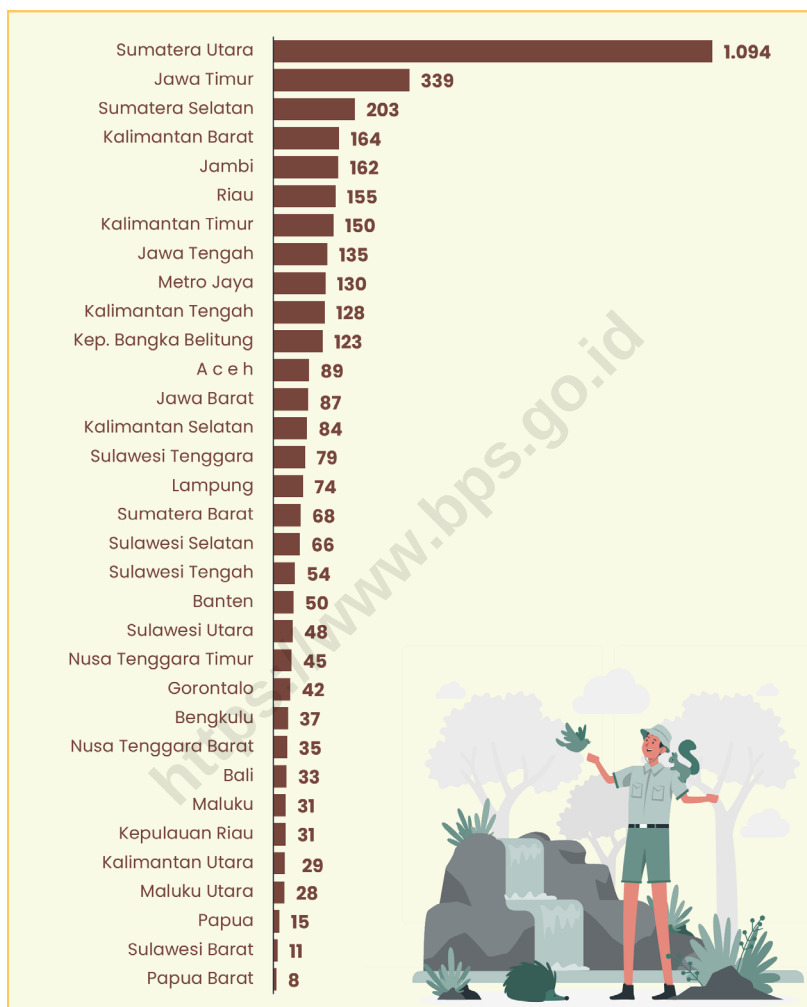


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.23 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup, 2022-2023

Berdasarkan Gambar 2.24, wilayah Polda dengan jumlah kejadian terhadap lingkungan hidup terbanyak adalah Polda Sumatera Utara sebanyak 1.094 kejadian. Di posisi selanjutnya, terdapat Polda Jawa Timur dan Polda Sumatera Selatan dengan selisih jumlah kasus yang cukup jauh dibandingkan Polda Sumatera Utara, yaitu masing-masing sebanyak 339 kejadian dan 203

kejadian. Gambar 2.24 juga menunjukkan bahwa Polda Papua, Polda Sulawesi Barat, dan Polda Papua Barat adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap lingkungan hidup yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 15 kejadian, 11 kejadian, dan 8 kejadian.



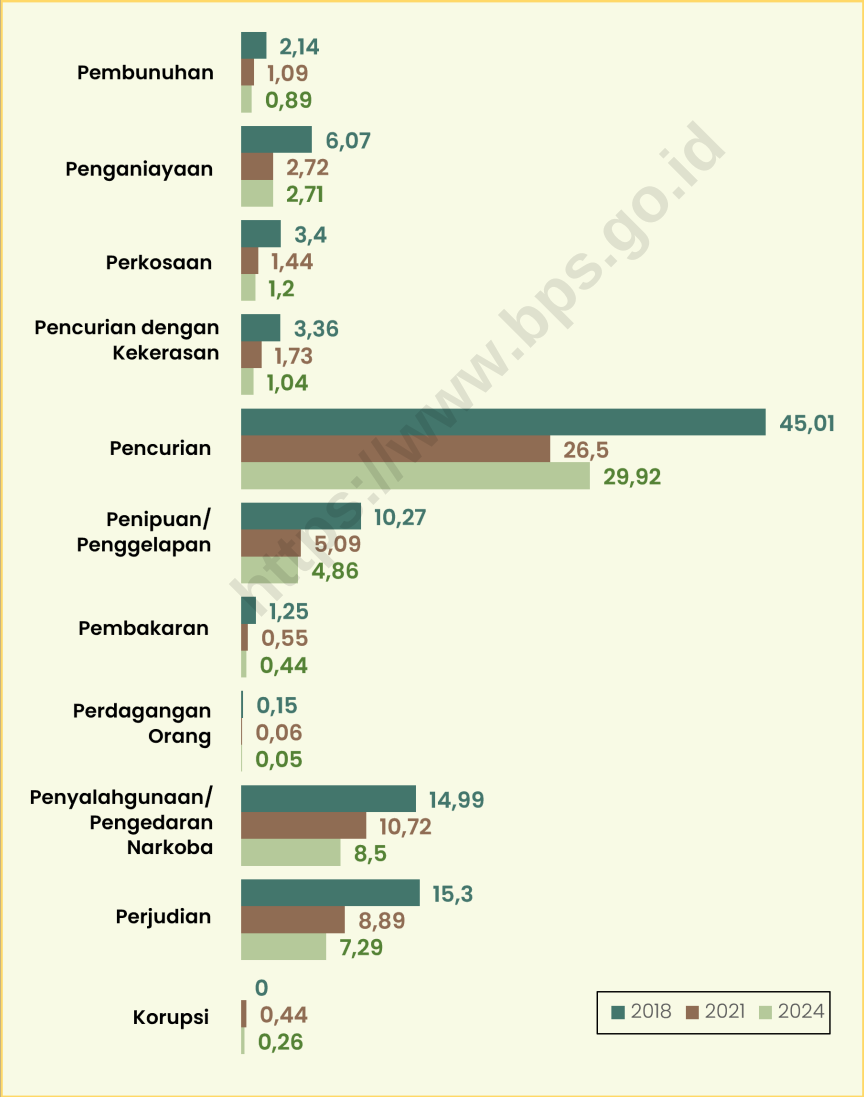
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.24 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Menurut Kepolisian Daerah, 2023

2.14 Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan

Bagian ini membahas analisis kejadian kejahatan menggunakan pendekatan kewilayahan yang memfokuskan pada lokasi serta wilayah tempat kejahatan terjadi. Lebih lanjut, bagian ini akan menggambarkan situasi dan tren

kejadian kejahatan yang dialami masyarakat berdasarkan distribusi wilayah, yang diukur melalui persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan. Data untuk analisis ini diperoleh dari Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018, 2021, dan 2024 yang secara rutin dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun. Selain itu, analisis ini juga akan mengidentifikasi pola kejadian kejahatan yang lebih dominan di wilayah perkotaan maupun perdesaan, serta mengevaluasi bagaimana kebijakan keamanan publik dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kejahatan di berbagai wilayah.



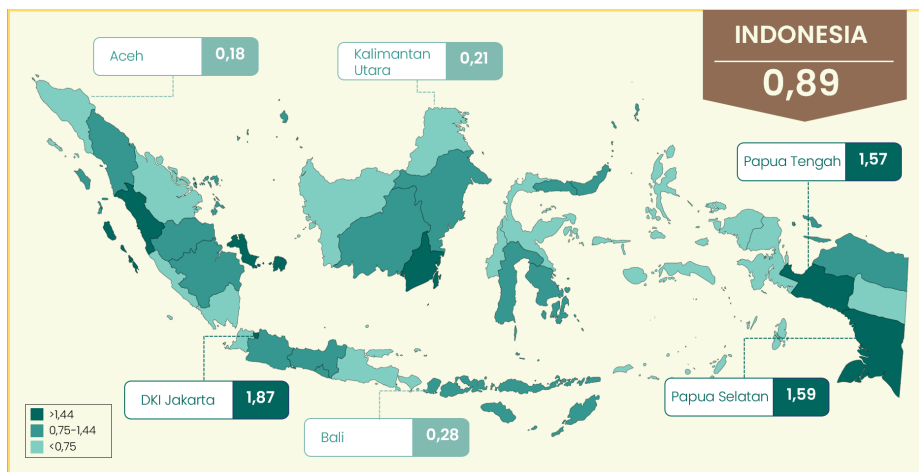
Sumber: Podes 2018, 2021, dan 2024

Gambar 2.25 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2018, 2021, dan 2024

Berdasarkan hasil pendataan Podes 2024, terjadi penurunan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian, yaitu 29,92 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya yang berada di bawah 10 persen (Gambar 2.25). Meskipun kejahatan ini menunjukkan tren penurunan pada tahun 2021, angka tersebut justru meningkat pada tahun 2024, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih dari pihak berwenang dalam menangani masalah ini.

Kecuali pencurian, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan secara keseluruhan mengalami penurunan di semua jenis kejahatan pada tahun 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada kasus penyalahgunaan/pengedaran narkoba, yang turun dari 10,72 persen pada tahun 2021 menjadi 8,50 persen pada tahun 2024. Di sisi lain, penurunan paling kecil terlihat pada kasus perdagangan orang dan penganiayaan, yang masing-masing turun sebesar 0,01 persen. Namun, berbeda dengan tren penurunan ini, kasus pencurian justru mengalami peningkatan yang signifikan dari 26,50 persen pada tahun 2021 menjadi 29,92 persen pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya tantangan baru yang perlu dihadapi, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan keamanan, atau faktor sosial lainnya yang mempengaruhi perilaku kriminal. Meskipun tren penurunan pada jenis kejahatan lainnya menunjukkan perkembangan yang positif, tetap diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan atau memperkuat penurunan ini di masa mendatang.

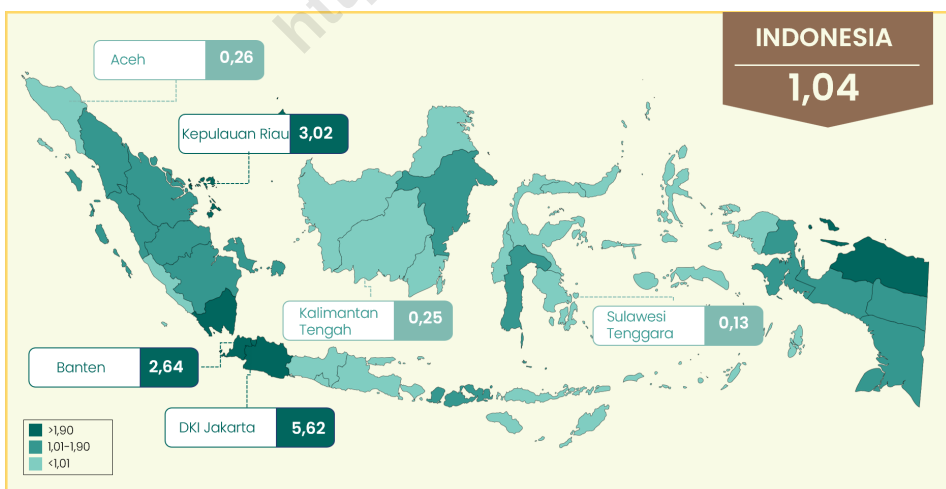
Gambar 2.26 menampilkan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pembunuhan pada tahun 2024, dengan membandingkan jumlah desa/kelurahan yang melaporkan kejadian tersebut terhadap total desa/kelurahan di setiap provinsi. Dari data yang ditunjukkan, persentase desa/kelurahan yang mencatat kejadian pembunuhan selama tahun 2021 berada di kisaran 0,18 persen hingga 1,87 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi kejadian pembunuhan adalah DKI Jakarta (1,87 persen), Papua Selatan (1,59 persen), dan Papua Tengah (1,57 persen). Sebaliknya, tiga provinsi dengan persentase terendah adalah Aceh (0,18 persen), Kalimantan Utara (0,21 persen), dan Bali (0,28 persen).



Sumber: Podes 2024

Gambar 2.26 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

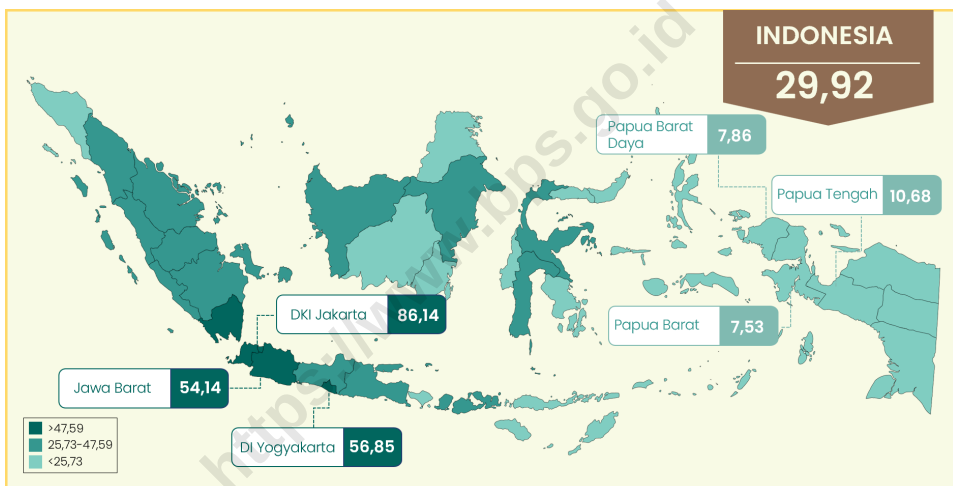
Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan pencurian dengan kekerasan sepanjang tahun 2024 di 38 provinsi bervariasi antara 0,13 persen hingga 5,62 persen (Gambar 2.27). Tiga provinsi dengan persentase tertinggi untuk kasus pencurian dengan kekerasan adalah DKI Jakarta (5,62 persen), Kepulauan Riau (3,02 persen), dan Banten (2,64 persen). Sebaliknya, provinsi dengan persentase terendah dalam kejahatan ini adalah Sulawesi Tenggara (0,13 persen), Kalimantan Tengah (0,25 persen), dan Aceh (0,26 persen).



Sumber: Podes 2024

Gambar 2.27 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

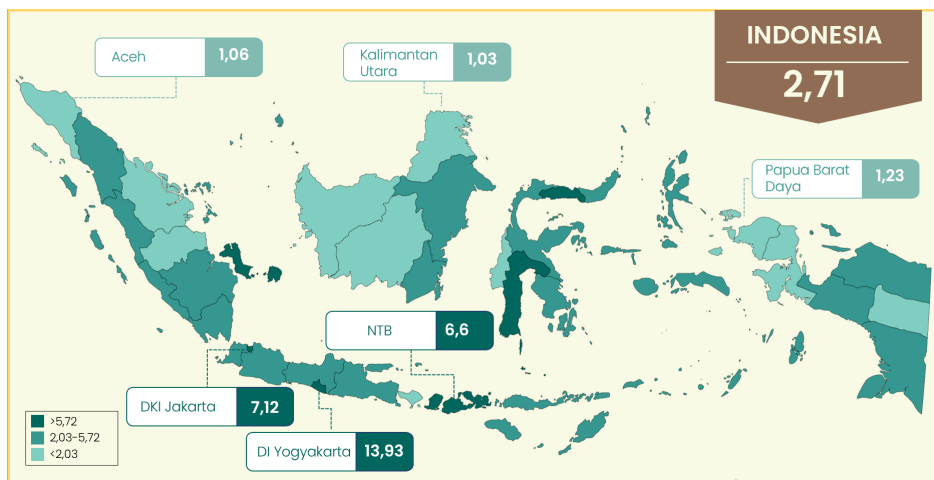
Kejahatan pencurian tanpa kekerasan merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi di desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Berdasarkan analisis tingkat provinsi yang ditampilkan pada Gambar 2.28, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan ini selama tahun 2024 menunjukkan variasi yang cukup signifikan, dengan rentang antara 7,53 persen hingga 86,14 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi dalam kasus pencurian tanpa kekerasan adalah DKI Jakarta (86,14 persen), DI Yogyakarta (56,85 persen), dan Jawa Barat (54,14 persen). Sebaliknya, provinsi dengan persentase terendah secara berurutan adalah Papua Barat (7,53 persen), Papua Barat Daya (7,86 persen), dan Papua Tengah (10,68 persen).



Sumber: Podes 2024

Gambar 2.28 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

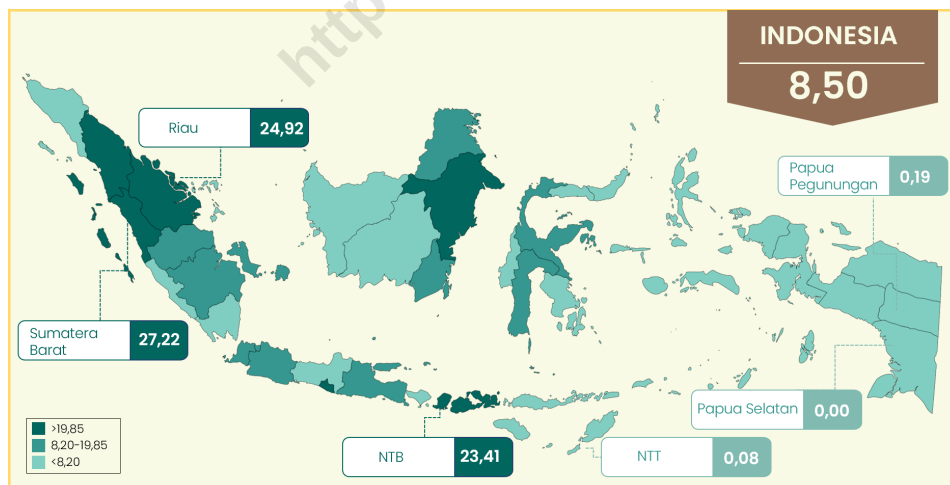
Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian penganiayaan selama tahun 2024 bervariasi antara 1,03 persen hingga 13,93 persen dari total desa/kelurahan di tiap provinsi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.29. Tiga provinsi dengan persentase tertinggi untuk kejahatan penganiayaan adalah DI Yogyakarta (13,93 persen), DKI Jakarta (7,12 persen), dan Nusa Tenggara Barat (6,60 persen). Sebaliknya, tiga provinsi terendah secara berurutan adalah Kalimantan Utara (1,03 persen), Aceh (1,06 persen), dan Papua Barat Daya (1,23 persen).



Sumber: Podes 2024

Gambar 2.29 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah meluas ke berbagai desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan narkoba bervariasi antara 0 persen hingga 27,22 persen di setiap provinsi (Gambar 2.30). Rentang persentase yang cukup signifikan ini menunjukkan perbedaan besar dalam tingkat penyebaran dan keseriusan masalah narkoba di berbagai wilayah.



Sumber: Podes 2024

Gambar 2.30 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

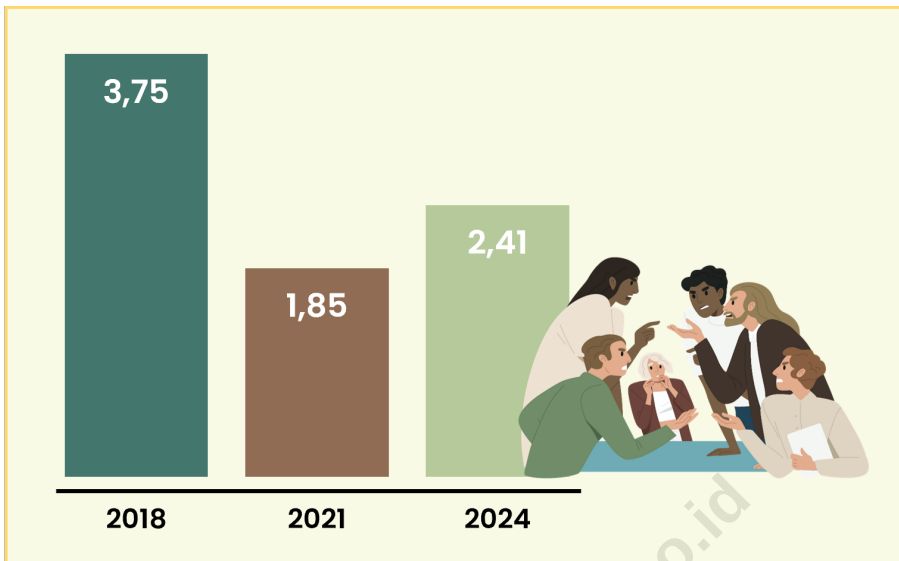
Tiga provinsi dengan persentase kejadian penyalahgunaan dan peredaran narkoba tertinggi secara berurutan adalah Sumatera Barat (27,22 persen), Riau (24,92 persen), dan Nusa Tenggara Barat (23,41 persen). Persentase yang tinggi di provinsi-provinsi ini mencerminkan tantangan serius yang dihadapi dalam mengendalikan peredaran narkoba, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Sebaliknya, tiga provinsi dengan persentase terendah secara berurutan adalah Papua Selatan (0 persen), Nusa Tenggara Timur (0,08 persen), dan Papua Pegunungan (0,19 persen), yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih terpencil dan akses yang lebih terbatas terhadap jalur peredaran narkoba.

2.15 Perkelahian Massal

Bagian ini menguraikan fenomena perkelahian massal yang terjadi di Indonesia serta tren perkembangannya. Fokus utama analisis mencakup jenis kejadian perkelahian massal dan cakupan wilayah yang terdampak, serta tindakan yang telah diambil untuk menangani masalah ini. Selain dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal juga dianggap sebagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pasal 170 dan 358, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani tindak pidana ini, memastikan proses penyelesaian yang sesuai dengan hukum.

Konflik dapat didefinisikan sebagai interaksi antara dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan bertentangan, baik itu individu atau kelompok (Fisher, 2000 dalam Gamayanti dan Nulhaqim, 2019). Ketika konflik mencapai puncaknya, dapat muncul kekerasan yang melibatkan perkelahian massal, yang berpotensi merugikan berbagai pihak. Perluasan konflik seperti ini memerlukan penanganan yang serius untuk mencegah dampak lebih lanjut dan memastikan penyelesaiannya secara damai.

Dalam pembahasan terkait konflik massal, data utama yang digunakan berasal dari data yang berbasis kewilayahan, yaitu Statistik Potensi Desa (Podes). Pengumpulan data ini mencakup seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebagai unit observasi. Oleh karena itu, analisis perkelahian massal dalam bagian ini berfokus pada cakupan atau persentase desa/kelurahan yang menjadi lokasi terjadinya konflik. Pendekatan berbasis kewilayahan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai distribusi dan sebaran perkelahian massal di seluruh Indonesia, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang pola geografis kejadian konflik tersebut.



Sumber: Podes 2018, 2021, dan 2024

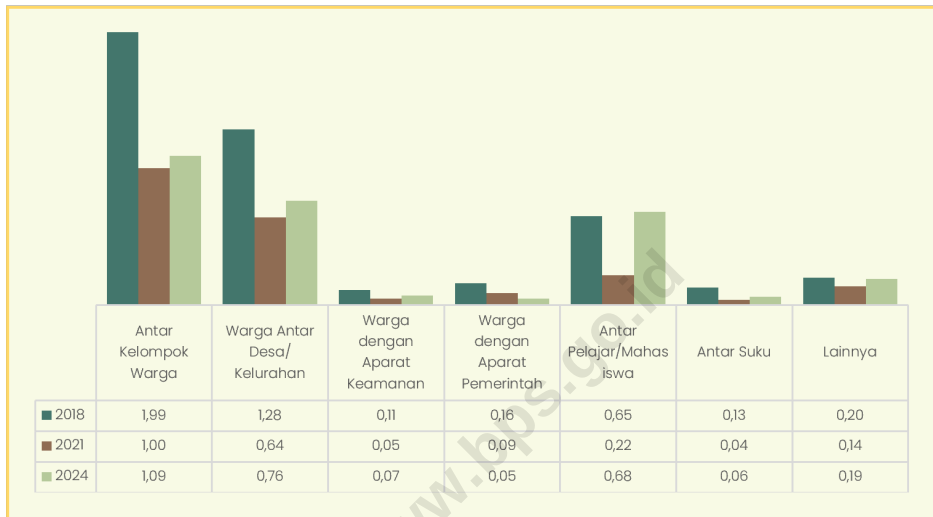
Gambar 2.31 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2018, 2021, dan 2024

Dari hasil Podes Tahun 2018, 2021, dan 2024 terlihat adanya fluktuasi dalam persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal (Gambar 2.31). Pada tahun 2018, sebanyak 3,75 persen desa/kelurahan mengalami perkelahian massal, turun menjadi 1,85 persen pada tahun 2021, tetapi naik kembali menjadi 2,41 persen pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan dinamika perubahan dalam intensitas perkelahian massal di Indonesia, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keberhasilan program-program keamanan dan penegakan hukum yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir.

Jenis-jenis perkelahian massal yang dikumpulkan melalui pendataan Podes mencakup berbagai bentuk konflik, antara lain perkelahian antarkelompok warga, antarwarga dari desa/kelurahan berbeda, konflik yang melibatkan warga dengan aparat keamanan, warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antarpelajar, serta konflik antarsuku. Perkelahian massal ini terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir dan dipicu oleh berbagai faktor, seperti saling ejek, kesalahpahaman, perilaku kenakalan remaja, dendam lama, maupun sebab-sebab lainnya. Perlu dicatat, perkelahian yang tercatat dalam Podes adalah kejadian yang terjadi di desa/kelurahan tertentu, meskipun pelaku dan korban bisa berasal dari luar wilayah tersebut.

Hasil pendataan Podes 2024 menunjukkan bahwa perkelahian antarkelompok warga menjadi jenis perkelahian massal yang paling umum terjadi, disusul oleh perkelahian antarwarga dari desa/kelurahan berbeda.

Pada tahun 2019, persentase desa/kelurahan yang terlibat dalam perkelahian antarkelompok mencapai 1,99 persen, turun menjadi 1,00 persen pada tahun 2021, tetapi kembali naik menjadi 1,09 persen pada tahun 2024 (Gambar 2.32). Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika yang mempengaruhi intensitas dan frekuensi perkelahian antarkelompok warga selama periode yang diamati.



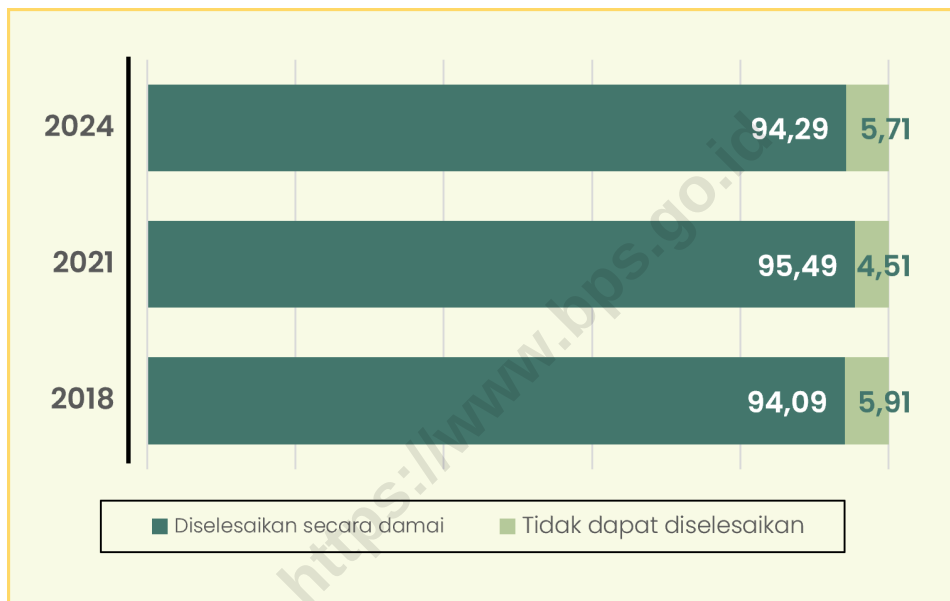
Sumber: Podes 2018, 2021, dan 2024

Gambar 2.32 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2018, 2021, dan 2024

Konflik dalam masyarakat memiliki dampak ganda, baik positif maupun negatif. Dampak positif dapat muncul ketika konflik dikelola secara konstruktif, seperti dalam kasus ketika konflik memicu perubahan pola pikir atau sikap masyarakat menuju arah yang lebih baik (Elcheroth et al., 2019; Gamayanti & Nulhaqim, 2019). Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi pendorong transformasi sosial yang positif. Namun, dampak negatif lebih sering terjadi, terutama ketika konflik berujung pada kekerasan dan kerusakan harta benda, yang dapat memicu disintegrasi sosial (Hegre et al., 2019). Meskipun konflik dapat membawa peluang untuk perubahan positif, risiko perpecahan masyarakat tetap tinggi.

Sebagai tanggapan terhadap konflik yang mengancam stabilitas nasional, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-undang ini menegaskan peran aktif pemerintah dalam menyelesaikan konflik melalui langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian yang mengutamakan keamanan dan kestabilan nasional. Regulasi ini dirancang untuk mengurangi dampak negatif konflik dan mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis.

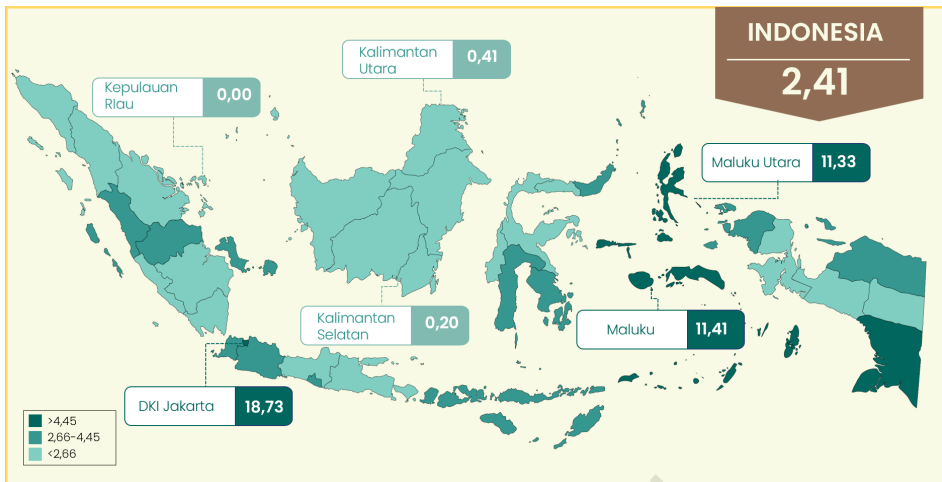
Dalam menangani konflik, terdapat beberapa strategi efektif yang dapat diterapkan termasuk pendekatan konsistensi damai dan mediasi. Pendekatan konsistensi damai mengutamakan solusi yang tidak merugikan salah satu pihak dan berlandaskan prinsip-prinsip perdamaian yang konsisten. Mediasi, di sisi lain, menjadi strategi penting ketika konflik menemui kebuntuan, dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara yang netral dan objektif (Gurr dalam Soetopo, 2001). Kedua strategi ini tidak hanya memastikan penyelesaian yang adil, tetapi juga membuka peluang untuk penyelesaian konflik yang berkelanjutan.



Sumber: Podes 2018, 2021, dan 2024

Gambar 2.33 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2018, 2021, dan 2024

Data persentase penyelesaian kasus perkelahian massal selama periode 2018 hingga 2024 yang ditunjukkan pada Gambar 2.33 memperlihatkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2018, persentase penyelesaian kasus perkelahian massal tercatat sebesar 94,09 persen. Angka ini meningkat menjadi 95,49 persen pada tahun 2021, tetapi kemudian sedikit menurun menjadi 94,29 persen pada tahun 2024. Hal tersebut dapat menjadi tanda adanya tantangan yang perlu dihadapi untuk mempertahankan tren penyelesaian kasus agar tetap meningkat. Di sisi lain, masih ada sekitar 5,71 persen desa/kelurahan yang belum mampu menyelesaikan kasus perkelahian massal pada tahun 2024. Kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dapat menjadi salah satu kunci penting untuk meningkatkan penyelesaian kasus di desa/kelurahan mereka.



Sumber: Podes 2024

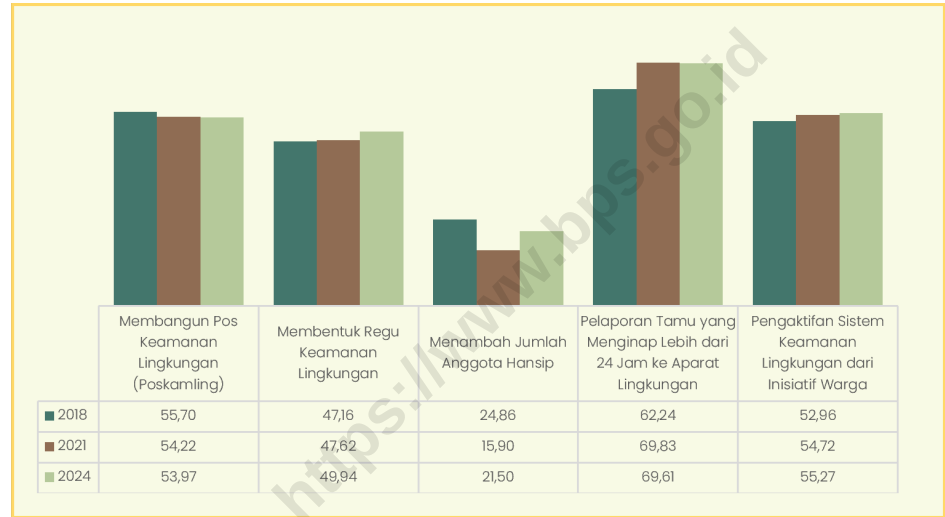
Gambar 2.34 Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2024

Provinsi DKI Jakarta (18,73 persen), Maluku (11,41 persen), dan Maluku Utara (11,33 persen) menjadi tiga provinsi dengan persentase tertinggi perkelahian massal di desa/kelurahan pada tahun 2024. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau tercatat tidak mengalami perkelahian massal sama sekali, dengan angka nol persen, diikuti oleh Kalimantan Selatan dengan 0,20 persen dan Kalimantan Utara dengan 0,41 persen (Gambar 2.34). Perbedaan ini menyoroti adanya ketidaksetaraan yang signifikan antarprovinsi dalam hal intensitas dan frekuensi konflik massal. Variasi ini bisa disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan pola interaksi masyarakat di masing-masing wilayah.

2.16 Upaya Menjaga Keamanan

Di lingkungan desa/kelurahan, struktur lingkungan seperti dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka sering kali menyelenggarakan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) untuk menangani gangguan kamtibmas seperti pencurian dan pencurian kendaraan bermotor. Bagian ini membahas partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya, terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, berdasarkan data dari Statistik Potensi Desa (Podes).

Menurut data Podes 2024, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam kepada aparat setempat menjadi langkah paling umum yang diambil masyarakat untuk menjaga keamanan, dengan persentase 69,61 persen. Partisipasi warga dalam mengaktifkan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga tercatat sebesar 55,27 persen, dan pembangunan pos keamanan lingkungan (poskamling) serta penambahan anggota Pertahanan Sipil atau Perlindungan Masyarakat (Hansip/Linmas) juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Podes 2021, yaitu sebesar 21,50 persen. Hal ini dapat mencerminkan komitmen kuat masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama melalui inisiatif yang melibatkan partisipasi aktif warga.



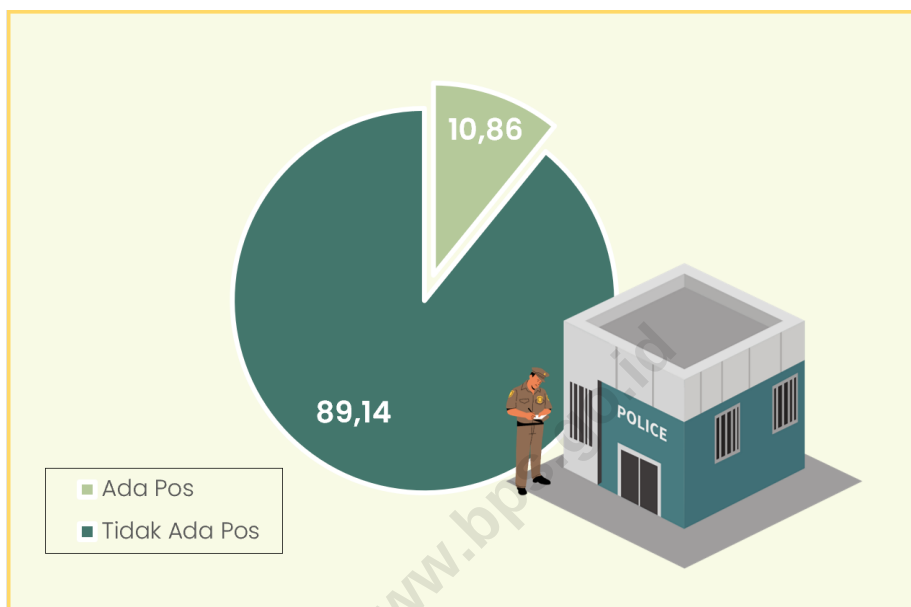
Sumber: Podes 2018, 2021, dan 2024

Gambar 2.35 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018, 2021, dan 2024

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) memang merupakan tanggung jawab utama kepolisian, khususnya melalui unit terkecilnya, yaitu pos polisi. Dalam konteks Pendataan Podes, data mengenai persentase desa/kelurahan yang memiliki pos polisi digunakan untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang kehadiran aparat kepolisian di wilayah lokal. Pos polisi berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor (Polsek) untuk menangani isu Kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Pos polisi memiliki fungsi utama dalam melakukan analisis serta pengawasan terhadap potensi gangguan keamanan di wilayahnya. Sebagai bagian dari upaya preventif, pos polisi bertindak sebagai titik awal untuk mengidentifikasi masalah keamanan yang bisa timbul, sehingga memungkinkan

adanya tindakan cepat sebelum masalah berkembang menjadi lebih jauh. Adanya pos polisi di tingkat desa atau kelurahan sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan lokal dan mengurangi tingkat kejahatan di area tersebut.

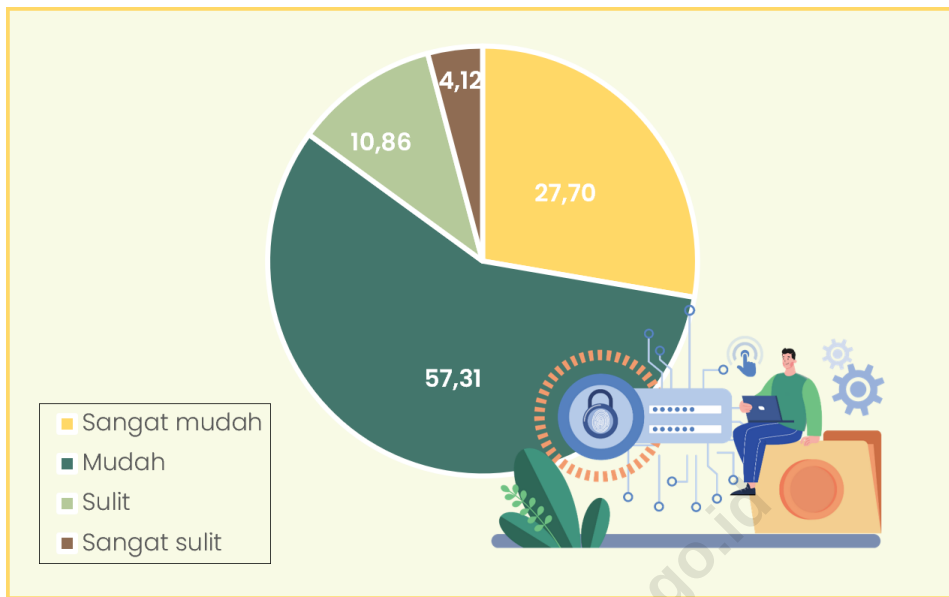


Sumber: Podes 2024

Gambar 2.36 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2024

Gambar 2.36 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hanya sekitar 10,86 persen desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki pos polisi, yang meliputi Polsek, Polres, dan Polda di wilayah mereka. Ini mencerminkan keterbatasan infrastruktur keamanan formal di tingkat desa, yang pada satu sisi dapat dianggap sebagai tantangan dalam menjaga keamanan di wilayah yang terpencil.

Namun, meskipun sebagian besar desa/kelurahan (89,14 persen) tidak memiliki pos polisi, persepsi aksesibilitas terhadap pos polisi terdekat tetap menunjukkan optimisme. Dari data yang ditampilkan pada Gambar 2.37, sekitar 27,70 persen desa/kelurahan yang tidak memiliki pos polisi menyatakan bahwa akses ke pos polisi terdekat sangat mudah, dan 57,31 persen menilai aksesnya mudah. Ini menunjukkan bahwa meskipun keberadaan pos polisi fisik terbatas, aksesibilitas yang baik terhadap fasilitas kepolisian tetap terjamin, membantu masyarakat merasa aman dan terlindungi.



Sumber: Podes 2024

Gambar 2.37 Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2024

03

KORBAN KEJAHATAN



93,39%

penduduk dewasa menjadi korban kejahatan pada tahun 2023

63,17%

penduduk korban kejahatan pada tahun 2023 berjenis kelamin laki-laki

ICE LINE - DO NOT CROSS

POLICE

POLICE

T CROSS

POLICE

0,45%

penduduk Indonesia menjadi korban kejahatan pada tahun 2023

23,36%

korban kejahatan melaporkan kejahatan yang dialaminya ke polisi pada tahun 2023





BAB III

KORBAN KEJAHATAN

3.1 Penduduk Korban Kejahatan

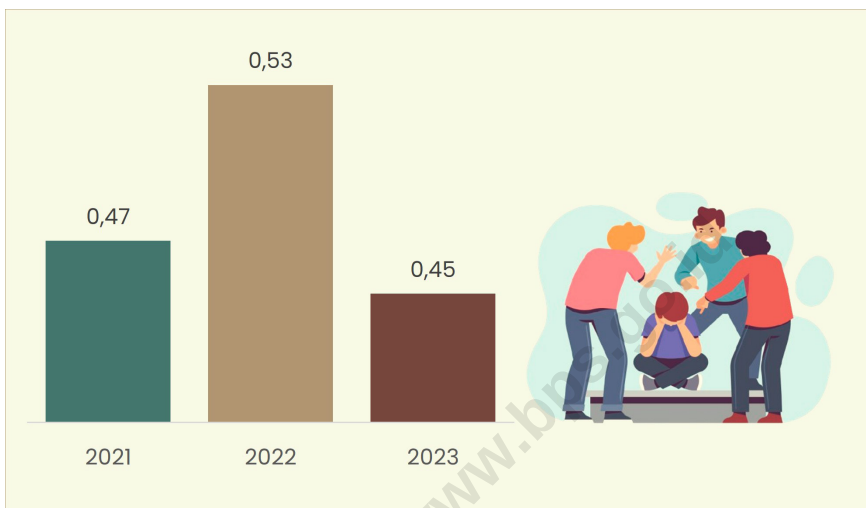
Korban kejahatan didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang mengalami kerugian fisik, mental, emosional, atau ekonomi akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana, baik berdasarkan hukum nasional maupun norma internasional yang diakui terkait hak asasi manusia (*United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime*, 1985). Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam satu tahun terakhir dirinya atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan lainnya (penculikan, pemerasan, dan sebagainya).

Korban kejahatan yang dibahas dalam bagian ini, baik jumlah maupun karakteristiknya diperoleh dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni pada Blok IX tentang Keterangan Bepergian dan Korban Kejahatan. Kejadian kejahatan yang tercakup dalam Susenas adalah kejadian yang dialami responden pada kurun waktu satu tahun sebelum survei. Dengan demikian, Susenas 2022 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2021, Susenas 2023 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2022, dan Susenas 2024 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari

sampai 31 Desember 2023.

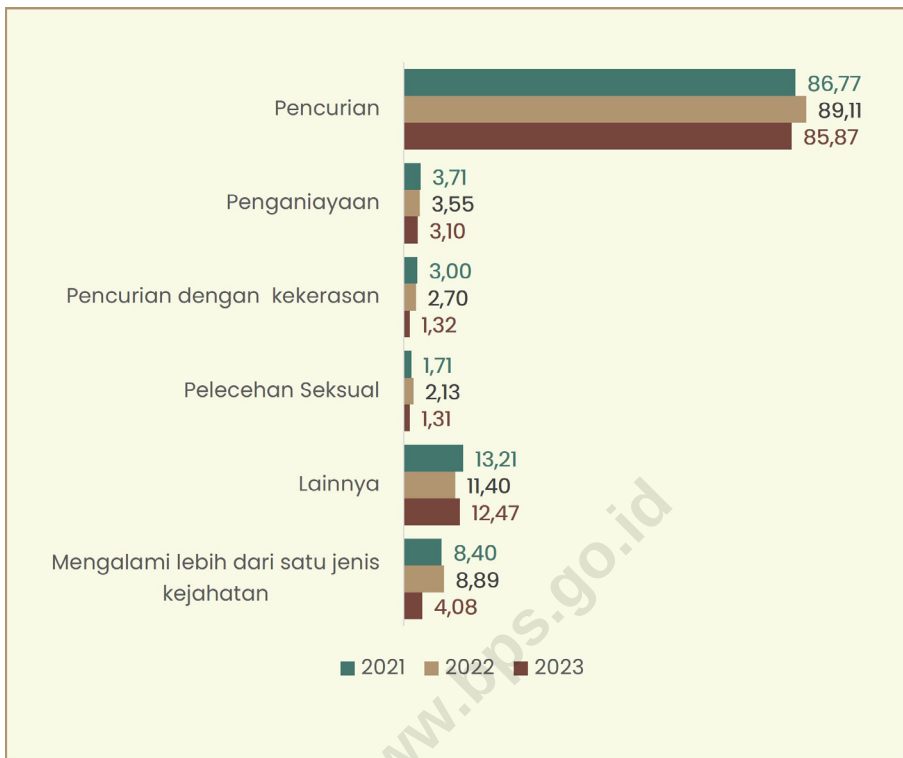
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, persentase korban kejahatan di Indonesia mengalami fluktuasi (Gambar 3.1). Persentase korban kejahatan sempat mengalami peningkatan dari 0,47 persen pada tahun 2021 menjadi 0,53 persen pada tahun 2022, namun persentase ini kembali menurun menjadi 0,45 persen pada tahun 2023.



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2022-2024

Gambar 3.1 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2021-2023

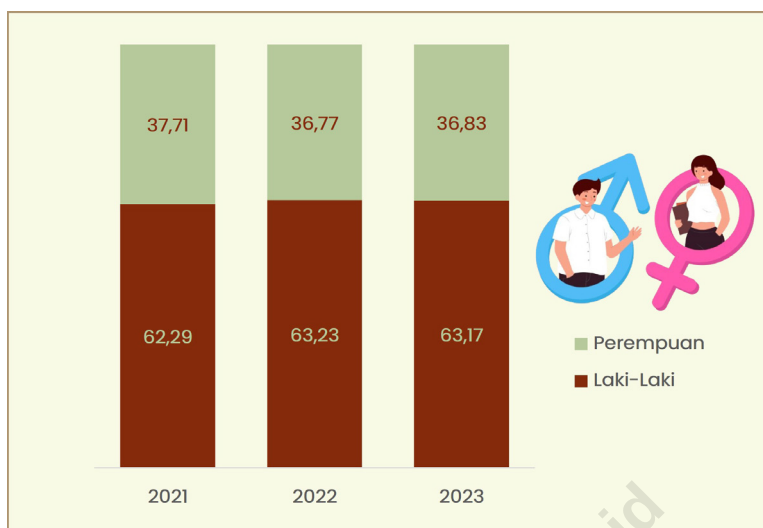
Jenis kejahatan yang paling umum dialami oleh penduduk adalah pencurian. Persentase korban kejahatan pencurian terhadap total penduduk korban kejahatan mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 penduduk korban kejahatan pencurian sebesar 86,77 persen. Persentase ini mengalami peningkatan menjadi 89,11 pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 85,87 persen. Sementara itu, persentase korban kejahatan terendah terdapat pada jenis kejahatan pelecehan seksual. Korban kejahatan pelecehan seksual sempat meningkat dari 1,71 persen pada tahun 2021 menjadi 2,13 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase korban kejahatan mengalami penurunan menjadi 1,31 persen. Di sisi lain, masih terdapat 4,86 persen penduduk yang mengalami lebih dari satu jenis kejahatan pada tahun 2023. Persentase ini mengalami penurunan sebesar 4,03 persen dibandingkan tahun 2022 (Gambar 3.2).



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2022–2024

Gambar 3.2 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2021–2023

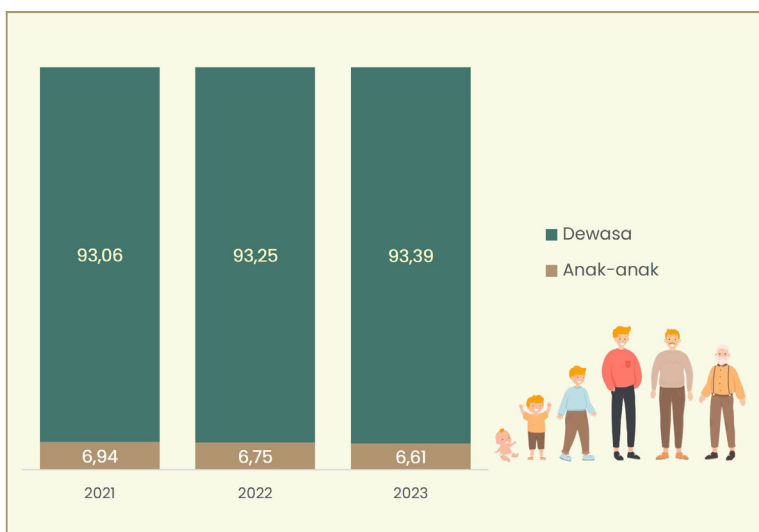
Karakteristik korban kejahatan di Indonesia dapat dianalisis berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umurnya. Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin disajikan pada Gambar 3.3. Selama periode 2021–2023, mayoritas korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen. Meskipun persentase korban perempuan selalu lebih rendah, perlu dicermati bahwa nilainya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Persentase korban kejahatan perempuan sempat mengalami penurunan dari 37,71 persen pada tahun 2021 menjadi 36,77 persen pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 36,83 persen pada tahun 2023.



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2022-2024

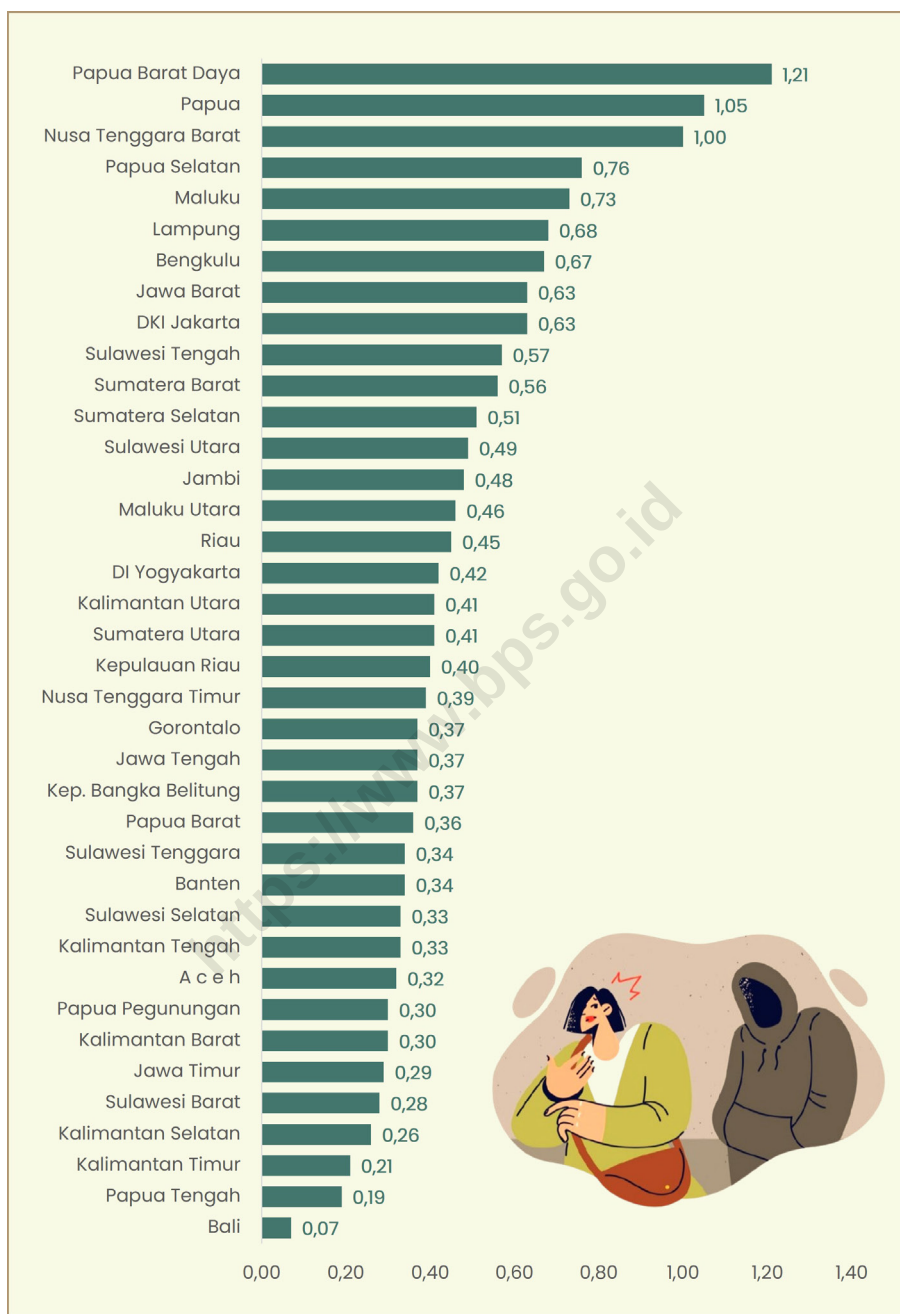
Gambar 3.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2021-2023

Berdasarkan kelompok umurnya, lebih dari 90 persen penduduk yang menjadi korban kejahatan berasal dari kelompok umur dewasa. Selama periode 2021-2023, persentase penduduk korban kejahatan yang berasal dari kelompok umur dewasa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di sisi lain, persentase penduduk korban kejahatan pada kelompok umur anak-anak mengalami penurunan dari 6,94 persen pada tahun 2021 menjadi 6,75 persen pada tahun 2022. Persentase ini kembali menurun menjadi 6,61 persen pada tahun 2023 (Gambar 3.4).



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2022-2024

Gambar 3.4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2021-2023

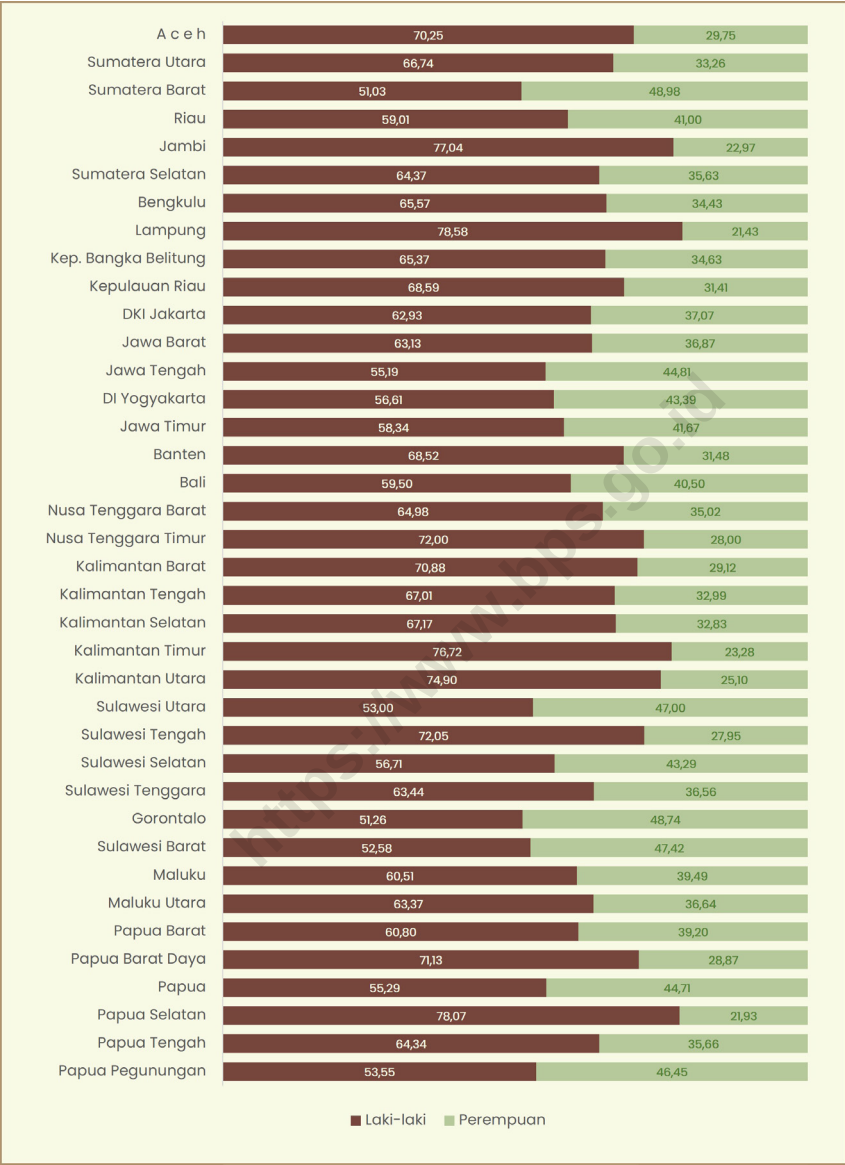


Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2024

Gambar 3.5 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2023

Berdasarkan Gambar 3.5, Provinsi Bali memiliki persentase penduduk korban kejahatan terendah pada tahun 2023 (0,07 Persen), disusul oleh Provinsi Papua Tengah (0,19 persen) dan Provinsi Kalimantan Timur (0,21 persen).

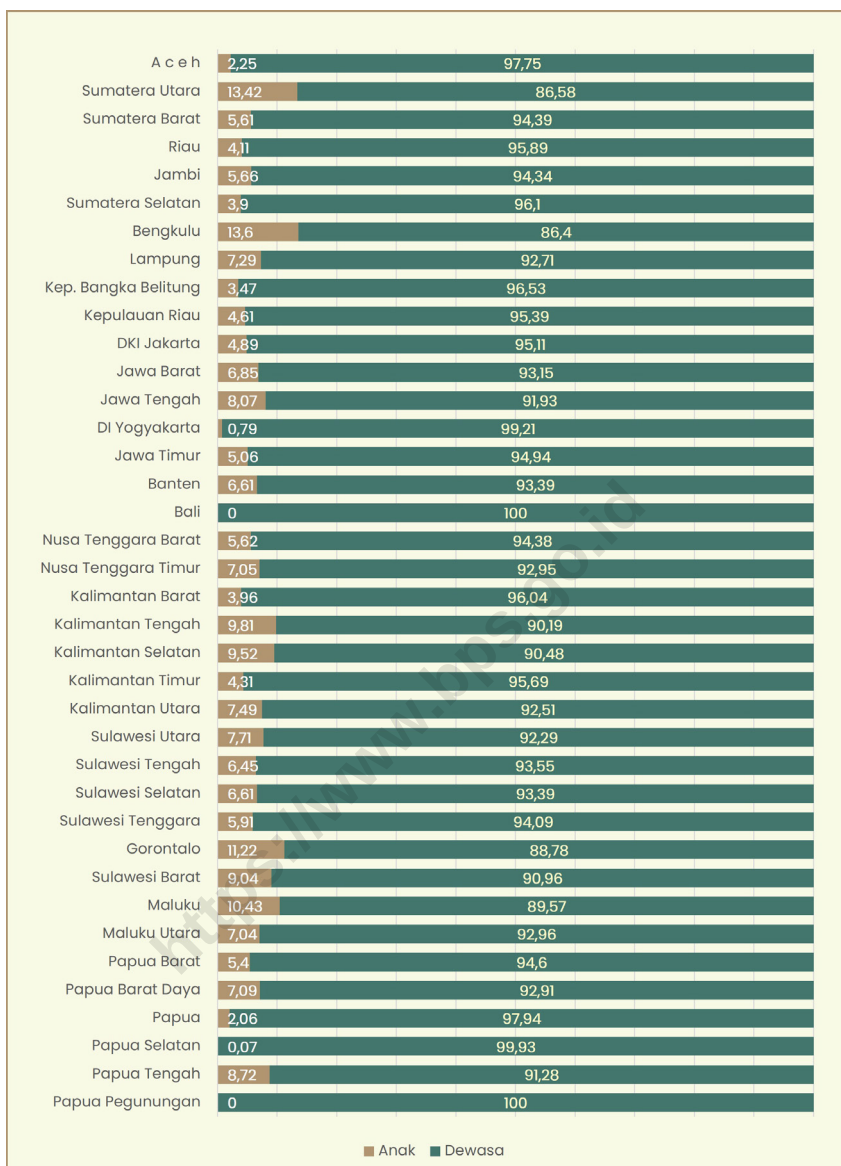
Sementara itu, Provinsi Papua Barat Daya memiliki persentase penduduk korban kejahatan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1,21 persen.



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2024

Gambar 3.6 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi, 2023

Di seluruh provinsi, persentase laki-laki yang menjadi korban kejahatan lebih banyak dibandingkan perempuan (Gambar 3.6). Pada tahun 2023, persentase penduduk korban kejahatan yang berjenis kelamin perempuan terbesar berturut-turut adalah Provinsi Sumatera Barat (48,97 persen), Provinsi Gorontalo (48,74 persen), dan Provinsi Sulawesi Barat (47,42 persen).



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2024

Gambar 3.7 Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2023

Komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua provinsi menunjukkan bahwa persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan lebih kecil dibandingkan penduduk dewasa (Gambar 3.7). Pada tahun 2023, masih terdapat empat provinsi dengan persentase penduduk korban kejahatan pada kelompok umur anak-anak di atas sepuluh persen, meliputi Provinsi Bengkulu (13,60 persen), Provinsi Sumatera

Utara (13,42 persen), Provinsi Gorontalo (11,22 persen), dan Provinsi Maluku (10,43 persen).

3.2 Tingkat Pelaporan

Pelaporan kepada polisi tidak harus dilakukan oleh orang yang menjadi korban. Berdasarkan KUHP Pasal 108 ayat 1, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/ atau penyidik, baik lisan maupun tertulis.



Korban kejahatan berhak mendapatkan akses terhadap keadilan dengan melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada polisi

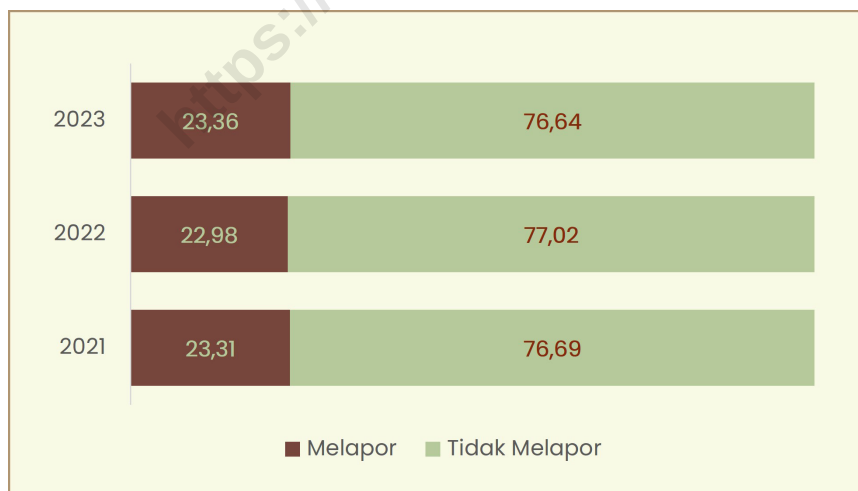
Pelaporan atau pengaduan ini merupakan salah satu upaya agar hak atas rasa adil bisa diperoleh. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil.”

Pada tanggal 29 November 1985, Majelis Umum PBB mengadopsi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang di dalamnya menegaskan bahwa korban berhak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dan mendapatkan ganti rugi segera atas kerugian yang mereka derita. Lebih lanjut, *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention/ UNODCCP* (sekarang menjadi *United Nations Office on Drugs and Crime/UNODC*) mengeluarkan *Handbook on Justice for Victims* sebagai pedoman pelaksanaan program bantuan korban sebagai

wujud pemenuhan hak korban untuk mendapatkan akses terhadap keadilan dengan membantu korban dalam menghadapi trauma, berpartisipasi dalam proses peradilan pidana, mendapatkan ganti rugi, dan mengatasi masalah lainnya terkait dengan viktimisasi.

Tersedianya indikator tingkat pelaporan kepada polisi dapat digunakan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang. Untuk delik aduan, jika pihak yang berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan mengenai terjadinya korban kejahatan, maka tindakan penyelidikan dan pengadilan tidak dapat dilakukan. Selain itu, indikator ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dialami.

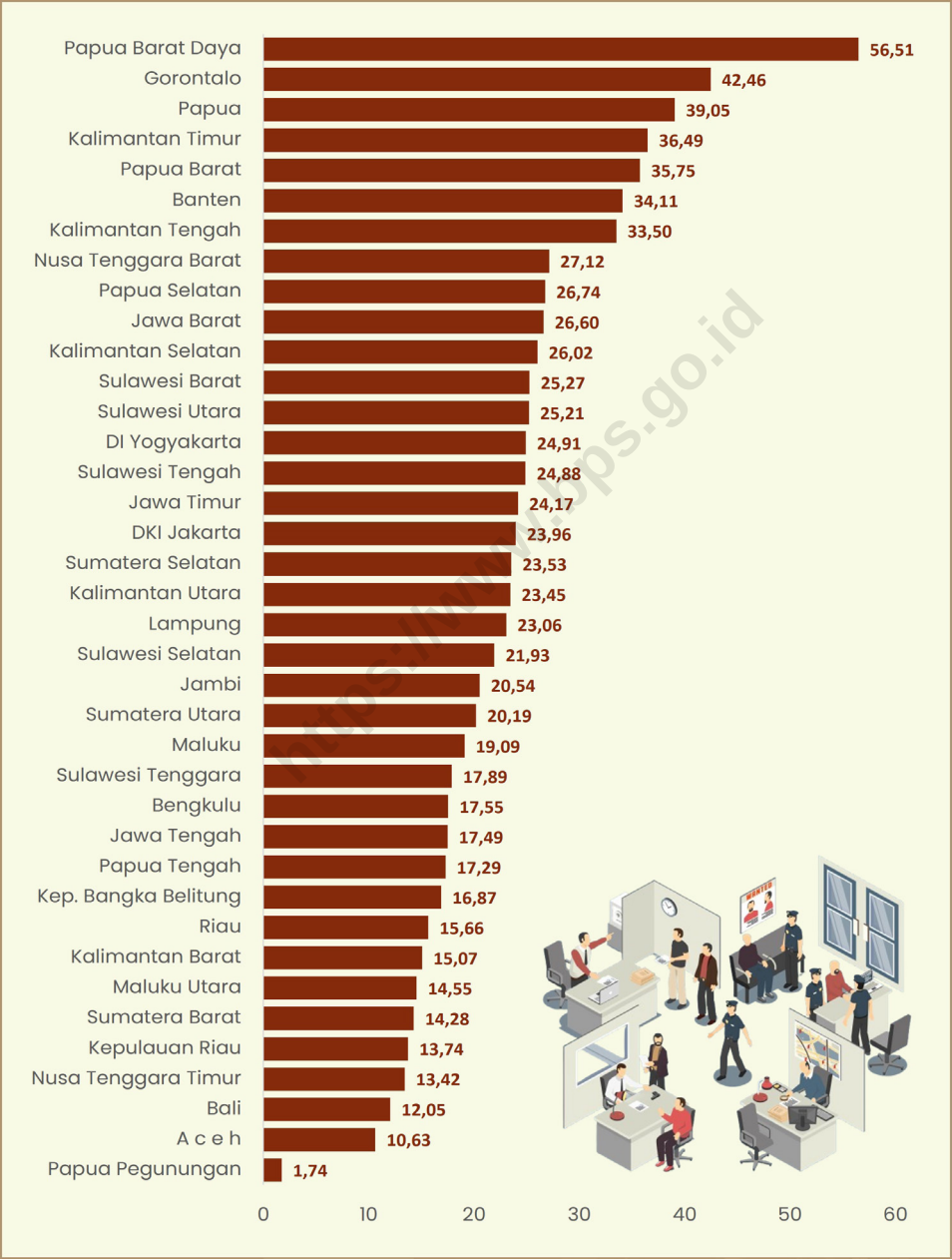
Data Susenas menunjukkan tingkat pelaporan ke polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2021–2023, persentase penduduk Indonesia yang mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkannya ke polisi tidak lebih dari 25 persen (Gambar 3.8). Pada tahun 2021 persentasenya sebesar 23,31 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 22,98 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, persentase penduduk korban kejahatan yang melapor ke polisi sedikit mengalami peningkatan menjadi 23,36 persen.



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2022–2024

Gambar 3.8 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2021–2023

Dilihat dari wilayahnya, persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi pada tahun 2023 paling banyak terdapat pada Provinsi Papua Barat dengan 56,51 persen, disusul oleh Provinsi Gorontalo dengan 42,46 persen dan Provinsi Papua dengan 39,05 persen (Gambar 3.9).



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2024

Gambar 3.9 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Berdasarkan Provinsi, 2023

Rendahnya tingkat pelaporan masyarakat yang mengalami kejahatan menyebabkan data registrasi polisi masih belum dapat menggambarkan keseluruhan kejadian yang dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, angka gelap kejahatan (*dark number of crimes*) secara umum masih relatif tinggi.

<https://www.bps.go.id>

04

INDIKATOR SDGS TERKAIT KEAMANAN



0,02%

penduduk menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir

16.1.3.(a)



16.3.1.(a)

48,88%

penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dan melaporkan ke polisi



18,81%

pelaku usaha membayar melebihi ketentuan ketika mengakses layanan publik

16.5.2



BAB IV

INDIKATOR SDGS TERKAIT KEAMANAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rencana aksi global yang berlaku universal sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan layak dengan berlandaskan prinsip “*Leave No One Behind*”. SDGs menjadi agenda pembangunan global hingga 2030 yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015 menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs). Gagasan untuk menerapkan SDGs sebagai *framework* pembangunan berkelanjutan telah diperkuat saat *UN Conference on Sustainable Development* (Rio +20) pada tahun 2012 dengan dihasilkannya dokumen “*The Future We Want*” (*United Nations General Assembly*, 2012) yang menjadi dasar untuk menetapkan rumusan kerangka kebijakan dan pelaksanaan SDGs. Dokumen ini menggarisbawahi bahwa progres capaian tujuan perlu dimonitor melalui target dan indikator. Dalam pelaksanaannya, SDGs kemudian dituangkan ke dalam 17 tujuan dan 169 target yang menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi yang menjadi panduan bagi komunitas global selama 2016–2030 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan menegaskan bahwa tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan tidak akan ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan (United Nations, 2015). Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan mendukung terciptanya perdamaian, kesamaan akses terhadap hukum yang berlandaskan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang efektif berdasarkan *rule of law*. Sejalan dengan itu, tujuan 16 SDGs (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) hadir untuk mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, serta membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Secara umum, tujuan 16 SDGs ditargetkan untuk secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait di mana pun, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses

keadilan yang sama untuk semua, serta secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. Pada tujuan 16 ini, terdapat beberapa indikator terkait keamanan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam publikasi ini.

Tabel 4.1 Indikator SDGs Terkait Keamanan

Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
(1)	(2)	(3)
16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Republik Indonesia	Tahunan
16.1.3.(a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.1.4*. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial	Tiga Tahunan
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.1* Proporsi Penduduk yang Memiliki Paling Tidak Satu Kontak Hubungan dengan Petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.2* Proporsi pelaku bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta untuk menerima suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan

4.1 Target 16.1.1.(a). Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut, *Handbook on Governance Statistics* menjelaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak fundamental dan perlindungan efektif yang merupakan prasyarat untuk melindungi keselamatan dan keamanan seseorang sebagai pemegang hak. Sejalan dengan itu, pembunuhan sebagai kejahatan yang merampas hak hidup seseorang, dikategorikan sebagai bentuk kejahatan yang paling ekstrem dan memiliki tingkat keseriusan paling tinggi dalam *International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) dan KUHP. Ketersediaan indikator tentang jumlah kasus kejahatan pembunuhan menjadi suatu hal yang vital dalam mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat dari segi penjaminan terhadap hak hidup seseorang. Selain itu, indikator terkait jumlah kasus kejahatan pembunuhan juga menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

Berdasarkan buku metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia Edisi II Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola, kasus pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan, yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua-Kejahatan, Bab XIX tentang Kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian (Bappenas, 2023). Di Indonesia, jumlah kasus kejahatan pembunuhan ini digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur indikator 16.1.1 SDGs yang secara global diukur menggunakan jumlah korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk. Pada indikator 16.1.1.(a) ini, jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 1.129 kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia (Gambar 2.5), meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah kasus pembunuhan sebanyak 854 kasus.

4.2 Target 16.1.3.(a). Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir



Kejahatan kekerasan yang tercakup dalam indikator ini meliputi penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual

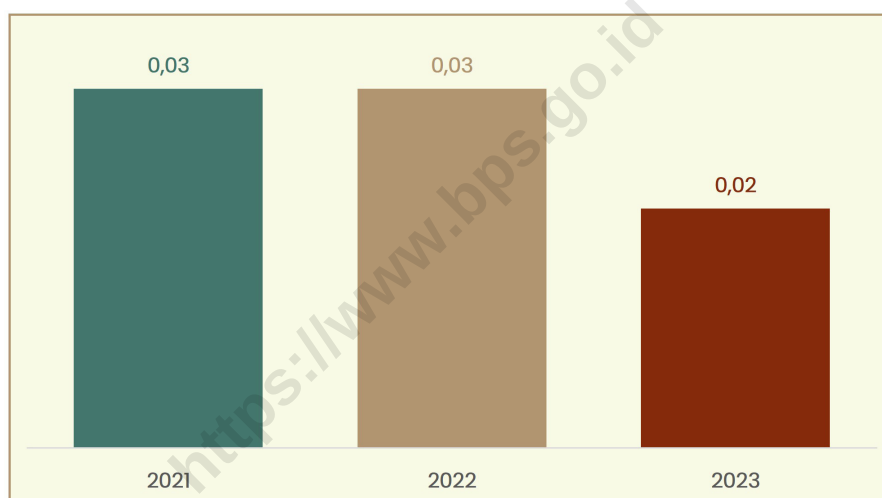
Berdasarkan buku metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia Edisi II Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola, korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Adapun kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya). Dalam konteks ini, cakupan kejahatan kekerasan yang dimaksud meliputi penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual.

Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia

dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.



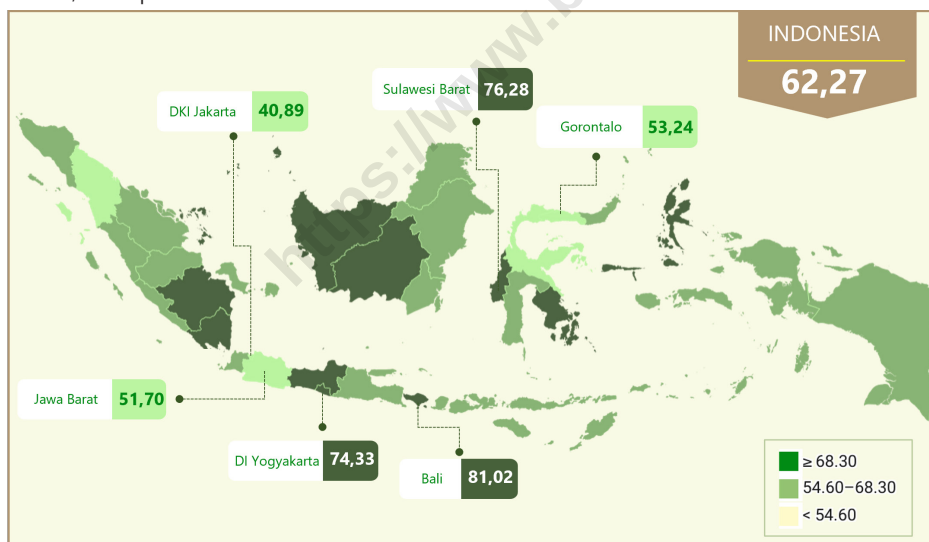
Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2019–2024

Gambar 4.1 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2021–2023

Indikator proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dihitung dari jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk kemudian dikali 100 persen. Selama tiga tahun terakhir, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan menunjukkan tren penurunan (Gambar 4.1). Pada tahun 2023, terdapat sekitar 0,02 persen penduduk di Indonesia yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Nilai ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, setelah sempat mengalami stagnansi pada tahun 2022 dan 2021 di angka 0,03 persen. Penurunan ini dapat menjadi indikasi awal bahwa terdapat peningkatan keamanan masyarakat berkaitan dengan kejahatan kekerasan dari tahun ke tahun.

4.3 Target 16.1.4*. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Secara internasional, *Universal Declaration of Human Rights* juga mendeklarasikan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup serta hak akan kemerdekaan dan keamanan pribadi. Mengingat hal tersebut, tidak mengherankan jika rasa aman menjadi kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki kebutuhan Maslow. Berdasarkan *Handbook on Governance Statistics*, hak atas rasa aman menyangkut keamanan dan perlindungan dari bahaya, baik terhadap fisik, pikiran, maupun mental.



Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial 2020

Gambar 4.2 Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

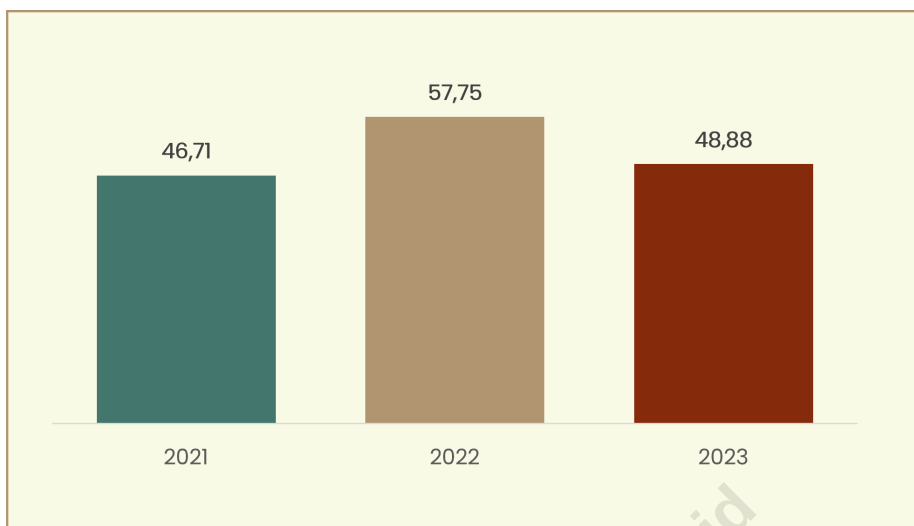
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari merupakan indikator 16.1.4* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dapat digunakan sebagai tolok ukur tingkat keamanan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya. Penekanan referensi waktu malam hari pada indikator ini menjadi penting mengingat suasana

gelap atau waktu malam hari dapat berpotensi memunculkan rasa khawatir atau ketakutan (Warr, 1990). Di Indonesia, indikator rasa aman ini diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun.

Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari adalah sebesar 62,27 persen pada level nasional (Gambar 4.2). Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan bahwa sekitar 62 persen masyarakat di Indonesia merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari. Apabila dilihat lebih rinci pada level provinsi, terdapat variasi dalam persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya pada malam hari. Selama periode 2020, Provinsi Bali menempati posisi tertinggi sebagai provinsi dengan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya pada malam hari (81,02 persen), diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (76,28 persen), dan Provinsi DI Yogyakarta (74,33 persen). Adapun provinsi dengan persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya pada malam hari yang terkecil adalah Provinsi DKI Jakarta (40,89 persen), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Gorontalo dengan persentase masing-masing adalah 51,70 persen dan 53,24 persen.

4.4 Target 16.3.1.(a). Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi

Ketersediaan data SDGs indikator 16.3.1.(a) ini dimaksudkan untuk melihat akses terhadap keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Untuk delik aduan, jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban, maka pihak berwenang tidak dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan pengadilan. Selain itu, indikator ini juga digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang, baik polisi maupun lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Peningkatan jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan. Peningkatan nilai indikator ini juga menunjukkan bahwa sistem pelaporan, kesadaran untuk melapor, serta kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.



Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2022-2024

Gambar 4.3 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2021-2023

Indikator proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dihitung dari jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100 persen. Selama periode 2021-2023, proporsi korban kejahatan kekerasan yang melaporkan kepada polisi sangat fluktuatif (Gambar 4.3). Pada tahun 2021, terdapat sekitar 46,71 korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi, kemudian meningkat cukup signifikan hingga mencapai sebesar 57,75 persen. Meskipun demikian, cukup disayangkan karena pada tahun 2023 justru terjadi penurunan persentase pelaporan dari korban kekerasan ke polisi menjadi 48,88 persen. Penurunan ini dapat menjadi catatan yang mengindikasikan adanya penurunan dari segi kesadaran dan kepercayaan korban kekerasan untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya kepada polisi.

4.5 Target 16.5.1.(a). Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

Korupsi merupakan permasalahan global yang berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentatnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi



IPAK mengukur budaya *zero tolerance* terhadap korupsi skala kecil, bukan korupsi skala besar

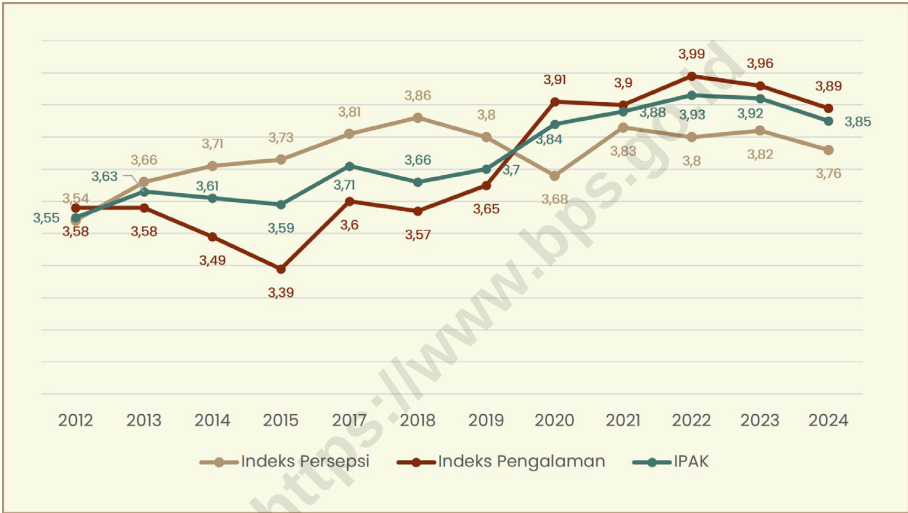
(Stranas PK), pemerintah berupaya menyusun arah kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Dalam pemenuhan tujuan global untuk mencapai sasaran global secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, korupsi juga menjadi sasaran nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak 2012 sampai dengan tahun 2024, kecuali tahun 2016. Pada tahun 2024, SPAK dilaksanakan di 186 kabupaten/kota yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Dengan jumlah sampel sebanyak 11.000 rumah tangga, estimasi hasil SPAK hanya dapat disajikan pada level nasional.

Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) bertujuan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

Dimensi penyusun IPAK terdiri dari Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat yang terdiri dari tiga subdimensi yaitu subdimensi persepsi keluarga, subdimensi persepsi komunitas, dan subdimensi

persepsi publik. Dimensi Pengalaman berupa pengalaman antikorupsi di masyarakat yang terdiri atas subdimensi pengalaman publik dan subdimensi pengalaman lainnya.

Nilai IPAK berada pada rentang 0 sampai 5. Nilai IPAK yang semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. IPAK cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai tahun 2024 (Gambar 4.4). IPAK 2024 bernilai sebesar 3,85, mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan IPAK 2023 (3,92).



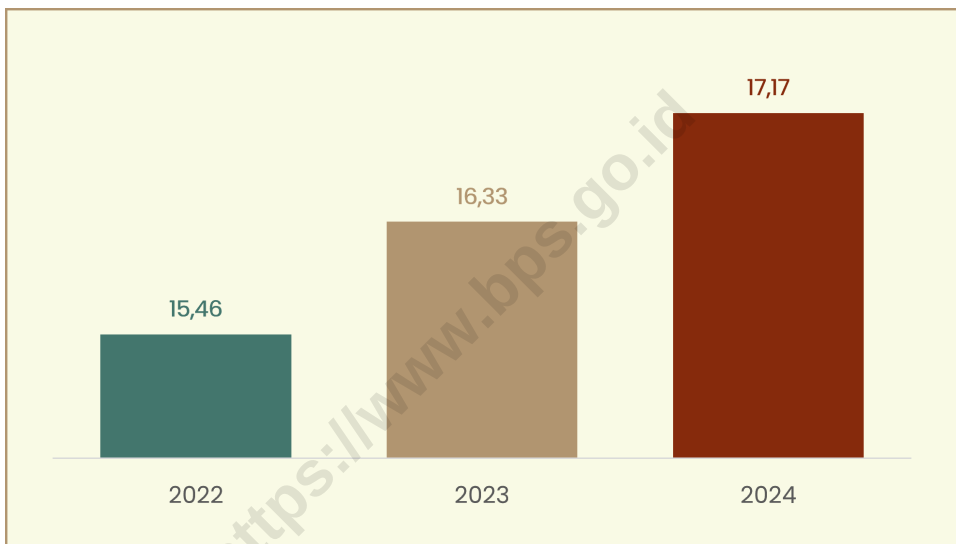
Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2012-2024

Gambar 4.4 Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), 2012-2024

4.6 Target 16.5.1*. Proporsi Penduduk yang Memiliki Paling Tidak Satu Kontak Hubungan dengan Petugas, yang Membayar Suap Kepada Petugas atau Diminta untuk Menyuiup Petugas Tersebut dalam 12 Bulan Terakhir

Pada tahun 2020, dilakukan penyesuaian pada Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) tahun 2020 yang salah satunya mencakup perbaikan dalam kuesioner. Dari perbaikan tersebut, dihasilkan dua indikator baru yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan indikator global pada SDGs tujuan 16, yaitu indikator 16.5.1* dan 16.5.2*. Untuk data SDGs indikator 16.5.1*, hasil SPAK menunjukkan bahwa

persentase masyarakat yang mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024 (Gambar 4.5). Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 15,46 persen masyarakat yang mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik. Nilai ini kemudian meningkat menjadi sebesar 16,33 persen pada tahun 2023 dan terus meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 17,17 persen. Tren peningkatan ini menjadi indikasi bahwa masyarakat semakin permisif terhadap perilaku antikorupsi, terutama dalam hal penyuapan (*bribery*).



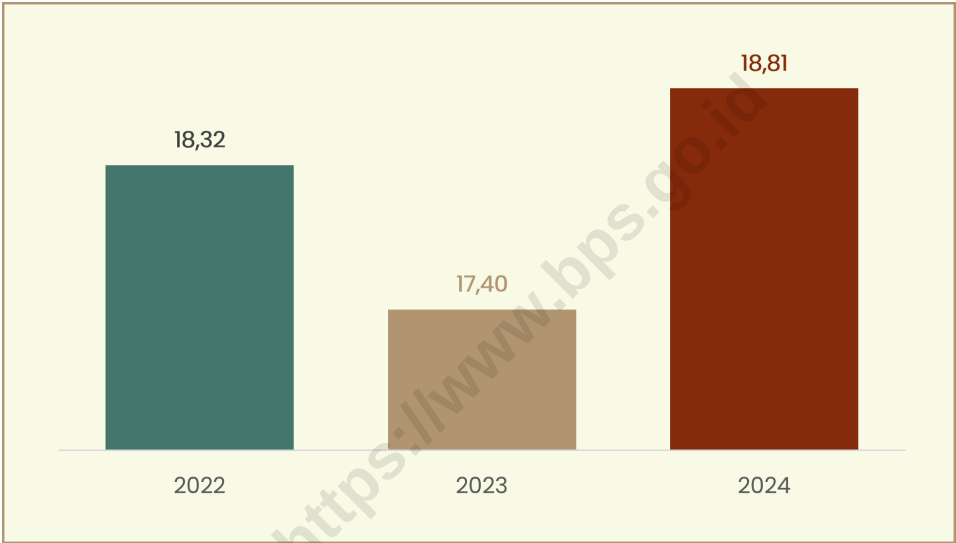
Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2022-2024

Gambar 4.5 Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2022 - 2024

4.7 Target 16.5.2*. Proporsi Pelaku Usaha yang Paling Tidak Memiliki Kontak dengan Petugas Pemerintah dan yang Membayar Suap kepada Seorang Petugas, atau Diminta untuk Membayar Suap oleh Petugas-Petugas, Selama 12 Bulan Terakhir

Pelaku usaha juga merupakan salah satu aktor yang berpotensi terlibat dalam praktik penyuapan kepada petugas pelayanan publik atau diminta untuk melakukan suap oleh petugas. Selama periode 2022-2024, persentase pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan

publik cukup mengalami fluktuasi (Gambar 4.6). Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 18,32 persen pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan kepada petugas layanan publik, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar 17,40 persen pada tahun 2023. Meskipun demikian, cukup disayangkan bahwa tren penurunan ini tidak dapat dipertahankan pada tahun 2024. Hasil SPAK 2024 menunjukkan bahwa terdapat 18,18 persen pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik, meningkat sebesar 0,78 persen dibandingkan tahun 2023.



Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2022-2024

Gambar 4.6 Persentase Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2022 - 2024

DAFTAR PUSTAKA





DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Andang. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Bisogno, E., Dawson-Faber, J., & Jandl, M. (2015). The international classification of crime for statistical purposes: A new instrument to improve comparative criminological research. *European Journal of Criminology*, 12(5), 535–550. <https://doi.org/10.1177/1477370815600609>
- Detotto, C., & Otranto, E. (2010). Does crime affect economic growth? *Kyklos*, 63(3). <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.2010.00477.x>
- Elchereth, G., Penic, S., Usoof, R., & Reicher, S. (2019). Multiple Perspectives in Conflict Settings: An Introduction. *Journal of Social and Political Psychology*, 7(2), 913–924. <https://doi.org/10.5964/jsp.p.v7i2.1333>.
- Gamayanti, Rosa & Nulhaqim, Soni. (2019). Konflik Antara PLTU Indramayu II dengan Warga Mekarsari Dilihat dari Teori Kebutuhan Manusia Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. 1. 11. 10.24198/jkrk.v1i1.20888.
- Hartanto, H., & Ningrum Amin, B. S. (2021). The effectiveness of the death penalty as a preventive action in suppressing the number of narcotics crimes in Indonesia. *ScienceRise: Juridical Science*, 1(15). <https://doi.org/10.15587/2523-4153.2021.225793>
- Hatta, M. (2008). *Menyongsong penegakan hukum responsif sistem peradilan pidana terpadu (dalam konsepsi dan implementasi) Kapita Selekta*. Yogyakarta: Galang Press.
- Hegre, H., Hultman, L., & Nygård, H. M. (2019). Evaluating the conflict-reducing effect of UN peacekeeping operations. *Journal of Politics*, 81(1), 215–232. <https://doi.org/10.1086/700203>.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Jakarta: Bappenas.

Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2020). *Handbook on Governance Statistics*. Switzerland.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Puspitasari, D., Firdaus, S. U., & Riwanto, A. (2018). Peranan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Perspektif Pertahanan Keamanan Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17724>.

Saeed, R. M., & Abdulmohsin, H. A. (2023). A study on predicting crime rates through machine learning and data mining using text. *In Journal of Intelligent Systems*, 32(1). <https://doi.org/10.1515/jisys-2022-0223>.

Savitz, L. D. (1978). *Official Police Statistics And Their Limitations (From Crime In Society)*. John Willey.

Sherman, L., Neyroud, P. W., & Neyroud, E. (2016). The cambridge crime harm index: Measuring total harm from crime based on sentencing guidelines. *Policing (Oxford)*, 10(3). <https://doi.org/10.1093/police/paw003>.

Uddin, M. F., Osmani, N. M., & Jamil, K. H. (2023). The "Right to Life" in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR): A comparative study between the UDHR and the Qur'an and Sunnah. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(3). <https://doi.org/10.11113/umran2023.10n3.639>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNODCCP). (1999). *Handbook on Justice for Victims*. New York.

United Nations General Assembly. (2012). *The Future We Want*. Resolusi yang Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 27 Juli 2012, 66th Session, A/RES/66/288. New York.

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Resolusi yang Diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 September 2015, A/RES/70/1. New York.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). *International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0*.

Warr, Mark. (1990). Dangerous Situations: Social Context and Fear of Victimization. *Social Forces*, 68(3): 891-907.

<https://www.bps.go.id>

LAMPIRAN



DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA



Lampiran 1 Indikator Kriminalitas Nasional, 2022–2023

Jenis Indikator	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	372.965	584.991
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	142.174	299.517
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Crime Clearance</i>)	38,12	51,20
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	00. 01' 24"	00. 00' 53"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	137	214

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 2 Peringkat Kepolisian Daerah Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2023

Jumlah Kejahatan			Risiko Penduduk Terkena Kejahatan		
No	Kepolisian Daerah	Jumlah Kejahatan	No	Kepolisian Daerah	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Metro Jaya	87.426	1	Sulawesi Utara	589
2	Jawa Timur	66.741	2	Papua Barat	532
3	Sumatera Utara	62.278	3	Sulawesi Selatan	463
4	Jawa Barat	45.694	4	Sumatera Utara	433
5	Jawa Tengah	42.304	5	Metro Jaya	357
6	Sulawesi Selatan	41.196	6	Papua	347
7	Sumatera Selatan	21.335	7	Sulawesi Tenggara	340
8	Lampung	16.608	8	DI Yogyakarta	320
9	Riau	15.777	9	Gorontalo	314
10	Sulawesi Utara	14.265	10	Sulawesi Tengah	301
11	Papua	14.074	11	Bali	295
12	Sumatera Barat	12.722	12	Bengkulu	290
13	Nusa Tenggara Timur	12.692	13	Kalimantan Utara	273
14	A c e h	12.420	14	Maluku	270
15	DI Yogyakarta	12.061	15	Kepulauan Riau	259
16	Bali	11.916	16	Nusa Tenggara Timur	250
17	Sulawesi Tengah	8.944	17	Riau	237
18	Nusa Tenggara Barat	7.550	18	Sumatera Barat	235
19	Jambi	7.432	19	A c e h	216
20	Banten	7.392	20	Sumatera Selatan	214
21	Kalimantan Timur	6.762	21	Maluku Utara	205
22	Papua Barat	6.410	22	Jambi	192
23	Kalimantan Selatan	6.375	23	Lampung	190
24	Sulawesi Tenggara	6.276	24	Sulawesi Barat	183
25	Kalimantan Barat	6.028	25	Kalimantan Timur	174
26	Bengkulu	5.579	26	Kalimantan Selatan	164
27	Kepulauan Riau	5.074	27	Kep. Bangka Belitung	162
28	Maluku	4.741	28	Jawa Timur	160
29	Kalimantan Tengah	4.420	29	Kalimantan Tengah	159
30	Gorontalo	3.574	30	Nusa Tenggara Barat	146
31	Sulawesi Barat	2.679	31	Jawa Tengah	115
32	Maluku Utara	2.334	32	Jawa Barat	108
33	Kep. Bangka Belitung	2.211	33	Kalimantan Barat	108
34	Kalimantan Utara	1.701	34	Banten	105
Indonesia		584.991	Indonesia		214

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri
Catatan: Metro Jaya mencakup Mabes Polri

Lampiran 3 Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2022-2023

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
A c e h	10.137	12.420
Sumatera Utara	43.555	62.278
Sumatera Barat	7.691	12.722
Riau	12.389	15.777
Jambi	5.359	7.432
Sumatera Selatan	11.453	21.335
Bengkulu	3.613	5.579
Lampung	11.022	16.608
Kep. Bangka Belitung	2.072	2.211
Kepulauan Riau	3.358	5.074
Metro Jaya	32.602	87.426
Jawa Barat	29.485	45.694
Jawa Tengah	30.060	42.304
DI Yogyakarta	10.591	12.061
Jawa Timur	51.905	66.741
Banten	5.038	7.392
Bali	6.304	11.916
Nusa Tenggara Barat	5.296	7.550
Nusa Tenggara Timur	5.991	12.692
Kalimantan Barat	3.975	6.028
Kalimantan Tengah	3.189	4.420
Kalimantan Selatan	5.016	6.375
Kalimantan Timur	4.221	6.762
Kalimantan Utara	1.280	1.701
Sulawesi Utara	9.618	14.265
Sulawesi Tengah	5.453	8.944
Sulawesi Selatan	28.679	41.196
Sulawesi Tenggara	3.828	6.276
Gorontalo	2.488	3.574
Sulawesi Barat	2.027	2.679
Maluku	2.383	4.741
Maluku Utara	1.220	2.334
Papua Barat	4.083	6.410
Papua	7.584	14.074
Indonesia	372.965	584.991

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri
Catatan: Metro Jaya mencakup Mabes Polri

Lampiran 4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2022-2023

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
A c e h	6.264	10.708
Sumatera Utara	6.937	33.385
Sumatera Barat	2.714	8.821
Riau	2.127	2.870
Jambi	999	3.317
Sumatera Selatan	5.937	5.112
Bengkulu	805	3.615
Lampung	2.067	10.930
Kep. Bangka Belitung	1.017	1.140
Kepulauan Riau	382	1.159
Metro Jaya	1.893	11.017
Jawa Barat	6.853	28.363
Jawa Tengah	24.613	38.720
DI Yogyakarta	4.630	8.823
Jawa Timur	53.652	58.696
Banten	2.577	3.900
Bali	1.496	7.695
Nusa Tenggara Barat	1.825	4.592
Nusa Tenggara Timur	286	2.090
Kalimantan Barat	878	3.927
Kalimantan Tengah	1.677	2.810
Kalimantan Selatan	2.088	5.213
Kalimantan Timur	2.141	4.793
Kalimantan Utara	330	1.624
Sulawesi Utara	2.211	2.958
Sulawesi Tengah	853	5.177
Sulawesi Selatan	1.953	19.068
Sulawesi Tenggara	817	1.518
Gorontalo	266	1.467
Sulawesi Barat	352	992
Maluku	334	1.005
Maluku Utara	473	1.052
Papua Barat	268	1.535
Papua	459	1.425
Indonesia	142.174	299.517

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri
Catatan: Metro Jaya mencakup Mabes Polri

Lampiran 5 Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2022–2023

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
A c e h	61,79	86,22
Sumatera Utara	15,93	53,61
Sumatera Barat	35,29	69,34
Riau	17,17	18,19
Jambi	18,64	44,63
Sumatera Selatan	51,84	23,96
Bengkulu	22,28	64,80
Lampung	18,75	65,81
Kep. Bangka Belitung	49,08	51,56
Kepulauan Riau	11,38	22,84
Metro Jaya	5,81	12,60
Jawa Barat	23,24	62,07
Jawa Tengah	81,88	91,53
DI Yogyakarta	43,72	73,15
Jawa Timur	103,37	87,95
Banten	51,15	52,76
Bali	23,73	64,58
Nusa Tenggara Barat	34,46	60,82
Nusa Tenggara Timur	4,77	16,47
Kalimantan Barat	22,09	65,15
Kalimantan Tengah	52,59	63,57
Kalimantan Selatan	41,63	81,77
Kalimantan Timur	50,72	70,88
Kalimantan Utara	25,78	95,47
Sulawesi Utara	22,99	20,74
Sulawesi Tengah	15,64	57,88
Sulawesi Selatan	6,81	46,29
Sulawesi Tenggara	21,34	24,19
Gorontalo	10,69	41,05
Sulawesi Barat	17,37	37,03
Maluku	14,02	21,20
Maluku Utara	38,77	45,07
Papua Barat	6,56	23,95
Papua	6,05	10,13
Indonesia	38,12	51,20

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri
Catatan: Metro Jaya mencakup Mabes Polri

**Lampiran 6 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah,
2022–2023**

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
A c e h	00. 51'50"	00. 42' 19"
Sumatera Utara	00. 11'58"	00. 08' 26"
Sumatera Barat	01. 07'46"	00. 41' 18"
Riau	00. 42'04"	00. 33' 18"
Jambi	01. 37'16"	01. 10' 43"
Sumatera Selatan	00. 45'30"	00. 24' 38"
Bengkulu	02. 24'16"	01. 34' 12"
Lampung	00. 47'17"	00. 31' 38"
Kep. Bangka Belitung	04. 11'34"	03. 57' 43"
Kepulauan Riau	02. 35'14"	01. 43' 35"
Metro Jaya	00. 16' 01"	00. 06' 04"
Jawa Barat	00. 17'40"	00. 11' 30"
Jawa Tengah	00. 17'20"	00. 12' 25"
DI Yogyakarta	00. 49'13"	00. 43' 34"
Jawa Timur	00. 10'02"	00. 07' 52"
Banten	01. 43'28"	01. 11' 06"
Bali	01. 22'41"	00. 44' 06"
Nusa Tenggara Barat	01. 38'25"	01. 09' 36"
Nusa Tenggara Timur	01. 27'00"	00. 41' 24"
Kalimantan Barat	02. 11'08"	01. 27' 11"
Kalimantan Tengah	02. 43'27"	01. 58' 54"
Kalimantan Selatan	01. 43'55"	01. 22' 26"
Kalimantan Timur	02. 03'29"	01. 17' 43"
Kalimantan Utara	06. 47'15"	05. 08' 59"
Sulawesi Utara	00. 54'11"	00. 36' 50"
Sulawesi Tengah	01. 35'35"	00. 58' 45"
Sulawesi Selatan	00. 18'10"	00. 12' 45"
Sulawesi Tenggara	02. 16'10"	01. 23' 44"
Gorontalo	03. 29'31"	02. 27' 03"
Sulawesi Barat	04. 17'10"	03. 16' 11"
Maluku	03. 38'44"	01. 50' 51"
Maluku Utara	07. 07'16"	03. 45' 11"
Papua Barat	02. 07'40"	01. 21' 59"
Papua	01. 08'44"	00. 37' 20"
Indonesia	00. 01'24"	00. 00' 53"

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri
Catatan: Metro Jaya mencakup Mabes Polri

Lampiran 7 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2022-2023

Kepolisian Daerah	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
A c e h	190	216
Sumatera Utara	292	433
Sumatera Barat	138	235
Riau	191	237
Jambi	149	192
Sumatera Selatan	134	214
Bengkulu	179	290
Lampung	121	190
Kep. Bangka Belitung	141	162
Kepulauan Riau	159	259
Metro Jaya	307	357
Jawa Barat	60	108
Jawa Tengah	82	115
DI Yogyakarta	285	320
Jawa Timur	127	160
Banten	42	105
Bali	144	295
Nusa Tenggara Barat	98	146
Nusa Tenggara Timur	111	250
Kalimantan Barat	73	108
Kalimantan Tengah	118	159
Kalimantan Selatan	122	164
Kalimantan Timur	111	174
Kalimantan Utara	179	273
Sulawesi Utara	364	589
Sulawesi Tengah	270	301
Sulawesi Selatan	314	463
Sulawesi Tenggara	144	340
Gorontalo	211	314
Sulawesi Barat	141	183
Maluku	128	270
Maluku Utara	94	205
Papua Barat	353	532
Papua	174	347
Indonesia	137	214

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri
Catatan: Metro Jaya mencakup Mabes Polri

Lampiran 8 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2022-2023

Kelompok/Jenis Kejahatan	Tahun	
	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Kejahatan terhadap Nyawa		
Pembunuhan	854	1.129
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	1.186	875
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain		
Penganiayaan	34.452	51.106
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5.526	10.783
Pengeroyokan	8.239	16.441
Pengancaman	3.115	4.772
Penculikan	1.472	206
Kejahatan Perdagangan Manusia	117	961
Pemerasan	542	1.684
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	6.996	793
Penghinaan	1.149	1.388
Kejahatan terhadap Kesusilaan		
Perkosaan	1.443	1.230
Pencabulan	2.893	2.739
Kekerasan Seksual	235	1.410
Persetubuhan terhadap Anak	1.238	3.691
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
Pencurian dengan Kekerasan	4.335	6.573
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang		
Pencurian	37.159	49.546
Pencurian dengan Pemberatan	37.870	62.872
Pencurian Kendaraan Bermotor	14.184	20.978
Pengrusakan/Penghancuran Barang	1.866	5.907
Pembakaran dengan Sengaja	552	773
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan		
Narkotika dan Psikotropika	31.420	39.496
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin	2.161	3.340
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi		
Penipuan/Perbuatan Curang	34.578	48.609
Penggelapan	11.689	27.049
Korupsi	261	483
Penadahan	228	358
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum		
Terhadap Ketertiban Umum	7.570	3.775
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara		
Membahayakan Keamanan Umum	329	617
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	1.258	4.104
Kecelakaan Lalu Lintas	89.525	153.366
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup		
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	421	560
Kejahatan Perkebunan	481	1.160
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	229	244
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	498	839
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	863	1.032

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2023

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan (2023)		
	Januari	Februari	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	75	79	101
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	79	78	104
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain			
Penganiayaan	4.187	3.843	4.260
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	849	753	940
Pengeroyokan	1.316	1.086	1.258
Pengancaman	361	364	452
Penculikan	21	24	13
Kejahatan Perdagangan Manusia	19	15	52
Pemerasan	116	118	132
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	133	135	143
Penghinaan	127	128	136
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	141	110	115
Pencabulan	297	263	253
Kekerasan Seksual	97	80	83
Persetubuhan terhadap Anak	1	0	228
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	579	577	610
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	4.279	4.156	4.522
Pencurian dengan Pemberatan	5.747	5.635	5.603
Pencurian Kendaraan Bermotor	2.099	1.863	1.943
Pengrusakan/Penghancuran Barang	519	469	531
Pembakaran dengan Sengaja	59	59	47
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan			
Narkotika dan Psikotropika	3.318	3.634	3.816
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin	337	336	456
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	4.202	3.886	4.566
Penggelapan	2.248	2.262	2.260
Korupsi	43	45	40
Penadahan	30	34	34
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	691	630	747
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
Membahayakan Keamanan Umum	91	95	121
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	302	299	549
Kecelakaan Lalu Lintas	12.266	10.595	12.259
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup			
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	51	63	50
Kejahatan Perkebunan	68	73	94
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	34	22	31
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	88	91	66
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	79	101	92

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan (2023)		
	April	Mei	Juni
(1)	(5)	(6)	(7)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	97	91	82
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	78	100	58
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain			
Penganiayaan	4.093	4.567	4.314
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	860	952	861
Pengeroyokan	1.369	1.371	1.367
Pengancaman	386	410	377
Penculikan	16	26	11
Kejahatan Perdagangan Manusia	12	28	468
Pemerasan	135	155	164
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	98	82	36
Penghinaan	108	130	110
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	93	119	75
Pencabulan	190	281	230
Kekerasan Seksual	79	137	128
Persetubuhan terhadap Anak	327	492	423
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	506	615	586
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	3.752	4.399	4.067
Pencurian dengan Pemberatan	4.728	6.113	5.185
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.576	2.040	1.745
Pengrusakan/Penghancuran Barang	425	512	476
Pembakaran dengan Sengaja	50	55	67
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan			
Narkotika dan Psikotropika	2.437	3.762	3.627
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras / Bebas Terbatas tanpa Izin	216	337	260
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	3.603	4.659	3.959
Penggelapan	1.701	2.365	2.226
Korupsi	29	30	45
Penadahan	19	44	23
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	327	250	192
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
Membahayakan Keamanan Umum	53	43	24
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	323	366	339
Kecelakaan Lalu Lintas	11.782	14.418	12.966
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup			
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	33	46	50
Kejahatan Perkebunan	66	90	101
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	16	21	19
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	50	89	57
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	62	102	108

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/ Jenis Kejahatan	Bulan (2023)		
	Juli	Agustus	September
(1)	(8)	(9)	(10)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	93	102	106
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	67	45	63
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain			
Penganiayaan	4.337	4.428	4.201
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	883	909	925
Pengeroyokan	1.427	1.501	1.414
Pengancaman	463	425	391
Penculikan	15	17	21
Kejahatan Perdagangan Manusia	151	74	47
Pemerasan	125	144	147
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	48	32	22
Penghinaan	110	134	103
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	99	106	87
Pencabulan	231	223	192
Kekerasan Seksual	125	122	140
Persetubuhan terhadap Anak	353	383	385
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	592	571	466
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	4.246	4.356	4.102
Pencurian dengan Pemberatan	5.402	5.141	4.791
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.683	1.793	1.574
Pengrusakan/Penghancuran Barang	498	534	472
Pembakaran dengan Sengaja	78	93	73
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan			
Narkotika dan Psikotropika	3.437	3.723	3.580
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras / Bebas Terbatas tanpa Izin	308	376	156
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	4.230	3.980	3.860
Penggelapan	2.361	2.378	2.303
Korupsi	59	47	71
Penadahan	31	33	30
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	190	202	155
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
Membahayakan Keamanan Umum	40	31	35
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	332	342	369
Kecelakaan Lalu Lintas	12.802	14.751	13.286
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup			
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	33	73	74
Kejahatan Perkebunan	100	119	96
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	24	16	24
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	86	120	61
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	104	132	87

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 9

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan (2023)		
	Oktober	November	Desember
(1)	(11)	(12)	(13)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	96	102	105
Kelalaian Mengakibatkan Orang Mati	66	68	69
Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain			
Penganiayaan	4.452	4.294	4.130
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	952	958	941
Pengeroyokan	1.495	1.368	1.469
Pengancaman	411	382	350
Penculikan	10	18	14
Kejahatan Perdagangan Manusia	25	33	37
Pemerasan	163	169	116
Kelalaian Mengakibatkan Orang Luka	29	26	9
Penghinaan	110	101	91
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	85	104	96
Pencabulan	217	195	167
Kekerasan Seksual	139	143	137
Persetubuhan terhadap Anak	351	392	356
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	524	470	477
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang			
Pencurian	4.059	3.992	3.616
Pencurian dengan Pemberatan	5.080	4.903	4.544
Pencurian Kendaraan Bermotor	1.522	1.593	1.547
Pengrusakan/Penghancuran Barang	553	489	429
Pembakaran dengan Sengaja	82	51	59
Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-obatan			
Narkotika dan Psikotropika	3.287	2.700	2.175
Menjual atau Mengedarkan Obat Keras / Bebas Terbatas tanpa Izin	191	234	133
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	4.107	4.038	3.519
Penggelapan	2.441	2.448	2.056
Korupsi	37	25	12
Penadahan	29	19	32
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	151	122	118
Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
Membahayakan Keamanan Umum	24	26	34
Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	321	252	310
Kecelakaan Lalu Lintas	13.484	12.487	12.270
Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup			
Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (<i>Illegal Logging</i>)	34	32	21
Kejahatan Perkebunan	128	140	85
Kejahatan Perikanan (<i>Illegal Fishing</i>)	11	9	17
Kejahatan Pertambangan Mineral dan Batubara (<i>Illegal Mining</i>)	58	39	34
Kejahatan Minyak dan Gas (Migas)	61	60	44

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2022

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain		
	Pembunuhan	Mengakibatkan Orang Mati	Penganiayaan	Kekerasan	
				Dalam Rumah Tangga	Pengeroyokan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	24	13	1.056	153	90
Sumatera Utara	84	138	5.380	792	433
Sumatera Barat	8	26	1.200	114	96
Riau	36	26	885	167	274
Jambi	15	20	512	80	241
Sumatera Selatan	51	14	1.250	211	512
Bengkulu	14	17	350	66	118
Lampung	30	44	825	141	310
Kep. Bangka Belitung	7	18	168	23	49
Kepulauan Riau	5	26	383	55	133
Metro Jaya	28	44	1.257	476	485
Jawa Barat	53	71	1.924	400	923
Jawa Tengah	52	53	632	89	287
DI Yogyakarta	11	76	466	75	159
Jawa Timur	102	259	2.914	725	812
Banten	7	4	303	68	162
Bali	7	21	380	89	73
Nusa Tenggara Barat	20	47	549	103	80
Nusa Tenggara Timur	20	16	1.271	206	536
Kalimantan Barat	10	27	181	29	46
Kalimantan Tengah	17	20	193	61	37
Kalimantan Selatan	35	26	344	53	89
Kalimantan Timur	22	33	327	53	97
Kalimantan Utara	7	12	105	24	43
Sulawesi Utara	33	15	2.522	261	292
Sulawesi Tengah	11	22	769	125	159
Sulawesi Selatan	46	44	4.043	405	742
Sulawesi Tenggara	9	9	759	100	165
Gorontalo	14	7	765	96	98
Sulawesi Barat	5	2	278	17	63
Maluku	12	5	583	66	63
Maluku Utara	1	2	314	40	116
Papua Barat	18	10	617	59	185
Papua	40	19	947	104	271
Indonesia	854	1.186	34.452	5.526	8.239

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain					
	Kejahatan				Kelalaian	
	Pengancaman	Penculikan	Perdagangan	Pemerasan	Mengakibatkan	Penghinaan
			Manusia		Orang Luka	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	95	51	3	7	103	34
Sumatera Utara	583	128	4	61	510	300
Sumatera Barat	56	30	4	10	158	28
Riau	56	46	2	22	71	22
Jambi	28	27	2	10	66	9
Sumatera Selatan	140	76	2	14	68	10
Bengkulu	54	14	1	10	70	3
Lampung	49	143	3	49	322	20
Kep. Bangka Belitung	3	4	-	3	48	2
Kepulauan Riau	11	6	4	6	29	3
Metro Jaya	81	233	5	102	856	62
Jawa Barat	43	104	15	45	397	36
Jawa Tengah	8	24	2	14	1.384	6
DI Yogyakarta	16	19	-	14	248	9
Jawa Timur	107	125	9	69	989	54
Banten	13	30	2	11	38	11
Bali	20	6	-	2	132	7
Nusa Tenggara Barat	45	9	2	4	171	17
Nusa Tenggara Timur	123	39	4	2	117	107
Kalimantan Barat	7	5	7	2	30	1
Kalimantan Tengah	7	8	2	3	25	2
Kalimantan Selatan	40	12	1	10	35	2
Kalimantan Timur	20	4	9	3	58	1
Kalimantan Utara	14	1	5	-	37	1
Sulawesi Utara	419	107	6	6	142	74
Sulawesi Tengah	82	16	1	5	39	17
Sulawesi Selatan	694	98	12	34	505	208
Sulawesi Tenggara	74	7	-	4	95	16
Gorontalo	26	14	3	-	35	9
Sulawesi Barat	33	9	-	1	71	3
Maluku	33	13	3	1	40	31
Maluku Utara	8	8	-	1	10	10
Papua Barat	62	27	3	8	48	20
Papua	65	29	1	9	49	14
Indonesia	3.115	1.472	117	542	6.996	1.149

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan			
	Perkosaan	Pencabulan	Kekerasan Seksual	Persetubuhan terhadap Anak
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	135	82	9	15
Sumatera Utara	68	385	32	255
Sumatera Barat	27	130	3	42
Riau	45	131	3	52
Jambi	29	38	1	13
Sumatera Selatan	59	69	6	25
Bengkulu	24	34	1	8
Lampung	61	79	6	40
Kep. Bangka Belitung	11	24	3	9
Kepulauan Riau	9	69	-	14
Metro Jaya	59	113	18	59
Jawa Barat	114	266	26	159
Jawa Tengah	47	124	1	62
DI Yogyakarta	14	48	13	4
Jawa Timur	106	191	25	103
Banten	20	42	11	46
Bali	10	28	6	5
Nusa Tenggara Barat	60	39	2	11
Nusa Tenggara Timur	55	95	2	30
Kalimantan Barat	29	66	4	19
Kalimantan Tengah	13	23	-	15
Kalimantan Selatan	29	21	5	11
Kalimantan Timur	28	49	3	20
Kalimantan Utara	10	31	5	6
Sulawesi Utara	42	189	11	74
Sulawesi Tengah	44	82	6	17
Sulawesi Selatan	101	177	13	54
Sulawesi Tenggara	20	62	2	16
Gorontalo	25	73	7	7
Sulawesi Barat	18	22	1	2
Maluku	29	35	3	17
Maluku Utara	17	24	-	4
Papua Barat	34	30	4	9
Papua	51	22	3	15
Indonesia	1.443	2.893	235	1.238

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)
A c e h	57	1.583	561	417
Sumatera Utara	636	6.626	6.721	2.498
Sumatera Barat	52	801	509	168
Riau	322	1.599	2.249	968
Jambi	76	583	852	176
Sumatera Selatan	391	624	1.775	383
Bengkulu	62	403	499	153
Lampung	298	632	2.159	608
Kep. Bangka Belitung	13	286	333	36
Kepulauan Riau	67	279	267	220
Metro Jaya	291	1.722	3.302	873
Jawa Barat	360	1.487	4.852	2.426
Jawa Tengah	111	1.000	1.733	279
DI Yogyakarta	35	940	540	184
Jawa Timur	421	3.521	4.674	1.502
Banten	74	180	936	103
Bali	42	747	349	174
Nusa Tenggara Barat	94	547	642	213
Nusa Tenggara Timur	34	877	146	56
Kalimantan Barat	29	415	401	221
Kalimantan Tengah	23	364	375	48
Kalimantan Selatan	51	458	548	78
Kalimantan Timur	21	324	374	191
Kalimantan Utara	9	165	119	21
Sulawesi Utara	23	1.226	122	61
Sulawesi Tengah	75	1.108	289	285
Sulawesi Selatan	262	5.561	1.409	522
Sulawesi Tenggara	27	222	150	12
Gorontalo	6	288	13	33
Sulawesi Barat	4	313	69	46
Maluku	8	390	55	3
Maluku Utara	2	90	10	13
Papua Barat	122	657	338	374
Papua	237	1.141	499	839
Indonesia	4.335	37.159	37.870	14.184

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang		Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-Obatan	
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika	Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin
(1)	(21)	(22)	(23)	(24)
Aceh	53	27	1.207	2
Sumatera Utara	352	139	4.162	2
Sumatera Barat	46	13	922	1
Riau	60	39	1.470	3
Jambi	22	3	626	-
Sumatera Selatan	34	7	1.502	1
Bengkulu	14	5	290	24
Lampung	67	13	1.097	29
Kep. Bangka Belitung	3	4	321	7
Kepulauan Riau	6	4	297	-
Metro Jaya	87	7	2.542	39
Jawa Barat	100	9	1.340	341
Jawa Tengah	24	10	1.359	228
DI Yogyakarta	26	9	329	139
Jawa Timur	138	52	5.006	942
Banten	20	3	522	87
Bali	17	2	631	11
Nusa Tenggara Barat	23	10	454	20
Nusa Tenggara Timur	74	18	28	3
Kalimantan Barat	5	32	644	-
Kalimantan Tengah	9	5	584	12
Kalimantan Selatan	16	10	1.406	37
Kalimantan Timur	8	10	1.227	23
Kalimantan Utara	3	4	268	2
Sulawesi Utara	99	13	70	105
Sulawesi Tengah	31	6	377	12
Sulawesi Selatan	328	28	1.593	50
Sulawesi Tenggara	26	4	356	2
Gorontalo	9	1	49	26
Sulawesi Barat	3	2	138	10
Maluku	27	7	166	-
Maluku Utara	11	2	108	1
Papua Barat	46	6	99	1
Papua	79	48	230	1
Indonesia	1.866	552	31.420	2.161

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi				
Kepolisian Daerah	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Penadahan
	(1)	(25)	(26)	(27)
A c e h	701	304	7	16
Sumatera Utara	3.448	1.920	7	7
Sumatera Barat	321	228	1	1
Riau	646	559	9	7
Jambi	225	242	2	5
Sumatera Selatan	1.230	417	6	6
Bengkulu	280	102	13	1
Lampung	1.257	506	10	4
Kep. Bangka Belitung	74	46	-	1
Kepulauan Riau	293	93	7	1
Metro Jaya	8.435	1.293	2	17
Jawa Barat	4.299	953	5	6
Jawa Tengah	840	425	11	5
DI Yogyakarta	1.046	320	-	11
Jawa Timur	3.666	1.012	31	32
Banten	621	199	10	4
Bali	401	164	2	4
Nusa Tenggara Barat	241	133	11	4
Nusa Tenggara Timur	391	139	8	1
Kalimantan Barat	144	152	15	5
Kalimantan Tengah	102	147	11	28
Kalimantan Selatan	259	210	6	31
Kalimantan Timur	151	147	12	4
Kalimantan Utara	39	40	5	1
Sulawesi Utara	502	326	7	-
Sulawesi Tengah	293	185	5	3
Sulawesi Selatan	3.332	915	13	3
Sulawesi Tenggara	200	112	8	4
Gorontalo	150	81	5	1
Sulawesi Barat	105	35	6	1
Maluku	159	42	15	-
Maluku Utara	60	24	4	-
Papua Barat	334	77	3	-
Papua	333	141	4	14
Indonesia	34.578	11.689	261	228

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
	Ketetertiban Umum			
	Terhadap Ketetertiban Umum	Membahayakan Keamanan Umum	Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	Kecelakaan Lalu Lintas
(1)	(29)	(30)	(31)	(32)
A c e h	235	8	3	2.374
Sumatera Utara	835	68	21	4.037
Sumatera Barat	228	3	24	1.896
Riau	628	6	8	1.127
Jambi	110	2	11	912
Sumatera Selatan	314	5	68	1.316
Bengkulu	34	4	11	633
Lampung	257	3	59	896
Kep. Bangka Belitung	14	1	5	277
Kepulauan Riau	102	10	2	699
Metro Jaya	435	17	156	5.349
Jawa Barat	495	28	91	6.334
Jawa Tengah	594	10	24	19.644
DI Yogyakarta	148	17	21	5.226
Jawa Timur	1.184	37	164	19.407
Banten	135	11	23	941
Bali	94	1	3	2.565
Nusa Tenggara Barat	122	3	40	1.140
Nusa Tenggara Timur	136	7	3	912
Kalimantan Barat	68	6	17	809
Kalimantan Tengah	45	1	20	665
Kalimantan Selatan	83	9	94	632
Kalimantan Timur	126	6	25	452
Kalimantan Utara	24	2	6	139
Sulawesi Utara	167	16	77	1.510
Sulawesi Tengah	144	4	3	721
Sulawesi Selatan	442	21	179	4.350
Sulawesi Tenggara	76	3	60	912
Gorontalo	60	5	4	326
Sulawesi Barat	61	5	12	538
Maluku	10	2	10	263
Maluku Utara	28	1	1	129
Papua Barat	59	1	5	496
Papua	77	6	8	1.898
Indonesia	7.570	329	1.258	89.525

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 10

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup				
	Kejahatan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Illegal Logging)	Kejahatan Perkebunan	Kejahatan Perikanan (Illegal Fishing)	Kejahatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Illegal Mining)	Kejahatan Minyak Dan Gas (Migas)
	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
Aceh	17	3	6	15	43
Sumatera Utara	13	385	-	6	28
Sumatera Barat	6	3	-	7	19
Riau	29	10	1	19	47
Jambi	16	1	-	32	67
Sumatera Selatan	7	3	3	11	47
Bengkulu	12	6	-	4	11
Lampung	12	5	6	14	36
Kep. Bangka Belitung	34	-	29	78	24
Kepulauan Riau	4	-	2	2	9
Metro Jaya	13	-	7	4	25
Jawa Barat	3	2	12	1	24
Jawa Tengah	21	-	13	14	71
DI Yogyakarta	3	1	2	2	6
Jawa Timur	97	24	107	34	75
Banten	2	-	1	13	17
Bali	1	-	-	3	25
Nusa Tenggara Barat	7	-	-	12	16
Nusa Tenggara Timur	4	2	2	1	19
Kalimantan Barat	15	2	3	57	44
Kalimantan Tengah	24	13	-	33	15
Kalimantan Selatan	14	1	9	20	28
Kalimantan Timur	31	8	1	30	39
Kalimantan Utara	1	1	1	9	6
Sulawesi Utara	1	6	-	13	28
Sulawesi Tengah	1	1	6	16	9
Sulawesi Selatan	6	1	14	6	16
Sulawesi Tenggara	10	2	-	8	14
Gorontalo	1	1	-	14	6
Sulawesi Barat	-	-	-	-	7
Maluku	3	-	1	10	19
Maluku Utara	7	-	3	2	6
Papua Barat	3	-	-	8	10
Papua	3	-	-	-	7
Indonesia	421	481	229	498	863

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lampiran 11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2023

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa		Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain		
	Pembunuhan	Mengakibatkan Orang Mati	Penganiayaan	Kekerasan	
				Dalam Rumah Tangga	Pengeroyokan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	15	3	1.156	216	121
Sumatera Utara	100	129	6.790	1.248	952
Sumatera Barat	15	15	1.752	211	235
Riau	39	19	1.067	290	435
Jambi	22	4	659	150	338
Sumatera Selatan	75	12	2.122	389	892
Bengkulu	16	5	541	158	238
Lampung	38	39	1.174	289	450
Kep. Bangka Belitung	3	1	153	59	46
Kepulauan Riau	5	19	510	147	213
Metro Jaya	65	45	3.620	1.538	1.501
Jawa Barat	62	10	3.492	736	1.931
Jawa Tengah	49	21	746	145	492
DI Yogyakarta	12	7	394	123	188
Jawa Timur	100	234	3.656	1.216	1.472
Banten	18	10	455	122	215
Bali	18	9	503	132	119
Nusa Tenggara Barat	21	26	644	122	122
Nusa Tenggara Timur	49	38	2.685	547	1.371
Kalimantan Barat	21	7	324	104	83
Kalimantan Tengah	24	6	242	69	64
Kalimantan Selatan	42	20	456	79	160
Kalimantan Timur	21	22	558	124	212
Kalimantan Utara	7	11	171	40	85
Sulawesi Utara	46	14	3.494	456	603
Sulawesi Tengah	34	32	1.198	320	318
Sulawesi Selatan	65	55	5.504	746	1.398
Sulawesi Tenggara	15	2	1.170	207	367
Gorontalo	9	13	1.079	160	146
Sulawesi Barat	10	3	290	29	95
Maluku	10	6	1.210	181	380
Maluku Utara	8	2	642	113	215
Papua Barat	21	9	961	119	385
Papua	74	27	1.688	198	599
Indonesia	1.129	875	51.106	10.783	16.441

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Fisik yang Menyebabkan Luka atau Bertujuan Menyakiti Orang Lain					
	Kejahatan			Kelalaian		
	Pengancaman	Penculikan	Perdagangan	Pemerasan	Mengakibatkan	Penghinaan
			Manusia		Orang Luka	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	94	8	16	21	2	17
Sumatera Utara	781	25	22	129	125	309
Sumatera Barat	98	10	16	22	108	38
Riau	111	9	41	59	4	25
Jambi	54	2	28	35	4	5
Sumatera Selatan	274	5	20	38	11	16
Bengkulu	68	-	15	11	8	3
Lampung	78	9	15	83	109	15
Kep. Bangka Belitung	7	1	6	4	1	-
Kepulauan Riau	21	1	14	7	3	1
Metro Jaya	119	27	39	765	114	132
Jawa Barat	77	20	109	154	12	50
Jawa Tengah	14	3	51	30	12	11
DI Yogyakarta	10	4	10	25	5	6
Jawa Timur	126	10	103	93	92	24
Banten	8	3	17	14	7	3
Bali	33	-	26	10	3	7
Nusa Tenggara Barat	76	1	29	9	8	8
Nusa Tenggara Timur	313	9	49	14	23	231
Kalimantan Barat	37	-	35	11	4	2
Kalimantan Tengah	26	-	9	4	-	1
Kalimantan Selatan	58	1	4	7	2	6
Kalimantan Timur	48	1	67	6	4	4
Kalimantan Utara	15	1	24	-	-	-
Sulawesi Utara	641	5	29	9	7	84
Sulawesi Tengah	116	2	31	8	9	23
Sulawesi Selatan	989	34	60	73	92	229
Sulawesi Tenggara	130	-	15	4	10	24
Gorontalo	30	2	17	-	1	18
Sulawesi Barat	27	-	1	2	1	2
Maluku	82	2	23	3	4	46
Maluku Utara	24	1	4	2	1	28
Papua Barat	62	2	7	19	2	8
Papua	125	8	9	13	5	12
Indonesia	4.772	206	961	1.684	793	1.388

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan			
	Perkosaan	Pencabulan	Kekerasan Seksual	Persetubuhan terhadap Anak
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
A c e h	97	147	21	55
Sumatera Utara	83	281	132	256
Sumatera Barat	32	149	14	93
Riau	26	101	25	211
Jambi	22	28	11	37
Sumatera Selatan	64	66	20	107
Bengkulu	30	30	6	58
Lampung	42	84	30	127
Kep. Bangka Belitung	8	14	12	20
Kepulauan Riau	9	70	7	73
Metro Jaya	71	117	229	167
Jawa Barat	45	136	109	264
Jawa Tengah	31	72	47	168
DI Yogyakarta	6	38	49	18
Jawa Timur	62	135	134	313
Banten	12	12	32	46
Bali	14	13	23	35
Nusa Tenggara Barat	18	30	30	81
Nusa Tenggara Timur	76	132	45	250
Kalimantan Barat	15	38	15	111
Kalimantan Tengah	14	13	6	44
Kalimantan Selatan	20	23	1	49
Kalimantan Timur	13	54	24	85
Kalimantan Utara	8	57	7	23
Sulawesi Utara	44	186	48	196
Sulawesi Tengah	31	109	35	112
Sulawesi Selatan	77	246	143	177
Sulawesi Tenggara	44	65	31	98
Gorontalo	19	104	54	41
Sulawesi Barat	15	17	8	22
Maluku	33	38	26	92
Maluku Utara	44	46	10	86
Papua Barat	30	37	10	59
Papua	75	51	16	117
Indonesia	1.230	2.739	1.410	3.691

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)
A c e h	70	1.614	737	390
Sumatera Utara	1.050	8.837	9.529	2.736
Sumatera Barat	70	1.262	914	272
Riau	333	2.098	2.235	777
Jambi	72	706	957	125
Sumatera Selatan	796	1.291	4.150	974
Bengkulu	104	436	884	184
Lampung	546	1.183	3.274	648
Kep. Bangka Belitung	14	209	268	21
Kepulauan Riau	52	322	303	291
Metro Jaya	539	4.608	13.889	3.622
Jawa Barat	607	2.333	8.184	3.601
Jawa Tengah	150	1.032	1.856	266
DI Yogyakarta	31	626	419	77
Jawa Timur	507	3.269	5.335	1.623
Banten	99	224	1.410	188
Bali	31	754	371	116
Nusa Tenggara Barat	126	627	1.058	332
Nusa Tenggara Timur	40	1.577	364	106
Kalimantan Barat	56	736	655	240
Kalimantan Tengah	28	370	461	79
Kalimantan Selatan	75	536	711	106
Kalimantan Timur	32	445	554	357
Kalimantan Utara	6	225	92	12
Sulawesi Utara	29	1.246	208	50
Sulawesi Tengah	72	1.450	345	553
Sulawesi Selatan	346	6.276	1.774	671
Sulawesi Tenggara	28	349	231	22
Gorontalo	2	257	27	31
Sulawesi Barat	4	266	84	28
Maluku	12	722	74	24
Maluku Utara	1	172	18	10
Papua Barat	183	950	809	493
Papua	462	2.538	692	1.953
Indonesia	6.573	49.546	62.872	20.978

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang		Kejahatan terkait Narkotika dan Obat-Obatan	
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika	Menjual atau Mengedarkan Obat Keras/Bebas Terbatas tanpa Izin
(1)	(21)	(22)	(23)	(24)
Aceh	117	20	1.474	2
Sumatera Utara	1.095	180	5.306	2
Sumatera Barat	136	16	1.273	1
Riau	177	33	1.982	3
Jambi	59	7	737	2
Sumatera Selatan	176	23	1.990	1
Bengkulu	37	11	378	38
Lampung	160	19	1.399	47
Kep. Bangka Belitung	8	3	412	1
Kepulauan Riau	30	4	361	5
Metro Jaya	440	23	5.107	145
Jawa Barat	304	21	1.734	677
Jawa Tengah	50	9	1.662	333
DI Yogyakarta	39	2	391	240
Jawa Timur	284	51	3.981	1.055
Banten	42	5	557	218
Bali	52	6	812	17
Nusa Tenggara Barat	68	10	679	29
Nusa Tenggara Timur	427	52	37	8
Kalimantan Barat	42	14	824	2
Kalimantan Tengah	32	22	636	9
Kalimantan Selatan	31	22	1.478	57
Kalimantan Timur	22	4	1.686	49
Kalimantan Utara	8	6	290	4
Sulawesi Utara	253	15	73	128
Sulawesi Tengah	107	10	519	28
Sulawesi Selatan	901	56	2.423	160
Sulawesi Tenggara	126	12	382	-
Gorontalo	39	1	71	38
Sulawesi Barat	21	2	242	23
Maluku	144	9	149	2
Maluku Utara	41	2	129	8
Papua Barat	159	9	112	2
Papua	280	94	210	6
Indonesia	5.907	773	39.496	3.340

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Penadahan
(1)	(25)	(26)	(27)	(28)
A c e h	709	617	11	20
Sumatera Utara	3.947	4.042	13	5
Sumatera Barat	517	624	2	6
Riau	660	1.197	24	5
Jambi	369	568	33	6
Sumatera Selatan	1.515	1.480	11	3
Bengkulu	343	307	28	3
Lampung	1.675	1.215	11	1
Kep. Bangka Belitung	64	81	-	1
Kepulauan Riau	418	237	9	4
Metro Jaya	18.448	4.147	20	114
Jawa Barat	4.691	2.323	16	7
Jawa Tengah	1.005	812	37	16
DI Yogyakarta	1.068	517	3	6
Jawa Timur	3.332	1.864	29	45
Banten	762	364	7	3
Bali	381	375	15	4
Nusa Tenggara Barat	290	298	6	1
Nusa Tenggara Timur	709	443	15	3
Kalimantan Barat	227	399	22	6
Kalimantan Tengah	172	306	19	39
Kalimantan Selatan	258	343	12	21
Kalimantan Timur	244	324	24	7
Kalimantan Utara	54	70	2	-
Sulawesi Utara	608	634	8	2
Sulawesi Tengah	482	503	14	2
Sulawesi Selatan	3.996	1.897	12	4
Sulawesi Tenggara	310	212	19	2
Gorontalo	129	182	7	-
Sulawesi Barat	107	60	8	1
Maluku	154	105	5	-
Maluku Utara	78	52	8	1
Papua Barat	382	159	9	-
Papua	505	292	24	20
Indonesia	48.609	27.049	483	358

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kejahatan terhadap Keamanan Publik dan Negara			
	Ketertiban Umum			
	Terhadap Ketertiban Umum	Membahayakan Keamanan Umum	Penyalahgunaan Sajam, Senpi, dan Handak	Kecelakaan Lalu Lintas
(1)	(29)	(30)	(31)	(32)
A c e h	88	14	4	3.538
Sumatera Utara	406	96	168	6.666
Sumatera Barat	132	9	54	3.624
Riau	370	28	26	2.072
Jambi	40	8	43	1.562
Sumatera Selatan	129	20	336	2.335
Bengkulu	19	6	29	1.007
Lampung	72	7	126	1.771
Kep. Bangka Belitung	7	2	20	448
Kepulauan Riau	195	9	12	1.249
Metro Jaya	345	53	698	13.050
Jawa Barat	455	43	425	9.296
Jawa Tengah	61	18	244	31.419
DI Yogyakarta	105	14	79	6.868
Jawa Timur	366	71	418	31.926
Banten	88	4	49	1.642
Bali	25	5	13	7.467
Nusa Tenggara Barat	80	12	78	1.939
Nusa Tenggara Timur	96	9	9	1.467
Kalimantan Barat	21	6	43	1.154
Kalimantan Tengah	12	2	43	1.149
Kalimantan Selatan	25	12	263	931
Kalimantan Timur	29	15	81	989
Kalimantan Utara	13	3	8	285
Sulawesi Utara	76	33	190	2.842
Sulawesi Tengah	96	12	18	1.159
Sulawesi Selatan	225	58	385	7.813
Sulawesi Tenggara	41	4	115	1.593
Gorontalo	39	9	10	516
Sulawesi Barat	14	1	23	1.101
Maluku	40	5	33	442
Maluku Utara	3	-	7	185
Papua Barat	9	7	11	853
Papua	53	22	43	3.008
Indonesia	3.775	617	4.104	153.366

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Lanjutan Lampiran 11

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Lingkungan Hidup				
	Kejahatan		Kejahatan Perikanan (Illegal Fishing)	Kejahatan	
	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Illegal Logging)	Kejahatan Perkebunan		Pertambangan Mineral Dan Batubara (Illegal Mining)	Kejahatan Minyak Dan Gas (Migas)
(1)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
A c e h	12	4	3	35	35
Sumatera Utara	20	1.015	1	8	50
Sumatera Barat	17	1	2	19	29
Riau	63	23	4	26	39
Jambi	27	7	2	43	83
Sumatera Selatan	8	7	4	51	133
Bengkulu	6	9	3	8	11
Lampung	5	15	21	18	15
Kep. Bangka Belitung	2	-	1	96	24
Kepulauan Riau	14	-	1	9	7
Metro Jaya	12	-	18	39	61
Jawa Barat	5	5	16	25	36
Jawa Tengah	65	-	3	21	46
DI Yogyakarta	1	-	4	2	1
Jawa Timur	140	8	68	48	75
Banten	5	-	1	20	24
Bali	5	-	-	8	20
Nusa Tenggara Barat	8	-	7	13	7
Nusa Tenggara Timur	10	1	5	3	26
Kalimantan Barat	11	16	7	78	52
Kalimantan Tengah	34	26	6	40	22
Kalimantan Selatan	14	1	15	35	19
Kalimantan Timur	22	13	3	61	51
Kalimantan Utara	10	2	3	12	2
Sulawesi Utara	2	1	3	14	28
Sulawesi Tengah	10	1	10	19	14
Sulawesi Selatan	5	4	19	10	28
Sulawesi Tenggara	8	-	5	28	38
Gorontalo	3	1	1	22	15
Sulawesi Barat	-	-	1	5	5
Maluku	7	-	1	9	14
Maluku Utara	5	-	5	11	7
Papua Barat	4	-	1	3	-
Papua	-	-	-	-	15
Indonesia	560	1.160	244	839	1.032

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

DATA POTENSI DESA KEJADIAN KEJAHATAN



Lampiran 12 Jumlah Desa/Kelurahan, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Tahun		
	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6.508	6.514	6.516
Sumatera Utara	6.132	6.132	6.113
Sumatera Barat	1.275	1.287	1.286
Riau	1.875	1.876	1.870
Jambi	1.562	1.562	1.585
Sumatera Selatan	3.262	3.292	3.283
Bengkulu	1.514	1.514	1.514
Lampung	2.654	2.654	2.657
Kep. Bangka Belitung	391	393	393
Kepulauan Riau	416	428	430
DKI Jakarta	267	267	267
Jawa Barat	5.957	5.957	5.957
Jawa Tengah	8.559	8.562	8.563
DI Yogyakarta	438	438	438
Jawa Timur	8.496	8.496	8.494
Banten	1.552	1.552	1.552
Bali	716	716	717
Nusa Tenggara Barat	1.143	1.151	1.166
Nusa Tenggara Timur	3.353	3.450	3.538
Kalimantan Barat	2.137	2.148	2.157
Kalimantan Tengah	1.576	1.576	1.577
Kalimantan Selatan	2.008	2.007	2.015
Kalimantan Timur	1.038	1.046	1.052
Kalimantan Utara	482	482	484
Sulawesi Utara	1.838	1.840	1.838
Sulawesi Tengah	2.020	2.020	2.022
Sulawesi Selatan	3.049	3.051	3.060
Sulawesi Tenggara	2.354	2.309	2.292
Gorontalo	734	734	732
Sulawesi Barat	650	650	650
Maluku	1.240	1.248	1.262
Maluku Utara	1.196	1.203	1.209
Papua Barat	1.987	1.986	970
Papua Barat Daya	...	...	1.056
Papua	5.552	5.555	1.029
Papua Selatan	...	...	690
Papua Tengah	...	...	1.208
Papua Pegunungan	...	...	2.634
Indonesia	83.931	84.096	84.276

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Catatan: Desa pada tabel ini termasuk nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait.

Lampiran 13 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian
Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan,
2018, 2021, dan 2024

Jenis Kejahatan	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembunuhan	1.799	916	749	2,14	1,09	0,89
Penganiayaan	5.092	2.284	2.288	6,07	2,72	2,71
Perkosaan	2.851	1.209	1.011	3,40	1,44	1,20
Pencurian dengan Kekerasan	2.821	1.455	880	3,36	1,73	1,04
Pencurian	37.778	22.285	25.216	45,01	26,50	29,92
Penipuan/Penggelapan	8.620	4.284	4.100	10,27	5,09	4,86
Pembakaran	1.050	463	367	1,25	0,55	0,44
Perdagangan Orang	124	49	40	0,15	0,06	0,05
Penyalahgunaan/ Pengedaran Narkoba	12.579	9.019	7.160	14,99	10,72	8,50
Perjudian	12.842	7.473	6.143	15,30	8,89	7,29
Korupsi	...	369	222	...	0,44	0,26

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 14 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	33	21	12	0,51	0,32	0,18
Sumatera Utara	122	64	55	1,99	1,04	0,90
Sumatera Barat	43	20	20	3,37	1,55	1,56
Riau	72	28	13	3,84	1,49	0,70
Jambi	33	18	13	2,11	1,15	0,82
Sumatera Selatan	114	65	45	3,49	1,97	1,37
Bengkulu	21	11	8	1,39	0,73	0,53
Lampung	66	29	20	2,49	1,09	0,75
Kep. Bangka Belitung	8	9	6	2,05	2,29	1,53
Kepulauan Riau	5	5	5	1,20	1,17	1,16
DKI Jakarta	14	11	5	5,24	4,12	1,87
Jawa Barat	130	51	72	2,18	0,86	1,21
Jawa Tengah	93	37	71	1,09	0,43	0,83
DI Yogyakarta	13	7	5	2,97	1,60	1,14
Jawa Timur	150	90	63	1,77	1,06	0,74
Banten	38	14	8	2,45	0,90	0,52
Bali	9	12	2	1,26	1,68	0,28
Nusa Tenggara Barat	37	23	12	3,24	2,00	1,03
Nusa Tenggara Timur	82	57	39	2,45	1,65	1,10
Kalimantan Barat	29	32	15	1,36	1,49	0,70
Kalimantan Tengah	41	19	17	2,60	1,21	1,08
Kalimantan Selatan	58	40	31	2,89	1,99	1,54
Kalimantan Timur	32	20	11	3,08	1,91	1,05
Kalimantan Utara	4	3	1	0,83	0,62	0,21
Sulawesi Utara	57	29	21	3,10	1,58	1,14
Sulawesi Tengah	41	22	12	2,03	1,09	0,59
Sulawesi Selatan	95	46	44	3,12	1,51	1,44
Sulawesi Tenggara	39	25	22	1,66	1,08	0,96
Gorontalo	25	12	10	3,41	1,63	1,37
Sulawesi Barat	8	11	4	1,23	1,69	0,62
Maluku	15	9	8	1,21	0,72	0,63
Maluku Utara	21	5	9	1,76	0,42	0,74
Papua Barat	27	19	6	1,36	0,96	0,62
Papua Barat Daya	...	...	6	...	...	0,57
Papua	224	52	10	4,03	0,94	0,97
Papua Selatan	...	...	11	...	...	1,59
Papua Tengah	...	...	19	...	...	1,57
Papua Pegunungan	...	...	18	...	...	0,68
Indonesia	1.799	916	749	2,14	1,09	0,89

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 15 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	141	62	69	2,17	0,95	1,06
Sumatera Utara	295	162	156	4,81	2,64	2,55
Sumatera Barat	112	49	50	8,78	3,81	3,89
Riau	139	36	30	7,41	1,92	1,60
Jambi	81	30	20	5,19	1,92	1,26
Sumatera Selatan	173	77	75	5,30	2,34	2,28
Bengkulu	57	41	33	3,76	2,71	2,18
Lampung	157	53	56	5,92	2,00	2,11
Kep. Bangka Belitung	47	20	24	12,02	5,09	6,11
Kepulauan Riau	30	11	12	7,21	2,57	2,79
DKI Jakarta	30	27	19	11,24	10,11	7,12
Jawa Barat	598	251	226	10,04	4,21	3,79
Jawa Tengah	328	163	193	3,83	1,90	2,25
DI Yogyakarta	61	44	61	13,93	10,05	13,93
Jawa Timur	519	224	176	6,11	2,64	2,07
Banten	123	43	45	7,93	2,77	2,90
Bali	64	33	14	8,94	4,61	1,95
Nusa Tenggara Barat	134	97	77	11,72	8,43	6,60
Nusa Tenggara Timur	209	98	115	6,23	2,84	3,25
Kalimantan Barat	78	44	34	3,65	2,05	1,58
Kalimantan Tengah	66	24	30	4,19	1,52	1,90
Kalimantan Selatan	105	51	41	5,23	2,54	2,03
Kalimantan Timur	71	36	31	6,84	3,44	2,95
Kalimantan Utara	18	5	5	3,73	1,04	1,03
Sulawesi Utara	181	80	59	9,85	4,35	3,21
Sulawesi Tengah	138	59	73	6,83	2,92	3,61
Sulawesi Selatan	263	123	175	8,63	4,03	5,72
Sulawesi Tenggara	140	57	86	5,95	2,47	3,75
Gorontalo	105	44	46	14,31	5,99	6,28
Sulawesi Barat	22	10	11	3,38	1,54	1,69
Maluku	60	28	36	4,84	2,24	2,85
Maluku Utara	46	25	52	3,85	2,08	4,30
Papua Barat	62	28	16	3,12	1,41	1,65
Papua Barat Daya	...	...	13	...	...	1,23
Papua	439	149	28	7,91	2,68	2,72
Papua Selatan	...	...	23	...	...	3,33
Papua Tengah	...	...	32	...	...	2,65
Papua Pegunungan	...	...	46	...	...	1,75
Indonesia	5.092	2.284	2.288	6.07	2,72	2,71

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 16 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	93	42	28	1,43	0,64	0,43
Sumatera Utara	178	75	88	2,90	1,22	1,44
Sumatera Barat	106	60	56	8,31	4,66	4,35
Riau	95	25	16	5,07	1,33	0,86
Jambi	54	22	9	3,46	1,41	0,57
Sumatera Selatan	72	35	24	2,21	1,06	0,73
Bengkulu	39	33	19	2,58	2,18	1,25
Lampung	96	41	23	3,62	1,54	0,87
Kep. Bangka Belitung	19	7	7	4,86	1,78	1,78
Kepulauan Riau	13	11	14	3,13	2,57	3,26
DKI Jakarta	9	6	4	3,37	2,25	1,50
Jawa Barat	206	96	78	3,46	1,61	1,31
Jawa Tengah	159	67	88	1,86	0,78	1,03
DI Yogyakarta	15	11	16	3,42	2,51	3,65
Jawa Timur	210	99	63	2,47	1,17	0,74
Banten	52	27	37	3,35	1,74	2,38
Bali	9	7	3	1,26	0,98	0,42
Nusa Tenggara Barat	54	40	31	4,72	3,48	2,66
Nusa Tenggara Timur	111	80	64	3,31	2,32	1,81
Kalimantan Barat	65	42	21	3,04	1,96	0,97
Kalimantan Tengah	30	21	10	1,90	1,33	0,63
Kalimantan Selatan	44	16	13	2,19	0,80	0,65
Kalimantan Timur	45	26	25	4,34	2,49	2,38
Kalimantan Utara	14	7	4	2,90	1,45	0,83
Sulawesi Utara	95	42	35	5,17	2,28	1,90
Sulawesi Tengah	67	29	26	3,32	1,44	1,29
Sulawesi Selatan	90	31	36	2,95	1,02	1,18
Sulawesi Tenggara	51	21	24	2,17	0,91	1,05
Gorontalo	58	25	15	7,90	3,41	2,05
Sulawesi Barat	15	13	6	2,31	2,00	0,92
Maluku	40	22	24	3,23	1,76	1,90
Maluku Utara	35	20	18	2,93	1,66	1,49
Papua Barat	41	14	6	2,06	0,70	0,62
Papua Barat Daya	...	...	6	...	...	0,57
Papua	571	96	11	10,28	1,73	1,07
Papua Selatan	...	...	13	...	...	1,88
Papua Tengah	...	...	28	...	...	2,32
Papua Pegunungan	...	...	22	...	...	0,84
Indonesia	2.851	1.209	1.011	3,40	1,44	1,20

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 17 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	59	44	17	0,91	0,68	0,26
Sumatera Utara	182	141	70	2,97	2,30	1,15
Sumatera Barat	53	47	16	4,16	3,65	1,24
Riau	103	89	33	5,49	4,74	1,76
Jambi	85	27	17	5,44	1,73	1,07
Sumatera Selatan	323	119	62	9,90	3,61	1,89
Bengkulu	52	15	15	3,43	0,99	0,99
Lampung	233	102	66	8,78	3,84	2,48
Kep. Bangka Belitung	8	9	4	2,05	2,29	1,02
Kepulauan Riau	20	4	13	4,81	0,93	3,02
DKI Jakarta	38	32	15	14,23	11,99	5,62
Jawa Barat	342	172	125	5,74	2,89	2,10
Jawa Tengah	155	60	38	1,81	0,70	0,44
DI Yogyakarta	17	14	2	3,88	3,20	0,46
Jawa Timur	295	159	81	3,47	1,87	0,95
Banten	76	49	41	4,90	3,16	2,64
Bali	22	12	6	3,07	1,68	0,84
Nusa Tenggara Barat	76	30	12	6,65	2,61	1,03
Nusa Tenggara Timur	68	35	16	2,03	1,01	0,45
Kalimantan Barat	34	40	16	1,59	1,86	0,74
Kalimantan Tengah	20	7	4	1,27	0,44	0,25
Kalimantan Selatan	48	17	11	2,39	0,85	0,55
Kalimantan Timur	32	22	15	3,08	2,10	1,43
Kalimantan Utara	8	1	2	1,66	0,21	0,41
Sulawesi Utara	30	12	10	1,63	0,65	0,54
Sulawesi Tengah	24	37	11	1,19	1,83	0,54
Sulawesi Selatan	73	30	31	2,39	0,98	1,01
Sulawesi Tenggara	18	9	3	0,76	0,39	0,13
Gorontalo	9	9	2	1,23	1,23	0,27
Sulawesi Barat	4	4	2	0,62	0,62	0,31
Maluku	12	6	8	0,97	0,48	0,63
Maluku Utara	9	9	10	0,75	0,75	0,83
Papua Barat	34	24	11	1,71	1,21	1,13
Papua Barat Daya	...	...	7	...	...	0,66
Papua	259	68	25	4,66	1,22	2,43
Papua Selatan	...	...	13	...	...	1,88
Papua Tengah	...	...	23	...	...	1,90
Papua Pegunungan	...	...	27	...	...	1,03
Indonesia	2.821	1.455	880	3,36	1,73	1,04

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 18 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	2.225	982	1.180	34,19	15,08	18,11
Sumatera Utara	2.776	1.642	2.054	45,27	26,78	33,60
Sumatera Barat	779	597	612	61,10	46,39	47,59
Riau	1.169	667	850	62,35	35,55	45,45
Jambi	915	641	662	58,58	41,04	41,77
Sumatera Selatan	2.016	1.124	1.281	61,80	34,14	39,02
Bengkulu	743	449	513	49,08	29,66	33,88
Lampung	1.875	1.251	1.348	70,65	47,14	50,73
Kep. Bangka Belitung	206	146	175	52,69	37,15	44,53
Kepulauan Riau	159	91	115	38,22	21,26	26,74
DKI Jakarta	184	153	230	68,91	57,30	86,14
Jawa Barat	4.394	2.803	3.225	73,76	47,05	54,14
Jawa Tengah	4.068	2.185	2.420	47,53	25,52	28,26
DI Yogyakarta	294	202	249	67,12	46,12	56,85
Jawa Timur	3.919	2.385	2.519	46,13	28,07	29,66
Banten	1.104	723	781	71,13	46,59	50,32
Bali	254	159	158	35,47	22,21	22,04
Nusa Tenggara Barat	730	509	548	63,87	44,22	47,00
Nusa Tenggara Timur	863	437	542	25,74	12,67	15,32
Kalimantan Barat	808	502	555	37,81	23,37	25,73
Kalimantan Tengah	562	330	357	35,66	20,94	22,64
Kalimantan Selatan	926	567	466	46,12	28,25	23,13
Kalimantan Timur	456	347	405	43,93	33,17	38,50
Kalimantan Utara	134	87	93	27,80	18,05	19,21
Sulawesi Utara	705	382	430	38,36	20,76	23,39
Sulawesi Tengah	777	451	580	38,47	22,33	28,68
Sulawesi Selatan	1.309	744	835	42,93	24,39	27,29
Sulawesi Tenggara	733	297	407	31,14	12,86	17,76
Gorontalo	253	114	123	34,47	15,53	16,80
Sulawesi Barat	195	95	124	30,00	14,62	19,08
Maluku	266	132	213	21,45	10,58	16,88
Maluku Utara	352	203	248	29,43	16,87	20,51
Papua Barat	227	170	73	11,42	8,56	7,53
Papua Barat Daya	...	...	83	...	...	7,86
Papua	1.402	718	173	25,25	12,93	16,81
Papua Selatan	...	...	96	...	...	13,91
Papua Tengah	...	...	129	...	...	10,68
Papua Pegunungan	...	...	364	...	...	13,82
Indonesia	37.778	22.285	25.216	45,01	26,50	29,92

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 19 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	356	141	149	5,47	2,16	2,29
Sumatera Utara	512	211	203	8,35	3,44	3,32
Sumatera Barat	204	93	102	16,00	7,23	7,93
Riau	235	131	93	12,53	6,98	4,97
Jambi	180	79	68	11,52	5,06	4,29
Sumatera Selatan	287	142	136	8,80	4,31	4,14
Bengkulu	106	53	61	7,00	3,50	4,03
Lampung	422	194	178	15,90	7,31	6,70
Kep. Bangka Belitung	55	32	26	14,07	8,14	6,62
Kepulauan Riau	45	12	31	10,82	2,80	7,21
DKI Jakarta	62	43	30	23,22	16,10	11,24
Jawa Barat	1.187	620	509	19,93	10,41	8,54
Jawa Tengah	986	578	532	11,52	6,75	6,21
DI Yogyakarta	121	70	90	27,63	15,98	20,55
Jawa Timur	1.100	645	556	12,95	7,59	6,55
Banten	292	115	145	18,81	7,41	9,34
Bali	54	37	19	7,54	5,17	2,65
Nusa Tenggara Barat	178	130	125	15,57	11,29	10,72
Nusa Tenggara Timur	154	62	53	4,59	1,80	1,50
Kalimantan Barat	153	97	75	7,16	4,52	3,48
Kalimantan Tengah	72	37	38	4,57	2,35	2,41
Kalimantan Selatan	172	66	77	8,57	3,29	3,82
Kalimantan Timur	91	52	72	8,77	4,97	6,84
Kalimantan Utara	28	10	10	5,81	2,07	2,07
Sulawesi Utara	138	60	51	7,51	3,26	2,77
Sulawesi Tengah	143	51	69	7,08	2,52	3,41
Sulawesi Selatan	458	166	245	15,02	5,44	8,01
Sulawesi Tenggara	157	49	55	6,67	2,12	2,40
Gorontalo	56	31	49	7,63	4,22	6,69
Sulawesi Barat	62	17	23	9,54	2,62	3,54
Maluku	49	34	30	3,95	2,72	2,38
Maluku Utara	52	21	21	4,35	1,75	1,74
Papua Barat	55	28	8	2,77	1,41	0,82
Papua Barat Daya	...	...	10	...	...	0,95
Papua	398	177	25	7,17	3,19	2,43
Papua Selatan	...	...	5	...	...	0,72
Papua Tengah	...	...	41	...	...	3,39
Papua Pegunungan	...	...	90	...	...	3,42
Indonesia	8.620	4.284	4.100	10,27	5,09	4,86

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 20 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	32	19	14	0,49	0,29	0,21
Sumatera Utara	61	16	16	0,99	0,26	0,26
Sumatera Barat	27	5	7	2,12	0,39	0,54
Riau	60	26	11	3,20	1,39	0,59
Jambi	28	19	9	1,79	1,22	0,57
Sumatera Selatan	54	28	19	1,66	0,85	0,58
Bengkulu	8	19	3	0,53	1,25	0,20
Lampung	20	5	8	0,75	0,19	0,30
Kep. Bangka Belitung	2	2	5	0,51	0,51	1,27
Kepulauan Riau	13	5	10	3,13	1,17	2,33
DKI Jakarta	3	4	2	1,12	1,50	0,75
Jawa Barat	57	14	13	0,96	0,24	0,22
Jawa Tengah	37	12	16	0,43	0,14	0,19
DI Yogyakarta	5	3	2	1,14	0,68	0,46
Jawa Timur	65	37	27	0,77	0,44	0,32
Banten	6	8	4	0,39	0,52	0,26
Bali	9	2	3	1,26	0,28	0,42
Nusa Tenggara Barat	13	12	6	1,14	1,04	0,51
Nusa Tenggara Timur	100	65	16	2,98	1,88	0,45
Kalimantan Barat	38	16	11	1,78	0,74	0,51
Kalimantan Tengah	34	13	15	2,16	0,82	0,95
Kalimantan Selatan	32	16	18	1,59	0,80	0,89
Kalimantan Timur	12	10	8	1,16	0,96	0,76
Kalimantan Utara	10	4	2	2,07	0,83	0,41
Sulawesi Utara	11	11	6	0,60	0,60	0,33
Sulawesi Tengah	16	9	6	0,79	0,45	0,30
Sulawesi Selatan	28	13	11	0,92	0,43	0,36
Sulawesi Tenggara	15	3	4	0,64	0,13	0,17
Gorontalo	9	6	3	1,23	0,82	0,41
Sulawesi Barat	5	-	-	0,77	0,00	0,00
Maluku	19	7	11	1,53	0,56	0,87
Maluku Utara	22	2	4	1,84	0,17	0,33
Papua Barat	17	11	6	0,86	0,55	0,62
Papua Barat Daya	...	...	6	...	...	0,57
Papua	182	41	6	3,28	0,74	0,58
Papua Selatan	...	...	3	...	...	0,43
Papua Tengah	...	...	35	...	...	2,90
Papua Pegunungan	...	...	21	...	...	0,80
Indonesia	1.050	463	367	1,25	0,55	0,44

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 21 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	3	-	1	0,05	-	0,02
Sumatera Utara	5	2	1	0,08	0,03	0,02
Sumatera Barat	1	1	2	0,08	0,08	0,16
Riau	6	-	1	0,32	-	0,05
Jambi	3	-	-	0,19	-	-
Sumatera Selatan	6	-	-	0,18	-	-
Bengkulu	1	-	-	0,07	-	-
Lampung	6	1	-	0,23	0,04	-
Kep. Bangka Belitung	4	1	1	1,02	0,25	0,25
Kepulauan Riau	2	1	2	0,48	0,23	0,47
DKI Jakarta	-	2	-	-	0,75	-
Jawa Barat	17	19	6	0,29	0,32	0,10
Jawa Tengah	3	1	2	0,04	0,01	0,02
DI Yogyakarta	-	-	1	-	-	0,23
Jawa Timur	14	7	6	0,16	0,08	0,07
Banten	6	2	2	0,39	0,13	0,13
Bali	-	-	1	-	-	0,14
Nusa Tenggara Barat	3	1	1	0,26	0,09	0,09
Nusa Tenggara Timur	27	2	-	0,81	0,06	-
Kalimantan Barat	-	3	2	-	0,14	0,09
Kalimantan Tengah	1	1	-	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	1	1	-	0,05	0,05	-
Kalimantan Timur	1	-	1	0,10	-	0,10
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	6	2	3	0,33	0,11	0,16
Sulawesi Tengah	-	-	1	-	-	0,05
Sulawesi Selatan	2	1	5	0,07	0,03	0,16
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	1	-	-	0,14	-
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-
Maluku	1	-	1	0,08	-	0,08
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-
Papua Barat	-	-	-	-	-	-
Papua Barat Daya	...	...	-	...	...	-
Papua	5	-	-	0,09	-	-
Papua Selatan	...	...	-	...	...	-
Papua Tengah	...	...	-	...	...	-
Papua Pegunungan	...	...	-	...	...	-
Indonesia	124	49	40	0,15	0,06	0,05

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 22 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	1.212	562	403	18,62	8,63	6,18
Sumatera Utara	1.795	1.373	1.257	29,27	22,39	20,56
Sumatera Barat	481	411	350	37,73	31,93	27,22
Riau	683	546	466	36,43	29,10	24,92
Jambi	387	298	255	24,78	19,08	16,09
Sumatera Selatan	783	596	383	24,00	18,10	11,67
Bengkulu	115	138	69	7,60	9,11	4,56
Lampung	466	341	210	17,56	12,85	7,90
Kep. Bangka Belitung	112	86	77	28,64	21,88	19,59
Kepulauan Riau	63	29	27	15,14	6,78	6,28
DKI Jakarta	92	89	53	34,46	33,33	19,85
Jawa Barat	952	631	510	15,98	10,59	8,56
Jawa Tengah	495	316	311	5,78	3,69	3,63
DI Yogyakarta	73	72	93	16,67	16,44	21,23
Jawa Timur	1.480	1.165	756	17,42	13,71	8,90
Banten	259	184	156	16,69	11,86	10,05
Bali	65	57	47	9,08	7,96	6,56
Nusa Tenggara Barat	216	232	273	18,90	20,16	23,41
Nusa Tenggara Timur	9	12	3	0,27	0,35	0,08
Kalimantan Barat	241	165	150	11,28	7,68	6,95
Kalimantan Tengah	229	160	94	14,53	10,15	5,96
Kalimantan Selatan	675	340	199	33,62	16,94	9,88
Kalimantan Timur	301	253	234	29,00	24,19	22,24
Kalimantan Utara	94	57	45	19,50	11,83	9,30
Sulawesi Utara	56	29	19	3,05	1,58	1,03
Sulawesi Tengah	316	257	220	15,64	12,72	10,88
Sulawesi Selatan	506	340	251	16,60	11,14	8,20
Sulawesi Tenggara	84	79	88	3,57	3,42	3,84
Gorontalo	43	21	19	5,86	2,86	2,60
Sulawesi Barat	60	67	49	9,23	10,31	7,54
Maluku	28	20	20	2,26	1,60	1,58
Maluku Utara	28	22	7	2,34	1,83	0,58
Papua Barat	34	26	3	1,71	1,31	0,31
Papua Barat Daya	...	...	8	...	...	0,76
Papua	146	45	42	2,63	0,81	4,08
Papua Selatan	...	...	-	...	...	-
Papua Tengah	...	...	8	...	...	0,66
Papua Pegunungan	...	...	5	...	...	0,19
Indonesia	12.579	9.019	7.160	14,99	10,72	8,50

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 23 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	598	283	245	9,19	4,34	3,76
Sumatera Utara	1.947	1.227	987	31,75	20,01	16,15
Sumatera Barat	458	276	243	35,92	21,45	18,90
Riau	510	284	268	27,20	15,14	14,33
Jambi	297	158	150	19,01	10,12	9,46
Sumatera Selatan	662	386	375	20,29	11,73	11,42
Bengkulu	107	54	22	7,07	3,57	1,45
Lampung	546	246	285	20,57	9,27	10,73
Kep. Bangka Belitung	60	28	38	15,35	7,12	9,67
Kepulauan Riau	48	14	8	11,54	3,27	1,86
DKI Jakarta	35	25	23	13,11	9,36	8,61
Jawa Barat	776	574	510	13,03	9,64	8,56
Jawa Tengah	1.153	711	560	13,47	8,30	6,54
DI Yogyakarta	74	29	58	16,89	6,62	13,24
Jawa Timur	1.295	692	416	15,24	8,15	4,90
Banten	231	131	185	14,88	8,44	11,92
Bali	67	45	27	9,36	6,28	3,77
Nusa Tenggara Barat	205	168	189	17,94	14,60	16,21
Nusa Tenggara Timur	389	198	247	11,60	5,74	6,98
Kalimantan Barat	416	230	144	19,47	10,71	6,68
Kalimantan Tengah	217	106	47	13,77	6,73	2,98
Kalimantan Selatan	230	118	68	11,45	5,88	3,37
Kalimantan Timur	145	111	84	13,97	10,61	7,98
Kalimantan Utara	44	30	17	9,13	6,22	3,51
Sulawesi Utara	300	158	83	16,32	8,59	4,52
Sulawesi Tengah	297	122	113	14,70	6,04	5,59
Sulawesi Selatan	458	263	207	15,02	8,62	6,76
Sulawesi Tenggara	235	106	63	9,98	4,59	2,75
Gorontalo	115	76	46	15,67	10,35	6,28
Sulawesi Barat	60	31	24	9,23	4,77	3,69
Maluku	125	168	85	10,08	13,46	6,74
Maluku Utara	93	75	46	7,78	6,23	3,80
Papua Barat	61	82	28	3,07	4,13	2,89
Papua Barat Daya	...	...	21	...	...	1,99
Papua	588	268	43	10,59	4,82	4,18
Papua Selatan	...	...	33	...	...	4,78
Papua Tengah	...	...	115	...	...	9,52
Papua Pegunungan	...	...	40	...	...	1,52
Indonesia	12.842	7.473	6.143	15,30	8,89	7,29

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 24 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2021 dan 2024

Provinsi	Jumlah		Persentase	
	2021	2024	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	9	4	0,14	0,06
Sumatera Utara	17	6	0,28	0,10
Sumatera Barat	11	11	0,85	0,86
Riau	12	2	0,64	0,11
Jambi	9	6	0,58	0,38
Sumatera Selatan	13	7	0,39	0,21
Bengkulu	11	4	0,73	0,26
Lampung	4	4	0,15	0,15
Kep. Bangka Belitung	5	5	1,27	1,27
Kepulauan Riau	2	2	0,47	0,47
DKI Jakarta	2	1	0,75	0,37
Jawa Barat	27	9	0,45	0,15
Jawa Tengah	8	15	0,09	0,18
DI Yogyakarta	1	3	0,23	0,68
Jawa Timur	27	15	0,32	0,18
Banten	1	2	0,06	0,13
Bali	6	2	0,84	0,28
Nusa Tenggara Barat	5	5	0,43	0,43
Nusa Tenggara Timur	14	7	0,41	0,20
Kalimantan Barat	8	2	0,37	0,09
Kalimantan Tengah	4	-	0,25	0,00
Kalimantan Selatan	7	3	0,35	0,15
Kalimantan Timur	7	4	0,67	0,38
Kalimantan Utara	3	1	0,62	0,21
Sulawesi Utara	9	3	0,49	0,16
Sulawesi Tengah	21	3	1,04	0,15
Sulawesi Selatan	19	5	0,62	0,16
Sulawesi Tenggara	6	6	0,26	0,26
Gorontalo	3	1	0,41	0,14
Sulawesi Barat	3	2	0,46	0,31
Maluku	8	8	0,64	0,63
Maluku Utara	4	5	0,33	0,41
Papua Barat	2	3	0,10	0,31
Papua Barat Daya	...	-	...	0,00
Papua	81	5	1,46	0,49
Papua Selatan	...	1	...	-
Papua Tengah	...	51	...	4,00
Papua Pegunungan	...	9	...	-
Indonesia	369	222	0,44	0,26

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

DATA POTENSI DESA KONFLIK MASSAL



Lampiran 25 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018, 2021, dan 2024

Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal						
1. Ada kejadian	3.147	1.553	2.031	3,75	1,85	2,41
2. Tidak ada kejadian	80.784	82.543	82.245	96,25	98,15	97,59
Total desa/kelurahan	83.931	84.096	84.276	100,00	100,00	100,00
B. Jenis Perkelahian Massal						
1. Antarkelompok warga	1.674	845	920	1,99	1,00	1,09
2. Warga antardesa/kelurahan	1.078	542	643	1,28	0,64	0,76
3. Warga dengan aparat keamanan	91	45	55	0,11	0,05	0,07
4. Warga dengan aparat pemerintah	132	77	44	0,16	0,09	0,05
5. Antarpelajar/mahasiswa	548	188	575	0,65	0,22	0,68
6. Antarsuku	112	34	52	0,13	0,04	0,06
7. Lainnya	171	120	161	0,20	0,14	0,19
C. Penyelesaian Perkelahian Massal						
1. Diselesaikan secara damai	2.961	1.483	1.915	94,09	95,49	94,29
2. Tidak dapat diselesaikan	186	70	116	5,91	4,51	5,71
Total desa/kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal	3.147	1.553	2.031	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 26 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	90	34	46	1,38	0,52	0,71
Sumatera Utara	176	84	122	2,87	1,37	2,00
Sumatera Barat	80	36	45	6,27	2,80	3,50
Riau	51	13	9	2,72	0,69	0,48
Jambi	41	24	43	2,62	1,54	2,71
Sumatera Selatan	37	20	56	1,13	0,61	1,71
Bengkulu	28	9	14	1,85	0,59	0,92
Lampung	44	6	27	1,66	0,23	1,02
Kep. Bangka Belitung	3	5	13	0,77	1,27	3,31
Kepulauan Riau	4	-	-	0,96	-	0,00
DKI Jakarta	55	47	50	20,60	17,60	18,73
Jawa Barat	291	158	218	4,89	2,65	3,66
Jawa Tengah	233	95	205	2,72	1,11	2,39
DI Yogyakarta	14	9	13	3,20	2,05	2,97
Jawa Timur	185	104	129	2,18	1,22	1,52
Banten	58	15	52	3,74	0,97	3,35
Bali	5	3	3	0,70	0,42	0,42
Nusa Tenggara Barat	81	22	50	7,09	1,91	4,29
Nusa Tenggara Timur	205	129	156	6,11	3,74	4,41
Kalimantan Barat	30	8	14	1,40	0,37	0,65
Kalimantan Tengah	13	17	11	0,83	1,08	0,70
Kalimantan Selatan	21	13	4	1,05	0,65	0,20
Kalimantan Timur	17	15	12	1,64	1,43	1,14
Kalimantan Utara	5	4	2	1,04	0,83	0,41
Sulawesi Utara	111	49	56	6,04	2,66	3,05
Sulawesi Tengah	98	36	27	4,85	1,78	1,34
Sulawesi Selatan	130	78	93	4,26	2,56	3,04
Sulawesi Tenggara	84	40	61	3,57	1,73	2,66
Gorontalo	18	10	18	2,45	1,36	2,46
Sulawesi Barat	15	1	5	2,31	0,15	0,77
Maluku	199	161	144	16,05	12,90	11,41
Maluku Utara	164	93	137	13,71	7,73	11,33
Papua Barat	114	75	22	5,74	3,78	2,27
Papua Barat Daya	...	...	47	...	...	4,45
Papua	447	140	36	8,05	2,52	3,50
Papua Selatan	...	...	39	...	...	5,65
Papua Tengah	...	...	21	...	...	1,74
Papua Pegunungan	...	...	31	...	...	1,18
Indonesia	3.147	1.553	2.031	3,75	1,85	2,41

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 27 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar	Warga	Warga dengan	Warga dengan
	Kelompok	Antar	Aparat	Aparat
	Warga	Desa	Keamanan	Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43	39	4	8
Sumatera Utara	95	64	3	9
Sumatera Barat	27	14	1	-
Riau	17	18	3	3
Jambi	7	22	-	2
Sumatera Selatan	16	11	2	-
Bengkulu	8	8	-	1
Lampung	21	16	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	-	-
Kepulauan Riau	1	1	1	-
DKI Jakarta	32	18	-	-
Jawa Barat	122	60	4	8
Jawa Tengah	107	99	1	2
DI Yogyakarta	5	1	-	-
Jawa Timur	82	58	7	3
Banten	25	20	1	2
Bali	5	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4
Kalimantan Barat	16	9	-	1
Kalimantan Tengah	8	4	-	-
Kalimantan Selatan	9	12	3	2
Kalimantan Timur	7	3	-	-
Kalimantan Utara	2	1	-	-
Sulawesi Utara	65	50	4	6
Sulawesi Tengah	46	50	-	-
Sulawesi Selatan	71	39	2	1
Sulawesi Tenggara	34	46	1	-
Gorontalo	4	11	1	1
Sulawesi Barat	13	2	1	-
Maluku	117	80	10	13
Maluku Utara	71	85	6	11
Papua Barat	85	28	8	8
Papua	353	83	21	44
Indonesia	1.674	1.078	91	132

Sumber: Statistik Podes 2018

Lanjutan Lampiran 27

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	10	2	6
Sumatera Utara	25	-	12
Sumatera Barat	41	1	5
Riau	18	-	2
Jambi	11	1	4
Sumatera Selatan	9	-	4
Bengkulu	10	-	2
Lampung	6	-	4
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kepulauan Riau	1	-	-
DKI Jakarta	18	-	-
Jawa Barat	118	5	21
Jawa Tengah	36	-	15
DI Yogyakarta	5	1	2
Jawa Timur	18	3	28
Banten	14	1	4
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	12	-	-
Nusa Tenggara Timur	37	5	10
Kalimantan Barat	3	-	3
Kalimantan Tengah	1	-	-
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	2
Sulawesi Utara	9	-	5
Sulawesi Tengah	13	-	2
Sulawesi Selatan	33	2	4
Sulawesi Tenggara	15	-	4
Gorontalo	3	-	-
Sulawesi Barat	2	-	-
Maluku	29	1	3
Maluku Utara	26	1	2
Papua Barat	8	12	4
Papua	9	76	20
Indonesia	548	112	171

Sumber: Statistik Podes 2018

Lampiran 28 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar	Warga	Warga dengan	Warga dengan
	Kelompok	Antar	Aparat	Aparat
	Warga	Desa	Keamanan	Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	12	18	-	1
Sumatera Utara	38	17	2	3
Sumatera Barat	14	13	-	3
Riau	9	3	-	-
Jambi	5	14	-	-
Sumatera Selatan	9	5	1	2
Bengkulu	3	1	1	-
Lampung	5	1	1	1
Kep. Bangka Belitung	4	-	1	1
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	24	7	1	1
Jawa Barat	83	45	2	1
Jawa Tengah	50	29	1	-
DI Yogyakarta	6	2	-	-
Jawa Timur	49	34	3	2
Banten	6	9	-	-
Bali	1	2	-	-
Nusa Tenggara Barat	9	14	-	2
Nusa Tenggara Timur	78	38	4	4
Kalimantan Barat	5	1	-	-
Kalimantan Tengah	14	1	1	-
Kalimantan Selatan	8	5	-	-
Kalimantan Timur	8	4	-	-
Kalimantan Utara	2	1	-	1
Sulawesi Utara	24	31	-	-
Sulawesi Tengah	17	16	1	-
Sulawesi Selatan	39	36	1	3
Sulawesi Tenggara	24	19	-	1
Gorontalo	7	6	-	2
Sulawesi Barat	1	-	-	-
Maluku	87	77	6	16
Maluku Utara	54	40	1	5
Papua Barat	56	23	6	6
Papua	94	30	12	22
Indonesia	845	542	45	77

Sumber: Statistik Podes 2021

Lanjutan Lampiran 28

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	7	-	2
Sumatera Utara	15	-	17
Sumatera Barat	7	-	4
Riau	-	1	2
Jambi	5	-	-
Sumatera Selatan	5	-	1
Bengkulu	3	-	1
Lampung	1	-	1
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	13	-	5
Jawa Barat	37	1	19
Jawa Tengah	10	-	10
DI Yogyakarta	1	-	-
Jawa Timur	11	1	18
Banten	-	-	-
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	4	-	1
Nusa Tenggara Timur	14	5	8
Kalimantan Barat	1	-	1
Kalimantan Tengah	-	-	1
Kalimantan Selatan	2	-	-
Kalimantan Timur	3	1	2
Kalimantan Utara	-	-	-
Sulawesi Utara	3	-	2
Sulawesi Tengah	5	-	4
Sulawesi Selatan	7	-	1
Sulawesi Tenggara	2	1	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	1
Maluku	15	2	3
Maluku Utara	11	-	2
Papua Barat	3	5	4
Papua	3	17	10
Indonesia	188	34	120

Sumber: Statistik Podes 2021

Lampiran 29 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2024

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar	Warga	Warga dengan	Warga dengan
	Kelompok	Antar	Aparat	Aparat
	Warga	Desa	Keamanan	Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	16	18	-	-
Sumatera Utara	44	42	2	2
Sumatera Barat	14	6	-	-
Riau	5	-	-	-
Jambi	6	19	-	1
Sumatera Selatan	13	7	1	-
Bengkulu	3	4	-	1
Lampung	7	6	1	-
Kep. Bangka Belitung	3	6	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	20	16	1	1
Jawa Barat	67	36	2	4
Jawa Tengah	88	60	3	-
DI Yogyakarta	5	3	1	-
Jawa Timur	64	31	2	-
Banten	18	9	-	-
Bali	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	16	16	1	2
Nusa Tenggara Timur	97	51	5	2
Kalimantan Barat	7	4	-	-
Kalimantan Tengah	4	1	4	-
Kalimantan Selatan	2	1	-	-
Kalimantan Timur	1	1	1	-
Kalimantan Utara	-	-	1	-
Sulawesi Utara	29	34	-	1
Sulawesi Tengah	9	16	1	1
Sulawesi Selatan	41	32	2	1
Sulawesi Tenggara	23	32	1	1
Gorontalo	9	8	3	3
Sulawesi Barat	2	1	-	-
Maluku	79	64	3	8
Maluku Utara	78	72	5	4
Papua Barat	17	6	1	-
Papua Barat Daya	36	9	1	1
Papua	28	6	4	4
Papua Selatan	27	10	1	-
Papua Barat	14	8	6	5
Papua Pegunungan	25	8	2	2
Indonesia	920	643	55	44

Sumber: Statistik Podes 2024

Lanjutan Lampiran 29

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
A c e h	14	1	5
Sumatera Utara	36	1	18
Sumatera Barat	32	-	1
Riau	4	-	-
Jambi	19	-	2
Sumatera Selatan	29	-	11
Bengkulu	7	-	1
Lampung	19	1	1
Kep. Bangka Belitung	4	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	31	2	1
Jawa Barat	114	-	28
Jawa Tengah	65	-	11
DI Yogyakarta	3	1	3
Jawa Timur	20	1	26
Banten	26	4	5
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	21	-	4
Nusa Tenggara Timur	14	1	9
Kalimantan Barat	3	-	-
Kalimantan Tengah	2	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	2
Kalimantan Timur	7	-	2
Kalimantan Utara	2	-	-
Sulawesi Utara	3	-	1
Sulawesi Tengah	2	1	1
Sulawesi Selatan	27	1	4
Sulawesi Tenggara	14	1	-
Gorontalo	-	-	1
Sulawesi Barat	2	-	-
Maluku	24	5	7
Maluku Utara	14	3	7
Papua Barat	1	-	2
Papua Barat Daya	6	2	2
Papua	3	2	1
Papua Selatan	2	1	3
Papua Barat	3	10	2
Papua Pegunungan	2	14	-
Indonesia	575	52	161

Sumber: Statistik Podes 2024

Lampiran 30 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar	Warga	Warga dengan	Warga dengan
	Kelompok	Antar	Aparat	Aparat
	Warga	Desa	Keamanan	Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,66	0,60	0,06	0,12
Sumatera Utara	1,55	1,04	0,05	0,15
Sumatera Barat	2,12	1,10	0,08	-
Riau	0,91	0,96	0,16	0,16
Jambi	0,45	1,41	-	0,13
Sumatera Selatan	0,49	0,34	0,06	-
Bengkulu	0,53	0,53	-	0,07
Lampung	0,79	0,60	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,26	-	-	-
Kepulauan Riau	0,24	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	11,99	6,74	-	-
Jawa Barat	2,05	1,01	0,07	0,13
Jawa Tengah	1,25	1,16	0,01	0,02
DI Yogyakarta	1,14	0,23	-	-
Jawa Timur	0,97	0,68	0,08	0,04
Banten	1,61	1,29	0,06	0,13
Bali	0,70	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,15	4,20	0,26	0,17
Nusa Tenggara Timur	3,67	2,33	0,09	0,12
Kalimantan Barat	0,75	0,42	-	0,05
Kalimantan Tengah	0,51	0,25	-	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,60	0,15	0,10
Kalimantan Timur	0,67	0,29	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	-
Sulawesi Utara	3,54	2,72	0,22	0,33
Sulawesi Tengah	2,28	2,48	-	-
Sulawesi Selatan	2,33	1,28	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,44	1,95	0,04	-
Gorontalo	0,54	1,50	0,14	0,14
Sulawesi Barat	2,00	0,31	0,15	-
Maluku	9,44	6,45	0,81	1,05
Maluku Utara	5,94	7,11	0,50	0,92
Papua Barat	4,28	1,41	0,40	0,40
Papua	6,36	1,49	0,38	0,79
Indonesia	1,99	1,28	0,11	0,16

Sumber: Statistik Podes 2018

Lanjutan Lampiran 30

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antarpelajar/ mahasiswa	Antarsuku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,15	0,03	0,09
Sumatera Utara	0,41	-	0,20
Sumatera Barat	3,22	0,08	0,39
Riau	0,96	-	0,11
Jambi	0,70	0,06	0,26
Sumatera	0,28	-	0,12
Bengkulu	0,66	-	0,13
Lampung	0,23	-	0,15
Kep. Bangka	0,26	0,26	-
Kepulauan Riau	0,24	-	-
DKI Jakarta	6,74	-	-
Jawa Barat	1,98	0,08	0,35
Jawa Tengah	0,42	-	0,18
DI Yogyakarta	1,14	0,23	0,46
Jawa Timur	0,21	0,04	0,33
Banten	0,90	0,06	0,26
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara	1,05	-	-
Nusa Tenggara	1,10	0,15	0,30
Kalimantan Barat	0,14	-	0,14
Kalimantan	0,06	-	-
Kalimantan	0,05	-	0,05
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,41
Sulawesi Utara	0,49	-	0,27
Sulawesi Tengah	0,64	-	0,10
Sulawesi Selatan	1,08	0,07	0,13
Sulawesi	0,64	-	0,17
Gorontalo	0,41	-	-
Sulawesi Barat	0,31	-	-
Maluku	2,34	0,08	0,24
Maluku Utara	2,17	0,08	0,17
Papua Barat	0,40	0,60	0,20
Papua	0,16	1,37	0,36
Indonesia	0,65	0,13	0,20

Sumber: Statistik Podes 2018

Lampiran 31 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2021

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar	Warga	Warga dengan	Warga dengan
	Kelompok	Antar	Aparat	Aparat
	Warga	Desa	Keamanan	Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,18	0,28	-	0,02
Sumatera Utara	0,62	0,28	0,03	0,05
Sumatera Barat	1,09	1,01	-	0,23
Riau	0,48	0,16	-	-
Jambi	0,32	0,90	-	-
Sumatera Selatan	0,27	0,15	0,03	0,06
Bengkulu	0,20	0,07	0,07	-
Lampung	0,19	0,04	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	1,02	-	0,25	0,25
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	8,99	2,62	0,37	0,37
Jawa Barat	1,39	0,76	0,03	0,02
Jawa Tengah	0,58	0,34	0,01	-
DI Yogyakarta	1,37	0,46	-	-
Jawa Timur	0,58	0,40	0,04	0,02
Banten	0,39	0,58	-	-
Bali	0,14	0,28	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,78	1,22	-	0,17
Nusa Tenggara Timur	2,26	1,10	0,12	0,12
Kalimantan Barat	0,23	0,05	-	-
Kalimantan Tengah	0,89	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,40	0,25	-	-
Kalimantan Timur	0,76	0,38	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	0,21
Sulawesi Utara	1,30	1,68	-	-
Sulawesi Tengah	0,84	0,79	0,05	-
Sulawesi Selatan	1,28	1,18	0,03	0,10
Sulawesi Tenggara	1,04	0,82	-	0,04
Gorontalo	0,95	0,82	-	0,27
Sulawesi Barat	0,15	-	-	-
Maluku	6,97	6,17	0,48	1,28
Maluku Utara	4,49	3,33	0,08	0,42
Papua Barat	2,82	1,16	0,30	0,30
Papua	1,69	0,54	0,22	0,40
Indonesia	1,00	0,64	0,05	0,09

Sumber: Statistik Podes 2021

Lanjutan Lampiran 31

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antarpelajar/ mahasiswa	Antarsuku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,11	-	0,03
Sumatera Utara	0,24	-	0,28
Sumatera Barat	0,54	-	0,31
Riau	-	0,05	0,11
Jambi	0,32	-	-
Sumatera Selatan	0,15	-	0,03
Bengkulu	0,20	-	0,07
Lampung	0,04	-	0,04
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	4,87	-	1,87
Jawa Barat	0,62	0,02	0,32
Jawa Tengah	0,12	-	0,12
DI Yogyakarta	0,23	-	-
Jawa Timur	0,13	0,01	0,21
Banten	-	-	-
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,35	-	0,09
Nusa Tenggara Timur	0,41	0,14	0,23
Kalimantan Barat	0,05	-	0,05
Kalimantan Tengah	-	-	0,06
Kalimantan Selatan	0,10	-	-
Kalimantan Timur	0,29	0,10	0,19
Kalimantan Utara	-	-	-
Sulawesi Utara	0,16	-	0,11
Sulawesi Tengah	0,25	-	0,20
Sulawesi Selatan	0,23	-	0,03
Sulawesi Tenggara	0,09	0,04	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	0,15
Maluku	1,20	0,16	0,24
Maluku Utara	0,91	-	0,17
Papua Barat	0,15	0,25	0,20
Papua	0,05	0,31	0,18
Indonesia	0,22	0,04	0,14

Sumber: Statistik Podes 2021

Lampiran 32 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2024

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal Yang Pernah Terjadi			
	Antar	Warga	Warga dengan	Warga dengan
	Kelompok	Antar	Aparat	Aparat
	Warga	Desa	Keamanan	Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	0,25	0,28	-	-
Sumatera Utara	0,72	0,69	0,03	0,03
Sumatera Barat	1,09	0,47	-	-
Riau	0,27	-	-	-
Jambi	0,38	1,20	-	0,06
Sumatera Selatan	0,40	0,21	0,03	-
Bengkulu	0,20	0,26	-	0,07
Lampung	0,26	0,23	0,04	-
Kep. Bangka Belitung	0,76	1,53	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-	-
DKI Jakarta	7,49	5,99	0,37	0,37
Jawa Barat	1,12	0,60	0,03	0,07
Jawa Tengah	1,03	0,70	0,04	-
DI Yogyakarta	1,14	0,68	0,23	-
Jawa Timur	0,75	0,36	0,02	-
Banten	1,16	0,58	-	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,37	1,37	0,09	0,17
Nusa Tenggara Timur	2,74	1,44	0,14	0,06
Kalimantan Barat	0,32	0,19	-	-
Kalimantan Tengah	0,25	0,06	0,25	-
Kalimantan Selatan	0,10	0,05	-	-
Kalimantan Timur	0,10	0,10	0,10	-
Kalimantan Utara	-	-	0,21	-
Sulawesi Utara	1,58	1,85	-	0,05
Sulawesi Tengah	0,45	0,79	0,05	0,05
Sulawesi Selatan	1,34	1,05	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,00	1,40	0,04	0,04
Gorontalo	1,23	1,09	0,41	0,41
Sulawesi Barat	0,31	0,15	-	-
Maluku	6,26	5,07	0,24	0,63
Maluku Utara	6,45	5,96	0,41	0,33
Papua Barat	1,75	0,62	0,10	-
Papua Barat Daya	3,41	0,85	0,09	0,09
Papua	2,72	0,58	0,39	0,39
Papua Selatan	3,91	1,45	0,14	-
Papua Barat	1,16	0,66	0,50	0,41
Papua Pegunungan	0,95	0,30	0,08	0,08
Indonesia	1,09	0,76	0,07	0,05

Sumber: Statistik Podes 2024

Lanjutan Lampiran 32

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antarpelajar/ mahasiswa	Antarsuku	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,21	0,02	0,08
Sumatera Utara	0,59	0,02	0,29
Sumatera Barat	2,49	-	0,08
Riau	0,21	-	-
Jambi	1,20	-	0,13
Sumatera Selatan	0,88	-	0,34
Bengkulu	0,46	-	0,07
Lampung	0,72	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	1,02	-	-
Kepulauan Riau	-	-	-
DKI Jakarta	11,61	0,75	0,37
Jawa Barat	1,91	-	0,47
Jawa Tengah	0,76	-	0,13
DI Yogyakarta	0,68	0,23	0,68
Jawa Timur	0,24	0,01	0,31
Banten	1,68	0,26	0,32
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,80	-	0,34
Nusa Tenggara Timur	0,40	0,03	0,25
Kalimantan Barat	0,14	-	-
Kalimantan Tengah	0,13	-	-
Kalimantan Selatan	-	-	0,10
Kalimantan Timur	0,67	-	0,19
Kalimantan Utara	0,41	-	-
Sulawesi Utara	0,16	-	0,05
Sulawesi Tengah	0,10	0,05	0,05
Sulawesi Selatan	0,88	0,03	0,13
Sulawesi Tenggara	0,61	0,04	-
Gorontalo	-	-	0,14
Sulawesi Barat	0,31	-	-
Maluku	1,90	0,40	0,55
Maluku Utara	1,16	0,25	0,58
Papua Barat	0,10	-	0,21
Papua Barat Daya	0,57	0,19	0,19
Papua	0,29	0,19	0,10
Papua Selatan	0,29	0,14	0,43
Papua Tengah	0,25	0,83	0,17
Papua Pegunungan	0,08	0,53	-
Indonesia	0,68	0,06	0,19

Sumber: Statistik Podes 2024

Lampiran 33 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	70	33	45	77,78	97,06	97,83
Sumatera Utara	170	82	112	96,59	97,62	91,80
Sumatera Barat	72	34	43	90,00	94,44	95,56
Riau	44	13	9	86,27	100,00	100,00
Jambi	38	23	43	92,68	95,83	100,00
Sumatera Selatan	33	19	54	89,19	95,00	96,43
Bengkulu	28	9	12	100,00	100,00	85,71
Lampung	41	6	26	93,18	100,00	96,30
Kep. Bangka Belitung	3	5	13	100,00	100,00	100,00
Kepulauan Riau	4	-	-	100,00	-	-
DKI Jakarta	52	45	50	94,55	95,74	100,00
Jawa Barat	280	146	206	96,22	92,41	94,50
Jawa Tengah	226	94	198	96,58	98,95	96,59
DI Yogyakarta	14	8	13	100,00	88,89	100,00
Jawa Timur	179	101	124	96,76	97,12	96,12
Banten	56	15	50	96,55	100,00	96,15
Bali	4	3	3	80,00	100,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	78	22	48	96,30	100,00	96,00
Nusa Tenggara Timur	184	117	145	89,76	90,70	92,95
Kalimantan Barat	28	8	14	93,33	100,00	100,00
Kalimantan Tengah	14	16	8	100,00	94,12	72,73
Kalimantan Selatan	18	13	4	85,71	100,00	100,00
Kalimantan Timur	18	14	12	105,88	93,33	100,00
Kalimantan Utara	4	4	2	80,00	100,00	100,00
Sulawesi Utara	106	45	53	95,50	91,84	94,64
Sulawesi Tengah	96	36	26	97,96	100,00	96,30
Sulawesi Selatan	118	78	89	90,77	100,00	95,70
Sulawesi Tenggara	80	39	60	95,24	97,50	98,36
Gorontalo	18	10	18	100,00	100,00	100,00
Sulawesi Barat	14	1	5	93,33	100,00	100,00
Maluku	185	153	132	92,96	95,03	91,67
Maluku Utara	157	89	129	95,73	95,70	94,16
Papua Barat	106	72	20	92,98	96,00	90,91
Papua Barat Daya	...	...	40	...	...	85,11
Papua	426	130	32	95,30	92,86	88,89
Papua Selatan	...	...	36	...	...	92,31
Papua Tengah	...	...	17	...	...	80,95
Papua Pegunungan	...	...	24	...	...	77,42
Indonesia	2.964	1.483	1.915	94,13	95,49	94,29

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

DATA POTENSI DESA UPAYA MENJAGA KEAMANAN



Lampiran 34 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018, 2021, dan 2024

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	46.752	45.600	45.487	55,70	54,22	53,97
Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	39.585	40.043	42.089	47,16	47,62	49,94
Menambah Jumlah Anggota Hansip	20.869	13.374	18.117	24,86	15,90	21,50
Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat	52.240	58.728	58.665	62,24	69,83	69,61
Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga	44.451	46.014	46.583	52,96	54,72	55,27

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 35 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun	Membentuk Regu	Menambah
	Poskamling	Kamling	Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.329	1.404	614
Sumatera Utara	1.903	1.396	594
Sumatera Barat	971	723	351
Riau	1.196	985	416
Jambi	1.112	749	426
Sumatera Selatan	2.243	2.003	917
Bengkulu	1.051	888	323
Lampung	2.198	2.071	863
Kep. Bangka Belitung	245	209	128
Kepulauan Riau	194	181	108
DKI Jakarta	190	199	125
Jawa Barat	5.409	4.709	2 375
Jawa Tengah	5.999	5.140	2 511
DI Yogyakarta	392	347	222
Jawa Timur	6.321	5.245	3 086
Banten	1.280	1.035	602
Bali	395	380	123
Nusa Tenggara Barat	916	724	400
Nusa Tenggara Timur	1.085	1.244	867
Kalimantan Barat	963	838	521
Kalimantan Tengah	1.042	911	464
Kalimantan Selatan	1.243	799	425
Kalimantan Timur	744	594	267
Kalimantan Utara	241	177	101
Sulawesi Utara	1.167	1.136	429
Sulawesi Tengah	1.168	1.155	518
Sulawesi Selatan	1.896	1.325	825
Sulawesi Tenggara	1.055	901	522
Gorontalo	254	281	255
Sulawesi Barat	358	230	168
Maluku	252	316	226
Maluku Utara	248	348	317
Papua Barat	251	295	185
Papua	441	647	595
Indonesia	46.752	39.585	20.869

Sumber: Statistik Podes 2018

Lanjutan Lampiran 35

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	5.083	2.356
Sumatera Utara	2.516	1.987
Sumatera Barat	962	866
Riau	1.292	1.071
Jambi	1.029	887
Sumatera Selatan	2.201	1.994
Bengkulu	1.089	829
Lampung	2.114	1.974
Kep. Bangka Belitung	304	191
Kepulauan Riau	309	205
DKI Jakarta	242	226
Jawa Barat	5.134	4.970
Jawa Tengah	6.437	6.337
DI Yogyakarta	376	388
Jawa Timur	6.614	5.824
Banten	1.258	1.197
Bali	556	426
Nusa Tenggara Barat	634	799
Nusa Tenggara Timur	979	1.440
Kalimantan Barat	1.208	854
Kalimantan Tengah	1.028	735
Kalimantan Selatan	1.240	979
Kalimantan Timur	742	579
Kalimantan Utara	286	212
Sulawesi Utara	1.636	1.230
Sulawesi Tengah	1.347	974
Sulawesi Selatan	1.623	1.606
Sulawesi Tenggara	947	947
Gorontalo	500	213
Sulawesi Barat	314	290
Maluku	647	415
Maluku Utara	723	395
Papua Barat	239	334
Papua	631	721
Indonesia	52.240	44.451

Sumber: Statistik Podes 2018

Lampiran 36 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun	Membentuk Regu	Menambah
	Poskamling	Kamling	Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1.921	1.061	281
Sumatera Utara	2.006	1.424	425
Sumatera Barat	822	621	167
Riau	1.055	918	244
Jambi	962	795	239
Sumatera Selatan	2.229	2.039	490
Bengkulu	681	731	184
Lampung	1.959	1.951	393
Kep. Bangka Belitung	186	21	49
Kepulauan Riau	179	184	103
DKI Jakarta	205	211	90
Jawa Barat	5.218	4.750	1.623
Jawa Tengah	6.447	5.960	2.063
DI Yogyakarta	375	355	161
Jawa Timur	6.588	5.759	2.266
Banten	1.246	1.049	318
Bali	383	401	120
Nusa Tenggara Barat	823	761	321
Nusa Tenggara Timur	1.137	1.326	383
Kalimantan Barat	1.318	1.087	403
Kalimantan Tengah	983	839	258
Kalimantan Selatan	1.015	656	181
Kalimantan Timur	770	630	218
Kalimantan Utara	249	190	49
Sulawesi Utara	1.254	1.193	401
Sulawesi Tengah	1.151	1.051	270
Sulawesi Selatan	1.571	1.094	362
Sulawesi Tenggara	912	691	221
Gorontalo	248	277	100
Sulawesi Barat	329	236	94
Maluku	407	494	297
Maluku Utara	256	312	183
Papua Barat	258	281	104
Papua	457	495	313
Indonesia	45.600	40.043	13.374

Sumber: Statistik Podes 2021

Lanjutan Lampiran 36

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	5.692	2.237
Sumatera Utara	3.356	1.951
Sumatera Barat	908	852
Riau	1.477	1.141
Jambi	1.196	965
Sumatera Selatan	2.659	2.177
Bengkulu	1.107	627
Lampung	2.378	2.030
Kep. Bangka Belitung	329	154
Kepulauan Riau	330	205
DKI Jakarta	250	253
Jawa Barat	5.557	5.239
Jawa Tengah	7.333	7.087
DI Yogyakarta	405	418
Jawa Timur	7.186	6.703
Banten	1.357	1.355
Bali	627	436
Nusa Tenggara Barat	694	846
Nusa Tenggara Timur	1.220	1.314
Kalimantan Barat	1.473	1.005
Kalimantan Tengah	1.156	720
Kalimantan Selatan	1.347	912
Kalimantan Timur	851	626
Kalimantan Utara	339	243
Sulawesi Utara	1.680	1.209
Sulawesi Tengah	1.487	878
Sulawesi Selatan	1.882	1.478
Sulawesi Tenggara	1.058	776
Gorontalo	592	268
Sulawesi Barat	359	255
Maluku	764	485
Maluku Utara	762	346
Papua Barat	379	328
Papua	538	495
Indonesia	58.728	46.014

Sumber: Statistik Podes 2018

Lampiran 37 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2024

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2.239	1.323	747
Sumatera Utara	1.794	1.522	889
Sumatera Barat	717	598	235
Riau	1.264	1.042	396
Jambi	1.012	835	280
Sumatera Selatan	2.112	2.060	575
Bengkulu	739	713	255
Lampung	1.894	2.027	482
Kep. Bangka Belitung	178	233	66
Kepulauan Riau	171	186	118
DKI Jakarta	243	224	115
Jawa Barat	5.337	5.036	1.768
Jawa Tengah	6.413	6.295	2.786
DI Yogyakarta	390	378	231
Jawa Timur	6.669	6.123	2.940
Banten	1.262	1.115	388
Bali	441	464	149
Nusa Tenggara Barat	812	780	301
Nusa Tenggara Timur	900	1.213	521
Kalimantan Barat	1.265	1.099	454
Kalimantan Tengah	1.055	957	411
Kalimantan Selatan	1.083	870	509
Kalimantan Timur	832	683	261
Kalimantan Utara	253	194	88
Sulawesi Utara	1.120	1.078	330
Sulawesi Tengah	1.158	1.139	425
Sulawesi Selatan	1.464	1.112	639
Sulawesi Tenggara	891	678	337
Gorontalo	239	315	169
Sulawesi Barat	248	190	106
Maluku	442	526	385
Maluku Utara	228	329	228
Papua Barat	148	175	110
Papua Barat Daya	103	104	65
Papua	150	198	176
Papua Selatan	97	157	81
Papua Tengah	71	92	74
Papua Pegunungan	53	26	27
Indonesia	45.487	42.089	18.117

Sumber: Statistik Podes 2024

Lanjutan Lampiran 37

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	5.720	2.447
Sumatera Utara	3.146	1.873
Sumatera Barat	916	856
Riau	1.498	1.193
Jambi	1.279	1.014
Sumatera Selatan	2.619	2.147
Bengkulu	1.161	654
Lampung	2.408	2.114
Kep. Bangka Belitung	340	164
Kepulauan Riau	357	212
DKI Jakarta	255	255
Jawa Barat	5.570	5.336
Jawa Tengah	7.384	7.179
DI Yogyakarta	393	426
Jawa Timur	7.221	6.769
Banten	1.360	1.352
Bali	635	473
Nusa Tenggara Barat	717	867
Nusa Tenggara Timur	1.083	1.270
Kalimantan Barat	1.509	1.027
Kalimantan Tengah	1.249	770
Kalimantan Selatan	1.434	915
Kalimantan Timur	893	664
Kalimantan Utara	343	214
Sulawesi Utara	1.622	1.155
Sulawesi Tengah	1.437	920
Sulawesi Selatan	1.748	1.449
Sulawesi Tenggara	936	730
Gorontalo	655	266
Sulawesi Barat	280	210
Maluku	800	523
Maluku Utara	790	358
Papua Barat	178	193
Papua Barat Daya	160	147
Papua	175	230
Papua Selatan	136	93
Papua Tengah	52	81
Papua Pegunungan	206	37
Indonesia	58.665	46.583

Sumber: Statistik Podes 2024

Lampiran 38 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun	Membentuk Regu	Menambah
	Poskamling	Kamling	Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	35,79	21,57	9,43
Sumatera Utara	31,03	22,77	9,69
Sumatera Barat	76,16	56,71	27,53
Riau	63,79	52,53	22,19
Jambi	71,19	47,95	27,27
Sumatera Selatan	68,76	61,40	28,11
Bengkulu	69,42	58,65	21,33
Lampung	82,82	78,03	32,52
Kep. Bangka Belitung	62,66	53,45	32,74
Kepulauan Riau	46,63	43,51	25,96
DKI Jakarta	71,16	74,53	46,82
Jawa Barat	90,80	79,05	39,87
Jawa Tengah	70,09	60,05	29,34
DI Yogyakarta	89,50	79,22	50,68
Jawa Timur	74,40	61,73	36,32
Banten	82,47	66,69	38,79
Bali	55,17	53,07	17,18
Nusa Tenggara Barat	80,14	63,34	35,00
Nusa Tenggara Timur	32,36	37,10	25,86
Kalimantan Barat	45,06	39,21	24,38
Kalimantan Tengah	66,12	57,80	29,44
Kalimantan Selatan	61,90	39,79	21,17
Kalimantan Timur	71,68	57,23	25,72
Kalimantan Utara	50,00	36,72	20,95
Sulawesi Utara	63,49	61,81	23,34
Sulawesi Tengah	57,82	57,18	25,64
Sulawesi Selatan	62,18	43,46	27,06
Sulawesi Tenggara	44,82	38,28	22,18
Gorontalo	34,60	38,28	34,74
Sulawesi Barat	55,08	35,38	25,85
Maluku	20,32	25,48	18,23
Maluku Utara	20,74	29,10	26,51
Papua Barat	12,63	14,85	9,31
Papua	7,94	11,65	10,72
Indonesia	55,70	47,16	24,86

Sumber: Statistik Podes 2018

Lanjutan Lampiran 38

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	78,10	36,20
Sumatera Utara	41,03	32,40
Sumatera Barat	75,45	67,92
Riau	68,91	57,12
Jambi	65,88	56,79
Sumatera Selatan	67,47	61,13
Bengkulu	71,93	54,76
Lampung	79,65	74,38
Kep. Bangka Belitung	77,75	48,85
Kepulauan Riau	74,28	49,28
DKI Jakarta	90,64	84,64
Jawa Barat	86,18	83,43
Jawa Tengah	75,21	74,04
DI Yogyakarta	85,84	88,58
Jawa Timur	77,85	68,55
Banten	81,06	77,13
Bali	77,65	59,50
Nusa Tenggara Barat	55,47	69,90
Nusa Tenggara Timur	29,20	42,95
Kalimantan Barat	56,53	39,96
Kalimantan Tengah	65,23	46,64
Kalimantan Selatan	61,75	48,75
Kalimantan Timur	71,48	55,78
Kalimantan Utara	59,34	43,98
Sulawesi Utara	89,01	66,92
Sulawesi Tengah	66,68	48,22
Sulawesi Selatan	53,23	52,67
Sulawesi Tenggara	40,23	40,23
Gorontalo	68,12	29,02
Sulawesi Barat	48,31	44,62
Maluku	52,18	33,47
Maluku Utara	60,45	33,03
Papua Barat	12,03	16,81
Papua	11,37	12,99
Indonesia	62,24	52,96

Sumber: Statistik Podes 2018

Lampiran 39 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2021

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun	Membentuk Regu	Menambah
	Poskamling	Kamling	Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,49	16,29	4,31
Sumatera Utara	32,71	23,22	6,93
Sumatera Barat	63,87	48,25	12,98
Riau	56,24	48,93	13,01
Jambi	61,59	50,90	15,30
Sumatera Selatan	67,71	61,94	14,88
Bengkulu	44,98	48,28	12,15
Lampung	73,81	73,51	14,81
Kep. Bangka Belitung	47,33	56,23	12,47
Kepulauan Riau	41,82	42,99	24,07
DKI Jakarta	76,78	79,03	33,71
Jawa Barat	87,59	79,74	27,25
Jawa Tengah	75,30	69,61	24,09
DI Yogyakarta	85,62	81,05	36,76
Jawa Timur	77,54	67,78	26,67
Banten	80,28	67,59	20,49
Bali	53,49	56,01	16,76
Nusa Tenggara Barat	71,50	66,12	27,89
Nusa Tenggara Timur	32,96	38,43	11,10
Kalimantan Barat	61,36	50,61	18,76
Kalimantan Tengah	62,37	53,24	16,37
Kalimantan Selatan	50,57	32,69	9,02
Kalimantan Timur	73,61	60,23	20,84
Kalimantan Utara	51,66	39,42	10,17
Sulawesi Utara	68,15	64,84	21,79
Sulawesi Tengah	56,98	52,03	13,37
Sulawesi Selatan	51,49	35,86	11,86
Sulawesi Tenggara	39,50	29,93	9,57
Gorontalo	33,79	37,74	13,62
Sulawesi Barat	50,62	36,31	14,46
Maluku	32,61	39,58	23,80
Maluku Utara	21,28	25,94	15,21
Papua Barat	12,99	14,15	5,24
Papua	8,23	8,91	5,63
Indonesia	54,22	47,62	15,90

Sumber: Statistik Podes 2021

Lanjutan Lampiran 39

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	87,38	34,34
Sumatera Utara	54,73	31,82
Sumatera Barat	70,55	66,20
Riau	78,73	60,82
Jambi	76,57	61,78
Sumatera Selatan	80,77	66,13
Bengkulu	73,12	41,41
Lampung	89,60	76,49
Kep. Bangka Belitung	83,72	39,19
Kepulauan Riau	77,10	47,90
DKI Jakarta	93,63	94,76
Jawa Barat	93,29	87,95
Jawa Tengah	85,65	82,77
DI Yogyakarta	92,47	95,43
Jawa Timur	84,58	78,90
Banten	87,44	87,31
Bali	87,57	60,89
Nusa Tenggara Barat	60,30	73,50
Nusa Tenggara Timur	35,36	38,09
Kalimantan Barat	68,58	46,79
Kalimantan Tengah	73,35	45,69
Kalimantan Selatan	67,12	45,44
Kalimantan Timur	81,36	59,85
Kalimantan Utara	70,33	50,41
Sulawesi Utara	91,30	65,71
Sulawesi Tengah	73,61	43,47
Sulawesi Selatan	61,68	48,44
Sulawesi Tenggara	45,82	33,61
Gorontalo	80,65	36,51
Sulawesi Barat	55,23	39,23
Maluku	61,22	38,86
Maluku Utara	63,34	28,76
Papua Barat	19,08	16,52
Papua	9,68	8,91
Indonesia	69,83	54,72

Sumber: Statistik Podes 2021

Lampiran 40 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2024

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan		
	Membangun	Membentuk Regu	Menambah
	Poskamling	Kamling	Anggota Hansip
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34,36	20,30	11,46
Sumatera Utara	29,35	24,90	14,54
Sumatera Barat	55,75	46,50	18,27
Riau	67,59	55,72	21,18
Jambi	63,85	52,68	17,67
Sumatera Selatan	64,33	62,75	17,51
Bengkulu	48,81	47,09	16,84
Lampung	71,28	76,29	18,14
Kep. Bangka Belitung	45,29	59,29	16,79
Kepulauan Riau	39,77	43,26	27,44
DKI Jakarta	91,01	83,90	43,07
Jawa Barat	89,59	84,54	29,68
Jawa Tengah	74,89	73,51	32,54
DI Yogyakarta	89,04	86,30	52,74
Jawa Timur	78,51	72,09	34,61
Banten	81,31	71,84	25,00
Bali	61,51	64,71	20,78
Nusa Tenggara Barat	69,64	66,90	25,81
Nusa Tenggara Timur	25,44	34,28	14,73
Kalimantan Barat	58,65	50,95	21,05
Kalimantan Tengah	66,90	60,68	26,06
Kalimantan Selatan	53,75	43,18	25,26
Kalimantan Timur	79,09	64,92	24,81
Kalimantan Utara	52,27	40,08	18,18
Sulawesi Utara	60,94	58,65	17,95
Sulawesi Tengah	57,27	56,33	21,02
Sulawesi Selatan	47,84	36,34	20,88
Sulawesi Tenggara	38,87	29,58	14,70
Gorontalo	32,65	43,03	23,09
Sulawesi Barat	38,15	29,23	16,31
Maluku	35,02	41,68	30,51
Maluku Utara	18,86	27,21	18,86
Papua Barat	15,26	18,04	11,34
Papua Barat Daya	9,75	9,85	6,16
Papua	14,58	19,24	17,10
Papua Selatan	14,06	22,75	11,74
Papua Tengah	5,88	7,62	6,13
Papua Pegunungan	2,01	0,99	1,03
Indonesia	53,97	49,94	21,50

Sumber: Statistik Podes 2024

Lanjutan Lampiran 40

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan	
	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(5)	(6)
Aceh	87,78	37,55
Sumatera Utara	51,46	30,64
Sumatera Barat	71,23	66,56
Riau	80,11	63,80
Jambi	80,69	63,97
Sumatera Selatan	79,77	65,40
Bengkulu	76,68	43,20
Lampung	90,63	79,56
Kep. Bangka Belitung	86,51	41,73
Kepulauan Riau	83,02	49,30
DKI Jakarta	95,51	95,51
Jawa Barat	93,50	89,58
Jawa Tengah	86,23	83,84
DI Yogyakarta	89,73	97,26
Jawa Timur	85,01	79,69
Banten	87,63	87,11
Bali	88,56	65,97
Nusa Tenggara Barat	61,49	74,36
Nusa Tenggara Timur	30,61	35,90
Kalimantan Barat	69,96	47,61
Kalimantan Tengah	79,20	48,83
Kalimantan Selatan	71,17	45,41
Kalimantan Timur	84,89	63,12
Kalimantan Utara	70,87	44,21
Sulawesi Utara	88,25	62,84
Sulawesi Tengah	71,07	45,50
Sulawesi Selatan	57,12	47,35
Sulawesi Tenggara	40,84	31,85
Gorontalo	89,48	36,34
Sulawesi Barat	43,08	32,31
Maluku	63,39	41,44
Maluku Utara	65,34	29,61
Papua Barat	18,35	19,90
Papua Barat Daya	15,15	13,92
Papua	17,01	22,35
Papua Selatan	19,71	13,48
Papua Tengah	4,30	6,71
Papua Pegunungan	7,82	1,40
Indonesia	69,61	55,27

Sumber: Statistik Podes 2024

Lampiran 41 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) Menurut Provinsi, 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	2.329	1.921	2.239	35,79	29,49	34,36
Sumatera Utara	1.903	2.006	1.794	31,03	32,71	29,35
Sumatera Barat	971	822	717	76,16	63,87	55,75
Riau	1.196	1.055	1.264	63,79	56,24	67,59
Jambi	1.112	962	1.012	71,19	61,59	63,85
Sumatera Selatan	2.243	2.229	2.112	68,76	67,71	64,33
Bengkulu	1.051	681	739	69,42	44,98	48,81
Lampung	2.198	1.959	1.894	82,82	73,81	71,28
Kep. Bangka Belitung	245	186	178	62,66	47,33	45,29
Kepulauan Riau	194	179	171	46,63	41,82	39,77
DKI Jakarta	190	205	243	71,16	76,78	91,01
Jawa Barat	5.409	5.218	5.337	90,80	87,59	89,59
Jawa Tengah	5.999	6.447	6.413	70,09	75,30	74,89
DI Yogyakarta	392	375	390	89,50	85,62	89,04
Jawa Timur	6.321	6.588	6.669	74,40	77,54	78,51
Banten	1.280	1.246	1.262	82,47	80,28	81,31
Bali	395	383	441	55,17	53,49	61,51
Nusa Tenggara Barat	916	823	812	80,14	71,50	69,64
Nusa Tenggara Timur	1.085	1.137	900	32,36	32,96	25,44
Kalimantan Barat	963	1.318	1.265	45,06	61,36	58,65
Kalimantan Tengah	1.042	983	1.055	66,12	62,37	66,90
Kalimantan Selatan	1.243	1.015	1.083	61,90	50,57	53,75
Kalimantan Timur	744	770	832	71,68	73,61	79,09
Kalimantan Utara	241	249	253	50,00	51,66	52,27
Sulawesi Utara	1.167	1.254	1.120	63,49	68,15	60,94
Sulawesi Tengah	1.168	1.151	1.158	57,82	56,98	57,27
Sulawesi Selatan	1.896	1.571	1.464	62,18	51,49	47,84
Sulawesi Tenggara	1.055	912	891	44,82	39,50	38,87
Gorontalo	254	248	239	34,60	33,79	32,65
Sulawesi Barat	358	329	248	55,08	50,62	38,15
Maluku	252	407	442	20,32	32,61	35,02
Maluku Utara	248	256	228	20,74	21,28	18,86
Papua Barat	251	258	148	12,63	12,99	15,26
Papua Barat Daya	...	...	103	...	...	9,75
Papua	441	457	150	7,94	8,23	14,58
Papua Selatan	...	...	97	...	...	14,06
Papua Tengah	...	...	71	...	...	5,88
Papua Pegunungan	...	...	53	...	...	2,01
Indonesia	46.752	45.600	45.487	55,70	54,22	53,97

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 42 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, Tahun 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	1.404	1.061	1.323	21,57	16,29	20,30
Sumatera Utara	1.396	1.424	1.522	22,77	23,22	24,90
Sumatera Barat	723	621	598	56,71	48,25	46,50
Riau	985	918	1.042	52,53	48,93	55,72
Jambi	749	795	835	47,95	50,90	52,68
Sumatera Selatan	2.003	2.039	2.060	61,40	61,94	62,75
Bengkulu	888	731	713	58,65	48,28	47,09
Lampung	2.071	1.951	2.027	78,03	73,51	76,29
Kep. Bangka Belitung	209	221	233	53,45	56,23	59,29
Kepulauan Riau	181	184	186	43,51	42,99	43,26
DKI Jakarta	199	211	224	74,53	79,03	83,90
Jawa Barat	4.709	4.750	5.036	79,05	79,74	84,54
Jawa Tengah	5.140	5.960	6.295	60,05	69,61	73,51
DI Yogyakarta	347	355	378	79,22	81,05	86,30
Jawa Timur	5.245	5.759	6.123	61,73	67,78	72,09
Banten	1.035	1.049	1.115	66,69	67,59	71,84
Bali	380	401	464	53,07	56,01	64,71
Nusa Tenggara Barat	724	761	780	63,34	66,12	66,90
Nusa Tenggara Timur	1.244	1.326	1.213	37,10	38,43	34,28
Kalimantan Barat	838	1.087	1.099	39,21	50,61	50,95
Kalimantan Tengah	911	839	957	57,80	53,24	60,68
Kalimantan Selatan	799	656	870	39,79	32,69	43,18
Kalimantan Timur	594	630	683	57,23	60,23	64,92
Kalimantan Utara	177	190	194	36,72	39,42	40,08
Sulawesi Utara	1.136	1.193	1.078	61,81	64,84	58,65
Sulawesi Tengah	1.155	1.051	1.139	57,18	52,03	56,33
Sulawesi Selatan	1.325	1.094	1.112	43,46	35,86	36,34
Sulawesi Tenggara	901	691	678	38,28	29,93	29,58
Gorontalo	281	277	315	38,28	37,74	43,03
Sulawesi Barat	230	236	190	35,38	36,31	29,23
Maluku	316	494	526	25,48	39,58	41,68
Maluku Utara	348	312	329	29,10	25,94	27,21
Papua Barat	295	281	175	14,85	14,15	18,04
Papua Barat Daya	...	...	104	...	...	9,85
Papua	647	495	198	11,65	8,91	19,24
Papua Selatan	...	...	157	...	...	22,75
Papua Tengah	...	...	92	...	...	7,62
Papua Pegunungan	...	...	26	...	...	0,99
Indonesia	39.585	40.043	42.089	47,16	47,62	49,94

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 43 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/ Linmas Menurut Provinsi, Tahun 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	614	281	747	9,43	4,31	11,46
Sumatera Utara	594	425	889	9,69	6,93	14,54
Sumatera Barat	351	167	235	27,53	12,98	18,27
Riau	416	244	396	22,19	13,01	21,18
Jambi	426	239	280	27,27	15,30	17,67
Sumatera Selatan	917	490	575	28,11	14,88	17,51
Bengkulu	323	184	255	21,33	12,15	16,84
Lampung	863	393	482	32,52	14,81	18,14
Kep. Bangka Belitung	128	49	66	32,74	12,47	16,79
Kepulauan Riau	108	103	118	25,96	24,07	27,44
DKI Jakarta	125	90	115	46,82	33,71	43,07
Jawa Barat	2.375	1.623	1.768	39,87	27,25	29,68
Jawa Tengah	2.511	2.063	2.786	29,34	24,09	32,54
DI Yogyakarta	222	161	231	50,68	36,76	52,74
Jawa Timur	3.086	2.266	2.940	36,32	26,67	34,61
Banten	602	318	388	38,79	20,49	25,00
Bali	123	120	149	17,18	16,76	20,78
Nusa Tenggara Barat	400	321	301	35,00	27,89	25,81
Nusa Tenggara Timur	867	383	521	25,86	11,10	14,73
Kalimantan Barat	521	403	454	24,38	18,76	21,05
Kalimantan Tengah	464	258	411	29,44	16,37	26,06
Kalimantan Selatan	425	181	509	21,17	9,02	25,26
Kalimantan Timur	267	218	261	25,72	20,84	24,81
Kalimantan Utara	101	49	88	20,95	10,17	18,18
Sulawesi Utara	429	401	330	23,34	21,79	17,95
Sulawesi Tengah	518	270	425	25,64	13,37	21,02
Sulawesi Selatan	825	362	639	27,06	11,86	20,88
Sulawesi Tenggara	522	221	337	22,18	9,57	14,70
Gorontalo	255	100	169	34,74	13,62	23,09
Sulawesi Barat	168	94	106	25,85	14,46	16,31
Maluku	226	297	385	18,23	23,80	30,51
Maluku Utara	317	183	228	26,51	15,21	18,86
Papua Barat	185	104	110	9,31	5,24	11,34
Papua Barat Daya	...	...	65	...	...	6,16
Papua	595	313	176	10,72	5,63	17,10
Papua Selatan	...	...	81	...	...	11,74
Papua Tengah	...	...	74	...	...	6,13
Papua Pegunungan	...	...	27	...	...	1,03
Indonesia	20.869	13.374	18.117	24,86	15,90	21,50

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 44 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan) Menurut Provinsi, Tahun 2018, 2021, dan 2024

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2018	2021	2024	2018	2021	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5.083	5.692	5.720	78,10	87,38	87,78
Sumatera Utara	2.516	3.356	3.146	41,03	54,73	51,46
Sumatera Barat	962	908	916	75,45	70,55	71,23
Riau	1.292	1.477	1.498	68,91	78,73	80,11
Jambi	1.029	1.196	1.279	65,88	76,57	80,69
Sumatera Selatan	2.201	2.659	2.619	67,47	80,77	79,77
Bengkulu	1.089	1.107	1.161	71,93	73,12	76,68
Lampung	2.114	2.378	2.408	79,65	89,60	90,63
Kep. Bangka Belitung	304	329	340	77,75	83,72	86,51
Kepulauan Riau	309	330	357	74,28	77,10	83,02
DKI Jakarta	242	250	255	90,64	93,63	95,51
Jawa Barat	5.134	5.557	5.570	86,18	93,29	93,50
Jawa Tengah	6.437	7.333	7.384	75,21	85,65	86,23
DI Yogyakarta	376	405	393	85,84	92,47	89,73
Jawa Timur	6.614	7.186	7.221	77,85	84,58	85,01
Banten	1.258	1.357	1.360	81,06	87,44	87,63
Bali	556	627	635	77,65	87,57	88,56
Nusa Tenggara Barat	634	694	717	55,47	60,30	61,49
Nusa Tenggara Timur	979	1.220	1.083	29,20	35,36	30,61
Kalimantan Barat	1.208	1.473	1.509	56,53	68,58	69,96
Kalimantan Tengah	1.028	1.156	1.249	65,23	73,35	79,20
Kalimantan Selatan	1.240	1.347	1.434	61,75	67,12	71,17
Kalimantan Timur	742	851	893	71,48	81,36	84,89
Kalimantan Utara	286	339	343	59,34	70,33	70,87
Sulawesi Utara	1.636	1.680	1.622	89,01	91,30	88,25
Sulawesi Tengah	1.347	1.487	1.437	66,68	73,61	71,07
Sulawesi Selatan	1.623	1.882	1.748	53,23	61,68	57,12
Sulawesi Tenggara	947	1.058	936	40,23	45,82	40,84
Gorontalo	500	592	655	68,12	80,65	89,48
Sulawesi Barat	314	359	280	48,31	55,23	43,08
Maluku	647	764	800	52,18	61,22	63,39
Maluku Utara	723	762	790	60,45	63,34	65,34
Papua Barat	239	379	178	12,03	19,08	18,35
Papua Barat Daya	...	...	160	...	...	15,15
Papua	631	538	175	11,37	9,68	17,01
Papua Selatan	...	...	136	...	...	19,71
Papua Tengah	...	...	52	...	...	4,30
Papua Pegunungan	...	...	206	...	...	7,82
Indonesia	52.240	58.728	58.665	62,24	69,83	69,61

Sumber: Statistik Podes 2018, 2021, dan 2024

Lampiran 45 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	353	6.155	940	4.769	399	47
Sumatera Utara	481	5.651	621	3.629	1.215	186
Sumatera Barat	226	1.049	259	729	53	8
Riau	550	1.325	232	888	190	15
Jambi	207	1.355	270	906	159	20
Sumatera Selatan	381	2.881	320	2.135	391	35
Bengkulu	130	1.384	299	918	151	16
Lampung	280	2.374	403	1.698	244	30
Kep. Bangka Belitung	91	300	112	183	5	-
Kepulauan Riau	113	303	49	182	63	9
DKI Jakarta	222	45	30	15	-	-
Jawa Barat	910	5.047	1.085	3.666	294	2
Jawa Tengah	930	7.629	1.994	5.511	120	4
DI Yogyakarta	114	324	105	219	-	-
Jawa Timur	1.127	7.369	2.250	4.941	168	10
Banten	209	1.343	258	939	135	11
Bali	140	576	236	340	-	-
Nusa Tenggara Barat	176	967	241	659	53	14
Nusa Tenggara Timur	327	3.026	250	1.734	949	93
Kalimantan Barat	283	1.854	189	906	600	159
Kalimantan Tengah	201	1.375	121	748	421	85
Kalimantan Selatan	235	1.773	388	1.206	145	34
Kalimantan Timur	203	835	134	432	253	16
Kalimantan Utara	66	416	47	155	124	90
Sulawesi Utara	174	1.664	445	1.082	126	11
Sulawesi Tengah	293	1.727	316	1.087	265	59
Sulawesi Selatan	381	2.668	660	1.628	319	61
Sulawesi Tenggara	205	2.149	391	1.406	315	37
Gorontalo	77	657	183	381	88	5
Sulawesi Barat	62	588	86	299	152	51
Maluku	135	1.105	115	493	350	147
Maluku Utara	121	1.075	161	549	298	67
Papua Barat	113	1.874	127	619	752	376
Papua	243	5.309	205	1.323	1.960	1.821
Indonesia	9.759	74.172	13 521	46.375	10.757	3.519

Sumber: Statistik Podes 2018

Lampiran 46 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2021

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	337	6.177	1.204	4.657	274	42
Sumatera Utara	409	5.723	602	3.826	1.109	186
Sumatera Barat	215	1.072	320	690	55	7
Riau	517	1.359	211	939	186	23
Jambi	172	1.390	239	1.017	125	9
Sumatera Selatan	341	2.951	508	2.189	236	18
Bengkulu	123	1.391	302	983	93	13
Lampung	287	2.367	316	1.877	164	10
Kep. Bangka Belitung	82	311	152	151	7	1
Kepulauan Riau	110	318	58	175	69	16
DKI Jakarta	185	82	49	33	-	-
Jawa Barat	922	5.035	1.078	3.850	98	9
Jawa Tengah	801	7.761	1.905	5.814	38	4
DI Yogyakarta	134	304	64	239	1	-
Jawa Timur	1.052	7.444	2.549	4.785	102	8
Banten	195	1.357	222	1.028	101	6
Bali	156	560	317	243	-	-
Nusa Tenggara Barat	157	994	375	571	35	13
Nusa Tenggara Timur	304	3.146	446	1.824	824	52
Kalimantan Barat	268	1.880	147	958	649	126
Kalimantan Tengah	207	1.369	99	768	405	97
Kalimantan Selatan	251	1.756	529	1.076	128	23
Kalimantan Timur	193	853	135	460	230	28
Kalimantan Utara	67	415	60	167	131	57
Sulawesi Utara	167	1.673	422	1.142	102	7
Sulawesi Tengah	255	1.765	283	1.146	268	68
Sulawesi Selatan	343	2.708	453	1.930	279	46
Sulawesi Tenggara	177	2.132	461	1.421	227	23
Gorontalo	65	669	284	330	49	6
Sulawesi Barat	52	598	60	317	197	24
Maluku	126	1.122	107	558	355	102
Maluku Utara	108	1.095	186	544	309	56
Papua Barat	108	1.878	109	680	747	342
Papua	252	5.303	262	1.178	2.016	1.847
Indonesia	9.138	74.958	14.514	47.566	9.609	3.269

Sumber: Statistik Podes 2021

Lampiran 47 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2024

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	351	6.165	2.108	3.822	201	34
Sumatera Utara	411	5.702	977	3.727	838	160
Sumatera Barat	210	1.076	397	624	43	12
Riau	547	1.323	276	867	155	25
Jambi	181	1.404	337	975	85	7
Sumatera Selatan	363	2.920	779	1.951	176	14
Bengkulu	117	1.397	401	922	64	10
Lampung	285	2.372	437	1.763	160	12
Kep. Bangka Belitung	81	312	166	141	4	1
Kepulauan Riau	115	315	96	163	49	7
DKI Jakarta	184	83	48	35	-	-
Jawa Barat	894	5.063	1.532	3.458	72	1
Jawa Tengah	789	7.774	2.779	4.961	29	5
DI Yogyakarta	136	302	100	202	-	-
Jawa Timur	1.022	7.472	3.466	3.935	66	5
Banten	201	1.351	273	980	94	4
Bali	146	571	372	199	-	-
Nusa Tenggara Barat	157	1.009	573	403	25	8
Nusa Tenggara Timur	303	3.235	727	1.811	642	55
Kalimantan Barat	261	1.896	206	992	586	112
Kalimantan Tengah	204	1.373	166	782	351	74
Kalimantan Selatan	234	1.781	691	961	117	12
Kalimantan Timur	184	868	163	505	175	25
Kalimantan Utara	70	414	88	148	106	72
Sulawesi Utara	170	1.668	568	1.010	85	5
Sulawesi Tengah	266	1.756	369	1.095	235	57
Sulawesi Selatan	347	2.713	854	1.614	208	37
Sulawesi Tenggara	183	2.109	584	1.326	182	17
Gorontalo	70	662	351	271	35	5
Sulawesi Barat	50	600	81	336	158	25
Maluku	129	1.133	174	552	326	81
Maluku Utara	109	1.100	214	600	245	41
Papua Barat	62	908	76	375	349	108
Papua Barat Daya	48	1.008	59	360	421	168
Papua	106	923	139	374	293	117
Papua Selatan	61	629	59	124	287	159
Papua Tengah	71	1.137	49	295	455	338
Papua Pegunungan	36	2.598	75	396	845	1.282
Indonesia	9.154	75.122	20.810	43.055	8.162	3.095

Sumber: Statistik Podes 2024

Lampiran 48 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,42	94,58	15,27	77,48	6,48	0,76
Sumatera Utara	7,84	92,16	10,99	64,22	21,50	3,29
Sumatera Barat	17,73	82,27	24,69	69,49	5,05	0,76
Riau	29,33	70,67	17,51	67,02	14,34	1,13
Jambi	13,25	86,75	19,93	66,86	11,73	1,48
Sumatera Selatan	11,68	88,32	11,11	74,11	13,57	1,21
Bengkulu	8,59	91,41	21,60	66,33	10,91	1,16
Lampung	10,55	89,45	16,93	71,52	10,28	1,26
Kep. Bangka Belitung	23,27	76,73	37,33	61,00	1,67	-
Kepulauan Riau	27,16	72,84	16,17	60,07	20,79	2,97
DKI Jakarta	83,15	16,85	66,67	33,33	-	-
Jawa Barat	15,28	84,72	21,50	72,64	5,83	0,04
Jawa Tengah	10,87	89,13	26,14	72,24	1,57	0,05
DI Yogyakarta	26,03	73,97	32,41	67,59	-	-
Jawa Timur	13,27	86,73	30,53	67,05	2,28	0,14
Banten	13,47	86,53	19,21	69,92	10,05	0,82
Bali	19,55	80,45	40,97	59,03	-	-
Nusa Tenggara Barat	15,40	84,60	24,92	68,15	5,48	1,45
Nusa Tenggara Timur	9,75	90,25	8,26	57,30	31,36	3,07
Kalimantan Barat	13,24	86,76	10,19	48,87	32,36	8,58
Kalimantan Tengah	12,75	87,25	8,80	54,40	30,62	6,18
Kalimantan Selatan	11,70	88,30	21,88	68,02	8,18	1,92
Kalimantan Timur	19,56	80,44	16,05	51,74	30,30	1,92
Kalimantan Utara	13,69	86,31	11,30	37,26	29,81	21,63
Sulawesi Utara	9,47	90,53	26,74	65,02	7,57	0,66
Sulawesi Tengah	14,50	85,50	18,30	62,94	15,34	3,42
Sulawesi Selatan	12,50	87,50	24,74	61,02	11,96	2,29
Sulawesi Tenggara	8,71	91,29	18,19	65,43	14,66	1,72
Gorontalo	10,49	89,51	27,85	57,99	13,39	0,76
Sulawesi Barat	9,54	90,46	14,63	50,85	25,85	8,67
Maluku	10,89	89,11	10,41	44,62	31,67	13,30
Maluku Utara	10,12	89,88	14,98	51,07	27,72	6,23
Papua Barat	5,69	94,31	6,78	33,03	40,13	20,06
Papua	4,38	95,62	3,86	24,92	36,92	34,30
Indonesia	11,63	88,37	18,23	62,52	14,50	4,74

Sumber: Statistik Podes 2018

Lampiran 49 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2021

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5,17	94,83	19,49	75,39	4,44	0,68
Sumatera Utara	6,67	93,33	10,52	66,85	19,38	3,25
Sumatera Barat	16,71	83,29	29,85	64,37	5,13	0,65
Riau	27,56	72,44	15,53	69,09	13,69	1,69
Jambi	11,01	88,99	17,19	73,17	8,99	0,65
Sumatera Selatan	10,36	89,64	17,21	74,18	8,00	0,61
Bengkulu	8,12	91,88	21,71	70,67	6,69	0,93
Lampung	10,81	89,19	13,35	79,30	6,93	0,42
Kep. Bangka Belitung	20,87	79,13	48,87	48,55	2,25	0,32
Kepulauan Riau	25,70	74,30	18,24	55,03	21,70	5,03
DKI Jakarta	69,29	30,71	59,76	40,24	-	-
Jawa Barat	15,48	84,52	21,41	76,46	1,95	0,18
Jawa Tengah	9,36	90,64	24,55	74,91	0,49	0,05
DI Yogyakarta	30,59	69,41	21,05	78,62	0,33	-
Jawa Timur	12,38	87,62	34,24	64,28	1,37	0,11
Banten	12,56	87,44	16,36	75,76	7,44	0,44
Bali	21,79	78,21	56,61	43,39	-	-
Nusa Tenggara Barat	13,64	86,36	37,73	57,44	3,52	1,31
Nusa Tenggara Timur	8,81	91,19	14,18	57,98	26,19	1,65
Kalimantan Barat	12,48	87,52	7,82	50,96	34,52	6,70
Kalimantan Tengah	13,13	86,87	7,23	56,10	29,58	7,09
Kalimantan Selatan	12,51	87,49	30,13	61,28	7,29	1,31
Kalimantan Timur	18,45	81,55	15,83	53,93	26,96	3,28
Kalimantan Utara	13,90	86,10	14,46	40,24	31,57	13,73
Sulawesi Utara	9,08	90,92	25,22	68,26	6,10	0,42
Sulawesi Tengah	12,62	87,38	16,03	64,93	15,18	3,85
Sulawesi Selatan	11,24	88,76	16,73	71,27	10,30	1,70
Sulawesi Tenggara	7,67	92,33	21,62	66,65	10,65	1,08
Gorontalo	8,86	91,14	42,45	49,33	7,32	0,90
Sulawesi Barat	8,00	92,00	10,03	53,01	32,94	4,01
Maluku	10,10	89,90	9,54	49,73	31,64	9,09
Maluku Utara	8,98	91,02	16,99	49,68	28,22	5,11
Papua Barat	5,44	94,56	5,80	36,21	39,78	18,21
Papua	4,54	95,46	4,94	22,21	38,02	34,83
Indonesia	10,87	89,13	19,36	63,46	12,82	4,36

Sumber: Statistik Podes 2021

Lampiran 50 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, Tahun 2024

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	5,39	94,61	34,19	62,00	3,26	0,55
Sumatera Utara	6,72	93,28	17,13	65,36	14,70	2,81
Sumatera Barat	16,33	83,67	36,90	57,99	4,00	1,12
Riau	29,25	70,75	20,86	65,53	11,72	1,89
Jambi	11,42	88,58	24,00	69,44	6,05	0,50
Sumatera Selatan	11,06	88,94	26,68	66,82	6,03	0,48
Bengkulu	7,73	92,27	28,70	66,00	4,58	0,72
Lampung	10,73	89,27	18,42	74,33	6,75	0,51
Kep. Bangka Belitung	20,61	79,39	53,21	45,19	1,28	0,32
Kepulauan Riau	26,74	73,26	30,48	51,75	15,56	2,22
DKI Jakarta	68,91	31,09	57,83	42,17	-	-
Jawa Barat	15,01	84,99	30,26	68,30	1,42	0,02
Jawa Tengah	9,21	90,79	35,75	63,82	0,37	0,06
DI Yogyakarta	31,05	68,95	33,11	66,89	-	-
Jawa Timur	12,03	87,97	46,39	52,66	0,88	0,07
Banten	12,95	87,05	20,21	72,54	6,96	0,30
Bali	20,36	79,64	65,15	34,85	-	-
Nusa Tenggara Barat	13,46	86,54	56,79	39,94	2,48	0,79
Nusa Tenggara Timur	8,56	91,44	22,47	55,98	19,85	1,70
Kalimantan Barat	12,10	87,90	10,86	52,32	30,91	5,91
Kalimantan Tengah	12,94	87,06	12,09	56,96	25,56	5,39
Kalimantan Selatan	11,61	88,39	38,80	53,96	6,57	0,67
Kalimantan Timur	17,49	82,51	18,78	58,18	20,16	2,88
Kalimantan Utara	14,46	85,54	21,26	35,75	25,60	17,39
Sulawesi Utara	9,25	90,75	34,05	60,55	5,10	0,30
Sulawesi Tengah	13,16	86,84	21,01	62,36	13,38	3,25
Sulawesi Selatan	11,34	88,66	31,48	59,49	7,67	1,36
Sulawesi Tenggara	7,98	92,02	27,69	62,87	8,63	0,81
Gorontalo	9,56	90,44	53,02	40,94	5,29	0,76
Sulawesi Barat	7,69	92,31	13,50	56,00	26,33	4,17
Maluku	10,22	89,78	15,36	48,72	28,77	7,15
Maluku Utara	9,02	90,98	19,45	54,55	22,27	3,73
Papua Barat	6,39	93,61	8,37	41,30	38,44	11,89
Papua Barat Daya	4,55	95,45	5,85	35,71	41,77	16,67
Papua	10,30	89,70	15,06	40,52	31,74	12,68
Papua Selatan	8,84	91,16	9,38	19,71	45,63	25,28
Papua Tengah	5,88	94,12	4,31	25,95	40,02	29,73
Papua Pegunungan	1,37	98,63	2,89	15,24	32,53	49,35
Indonesia	10,86	89,14	27,70	57,31	10,86	4,12

Sumber: Statistik Podes 2024

DATA SURVEI SOSIAL-EKONOMI NASIONAL



Lampiran 51 Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2021–2023

Jenis Kejahatan	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Pencurian	86,77	89,11	85,87
Penganiayaan	3,71	3,55	3,10
Pencurian dengan kekerasan	3,00	2,70	1,32
Pelecehan Seksual	1,71	2,13	1,31
Lainnya	13,21	11,40	12,47
Mengalami lebih dari 1 jenis kejahatan	8,40	8,89	4,08

Sumber: Susenas 2022–2024

Lampiran 52 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,32	0,34	0,32
Sumatera Utara	0,74	0,64	0,41
Sumatera Barat	0,48	0,62	0,56
Riau	0,56	0,52	0,45
Jambi	0,50	0,59	0,48
Sumatera Selatan	0,57	0,49	0,51
Bengkulu	0,97	0,95	0,67
Lampung	0,50	0,72	0,68
Kep. Bangka Belitung	0,41	0,44	0,37
Kepulauan Riau	0,55	0,88	0,40
DKI Jakarta	0,40	0,63	0,63
Jawa Barat	0,48	0,62	0,63
Jawa Tengah	0,37	0,45	0,37
DI Yogyakarta	0,41	0,83	0,42
Jawa Timur	0,35	0,38	0,29
Banten	0,36	0,46	0,34
Bali	0,20	0,20	0,07
Nusa Tenggara Barat	0,98	0,98	1,00
Nusa Tenggara Timur	0,57	0,45	0,39
Kalimantan Barat	0,44	0,42	0,30
Kalimantan Tengah	0,47	0,38	0,33
Kalimantan Selatan	0,42	0,36	0,26
Kalimantan Timur	0,47	0,41	0,21
Kalimantan Utara	0,57	0,66	0,41
Sulawesi Utara	0,57	0,53	0,49
Sulawesi Tengah	0,63	0,53	0,57
Sulawesi Selatan	0,41	0,51	0,33
Sulawesi Tenggara	0,50	0,53	0,34
Gorontalo	0,46	0,44	0,37
Sulawesi Barat	0,40	0,30	0,28
Maluku	0,78	0,86	0,73
Maluku Utara	0,55	0,53	0,46
Papua Barat	0,73	0,59	0,36
Papua Barat Daya	...	...	1,21
Papua	0,55	0,52	1,05
Papua Selatan	...	...	0,76
Papua Tengah	...	...	0,19
Papua Pegunungan	...	...	0,30
Indonesia	0,47	0,53	0,45

Sumber: Susenas 2022-2024

Lampiran 53 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, 2021–2023

Provinsi	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	69,45	30,55	68,90	31,10	70,25	29,75
Sumatera Utara	60,62	39,38	61,38	38,62	66,74	33,26
Sumatera Barat	51,65	48,35	52,36	47,64	51,03	48,97
Riau	61,94	38,06	67,57	32,43	59,00	41,00
Jambi	60,35	39,65	68,85	31,15	77,03	22,97
Sumatera Selatan	75,93	24,07	78,90	21,10	64,37	35,63
Bengkulu	75,56	24,44	76,01	23,99	65,57	34,43
Lampung	77,88	22,12	72,40	27,60	78,58	21,42
Kep. Bangka Belitung	56,17	43,83	74,82	25,18	65,37	34,63
Kepulauan Riau	58,96	41,04	41,03	58,97	68,59	31,41
DKI, Jakarta	66,71	33,29	66,18	33,82	62,93	37,07
Jawa Barat	65,34	34,66	66,31	33,69	63,13	36,87
Jawa Tengah	56,81	43,19	55,53	44,47	55,19	44,81
DI, Yogyakarta	65,22	34,78	56,31	43,69	56,61	43,39
Jawa Timur	57,72	42,28	60,99	39,01	58,33	41,67
Banten	54,84	45,16	56,64	43,36	68,52	31,48
Bali	60,47	39,53	72,21	27,79	59,50	40,50
Nusa Tenggara Barat	64,56	35,44	62,97	37,03	64,98	35,02
Nusa Tenggara Timur	64,70	35,30	71,63	28,37	72,00	28,00
Kalimantan Barat	61,72	38,28	71,66	28,34	70,88	29,12
Kalimantan Tengah	64,59	35,41	71,45	28,55	67,01	32,99
Kalimantan Selatan	55,48	44,52	64,69	35,31	67,17	32,83
Kalimantan Timur	67,55	32,45	68,97	31,03	76,72	23,28
Kalimantan Utara	71,86	28,14	63,78	36,22	74,90	25,10
Sulawesi Utara	70,94	29,06	68,90	31,10	53,00	47,00
Sulawesi Tengah	56,48	43,52	56,77	43,23	72,05	27,95
Sulawesi Selatan	51,86	48,14	58,67	41,33	56,71	43,29
Sulawesi Tenggara	64,85	35,15	63,75	36,25	63,44	36,56
Gorontalo	63,33	36,67	63,62	36,38	51,26	48,74
Sulawesi Barat	50,34	49,66	59,32	40,68	52,58	47,42
Maluku	52,00	48,00	49,68	50,32	60,51	39,49
Maluku Utara	59,90	40,10	65,70	34,30	63,37	36,63
Papua Barat	62,44	37,56	57,44	42,56	60,80	39,20
Papua Barat Daya	...	...	...	...	71,13	28,87
Papua	60,06	39,94	58,92	41,08	55,29	44,71
Papua Selatan	...	...	...	...	78,07	21,93
Papua Tengah	...	...	...	...	64,34	35,66
Papua Pegunungan	...	...	...	...	53,55	46,45
Indonesia	62,29	37,71	63,23	36,77	63,17	36,83

Sumber: Susenas 2022–2024

Lampiran 54 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2021–2023

Provinsi	2021		2022		2023	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	2,31	97,69	4,64	95,36	2,25	97,75
Sumatera Utara	8,95	91,05	8,07	91,93	13,42	86,58
Sumatera Barat	7,99	92,01	8,28	91,72	5,61	94,39
Riau	9,33	90,67	4,95	95,05	4,11	95,89
Jambi	12,00	88,00	7,54	92,46	5,66	94,34
Sumatera Selatan	6,17	93,83	6,82	93,18	3,90	96,10
Bengkulu	5,11	94,89	4,80	95,20	13,60	86,40
Lampung	3,06	96,94	7,32	92,68	7,29	92,71
Kep. Bangka Belitung	8,35	91,65	3,25	96,75	3,47	96,53
Kepulauan Riau	6,08	93,92	10,12	89,88	4,61	95,39
DKI, Jakarta	11,70	88,30	12,27	87,73	4,89	95,11
Jawa Barat	5,17	94,83	5,36	94,64	6,85	93,15
Jawa Tengah	7,23	92,77	8,05	91,95	8,07	91,93
DI,Yogyakarta	2,08	97,92	7,65	92,35	0,79	99,21
Jawa Timur	9,54	90,46	4,83	95,17	5,06	94,94
Banten	5,67	94,33	6,82	93,18	6,61	93,39
Bali	–	100,00	0,58	99,42	–	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,50	95,50	11,90	88,10	5,62	94,38
Nusa Tenggara Timur	6,07	93,93	4,41	95,59	7,05	92,95
Kalimantan Barat	5,22	94,78	4,67	95,33	3,96	96,04
Kalimantan Tengah	4,34	95,66	4,50	95,50	9,81	90,19
Kalimantan Selatan	3,52	96,48	4,39	95,61	9,52	90,48
Kalimantan Timur	4,37	95,63	5,45	94,55	4,31	95,69
Kalimantan Utara	6,17	93,83	–	100,00	7,49	92,51
Sulawesi Utara	7,91	92,09	2,64	97,36	7,71	92,29
Sulawesi Tengah	10,55	89,45	13,47	86,53	6,45	93,55
Sulawesi Selatan	7,73	92,27	2,03	97,97	6,61	93,39
Sulawesi Tenggara	2,72	97,28	5,42	94,58	5,91	94,09
Gorontalo	9,12	90,88	0,61	99,39	11,22	88,78
Sulawesi Barat	6,64	93,36	5,73	94,27	9,04	90,96
Maluku	9,85	90,15	17,24	82,76	10,43	89,57
Maluku Utara	17,41	82,59	10,50	89,50	7,04	92,96
Papua Barat	6,58	93,42	8,91	91,09	5,40	94,60
Papua Barat Daya	...	...	...	...	7,09	92,91
Papua	10,21	89,79	6,24	93,76	2,06	97,94
Papua Selatan	...	...	...	...	0,07	99,93
Papua Tengah	...	...	...	...	8,72	91,28
Papua Pegunungan	...	...	...	...	–	100,00
Indonesia	6,94	93,06	6,75	93,25	6,61	93,39

Sumber: Susenas 2022–2024

Lampiran 55 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	96,47	93,92	91,17
Sumatera Utara	91,60	96,53	89,96
Sumatera Barat	90,15	86,59	89,00
Riau	88,98	88,23	95,34
Jambi	92,36	96,29	94,48
Sumatera Selatan	93,34	88,78	89,25
Bengkulu	96,44	91,11	88,53
Lampung	86,73	89,27	89,12
Kep. Bangka Belitung	82,36	88,81	90,38
Kepulauan Riau	94,51	90,58	86,24
DKI Jakarta	88,33	91,90	82,34
Jawa Barat	87,02	91,69	86,95
Jawa Tengah	75,35	80,82	78,78
DI Yogyakarta	79,04	77,74	64,81
Jawa Timur	81,83	82,49	72,21
Banten	91,57	95,58	93,12
Bali	83,52	80,18	88,28
Nusa Tenggara Barat	94,22	92,09	92,93
Nusa Tenggara Timur	88,57	89,54	89,13
Kalimantan Barat	94,72	88,37	91,04
Kalimantan Tengah	86,30	95,79	91,61
Kalimantan Selatan	72,25	84,38	88,09
Kalimantan Timur	84,13	94,00	75,00
Kalimantan Utara	93,38	82,06	95,41
Sulawesi Utara	83,23	84,68	87,41
Sulawesi Tengah	95,28	89,48	93,36
Sulawesi Selatan	80,52	90,96	84,58
Sulawesi Tenggara	92,43	93,44	92,18
Gorontalo	83,49	89,40	90,05
Sulawesi Barat	87,04	91,93	96,34
Maluku	92,52	95,75	97,18
Maluku Utara	96,53	90,25	96,23
Papua Barat	78,47	91,03	91,61
Papua Barat Daya	...	...	88,09
Papua	87,85	91,99	86,32
Papua Selatan	...	...	94,92
Papua Tengah	...	...	69,65
Papua Pegunungan	...	...	97,71
Indonesia	86,77	89,11	85,87

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
Sumber: Susenas 2022-2024

Lampiran 56 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	4,57	2,04	0,52
Sumatera Utara	3,43	1,11	2,24
Sumatera Barat	1,98	6,01	4,40
Riau	3,46	5,38	2,71
Jambi	0,59	1,13	2,06
Sumatera Selatan	1,33	2,31	2,62
Bengkulu	0,61	4,85	1,57
Lampung	3,45	1,18	4,46
Kep. Bangka Belitung	-	6,30	3,20
Kepulauan Riau	0,52	0,99	6,98
DKI Jakarta	8,44	3,62	3,96
Jawa Barat	5,25	4,63	2,89
Jawa Tengah	4,16	2,03	1,95
DI Yogyakarta	-	8,15	2,06
Jawa Timur	3,01	4,10	1,78
Banten	2,07	1,47	1,24
Bali	4,89	6,12	2,95
Nusa Tenggara Barat	2,19	1,19	2,98
Nusa Tenggara Timur	3,70	6,57	9,74
Kalimantan Barat	0,85	0,48	1,83
Kalimantan Tengah	2,85	0,68	1,70
Kalimantan Selatan	1,60	-	8,39
Kalimantan Timur	1,78	2,15	2,38
Kalimantan Utara	3,58	0,95	4,59
Sulawesi Utara	8,24	11,43	9,72
Sulawesi Tengah	2,07	5,35	0,71
Sulawesi Selatan	3,09	6,22	7,78
Sulawesi Tenggara	6,05	2,00	4,12
Gorontalo	10,40	5,72	6,34
Sulawesi Barat	9,58	-	-
Maluku	5,24	7,25	2,30
Maluku Utara	1,11	4,69	3,53
Papua Barat	8,29	4,55	5,06
Papua Barat Daya	...	...	4,82
Papua	6,59	7,14	8,71
Papua Selatan	...	...	2,38
Papua Tengah	...	...	13,28
Papua Pegunungan	...	...	-
Indonesia	3,71	3,55	3,10

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
Sumber: Susenas 2022-2024

Lampiran 57 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2021–2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,54	0,20	0,58
Sumatera Utara	3,76	1,51	2,11
Sumatera Barat	3,45	0,09	0,49
Riau	3,76	6,05	1,89
Jambi	3,21	0,98	1,15
Sumatera Selatan	2,54	2,81	2,56
Bengkulu	1,42	5,42	1,32
Lampung	0,49	4,70	2,34
Kep. Bangka Belitung	7,73	–	–
Kepulauan Riau	–	1,09	–
DKI Jakarta	5,00	3,08	1,22
Jawa Barat	5,09	4,51	1,46
Jawa Tengah	2,21	1,93	0,51
DI Yogyakarta	1,13	–	–
Jawa Timur	1,58	1,90	0,51
Banten	3,56	1,72	1,24
Bali	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	0,59	0,86	–
Nusa Tenggara Timur	2,03	1,88	2,05
Kalimantan Barat	0,87	0,91	7,16
Kalimantan Tengah	2,98	0,68	0,70
Kalimantan Selatan	3,70	–	5,33
Kalimantan Timur	1,40	1,83	0,96
Kalimantan Utara	1,52	–	6,17
Sulawesi Utara	–	4,22	0,58
Sulawesi Tengah	–	0,71	0,62
Sulawesi Selatan	4,63	5,66	–
Sulawesi Tenggara	0,30	0,43	–
Gorontalo	6,15	1,52	2,26
Sulawesi Barat	4,77	–	–
Maluku	2,09	0,76	0,17
Maluku Utara	–	3,61	1,62
Papua Barat	8,45	5,18	0,36
Papua Barat Daya	...	...	1,29
Papua	6,63	5,25	8,61
Papua Selatan	...	...	1,24
Papua Tengah	...	...	5,35
Papua Pegunungan	...	...	2,29
Indonesia	3,00	2,70	1,32

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
Sumber: Susenas 2022–2024

Lampiran 58 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	2,54	4,30	-
Sumatera Utara	1,77	1,31	0,98
Sumatera Barat	1,54	0,87	1,34
Riau	0,36	2,43	-
Jambi	0,59	0,69	-
Sumatera Selatan	0,73	0,99	1,73
Bengkulu	0,56	1,62	3,32
Lampung	0,49	1,72	1,77
Kep. Bangka Belitung	4,48	-	-
Kepulauan Riau	0,67	7,77	3,70
DKI Jakarta	-	2,79	-
Jawa Barat	3,70	3,83	2,23
Jawa Tengah	0,49	0,74	0,48
DI Yogyakarta	1,71	2,02	2,24
Jawa Timur	1,69	1,59	0,58
Banten	2,76	0,91	1,24
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,27	1,44	1,94
Nusa Tenggara Timur	1,99	0,06	2,96
Kalimantan Barat	0,72	3,16	-
Kalimantan Tengah	0,93	0,74	0,83
Kalimantan Selatan	2,98	-	5,33
Kalimantan Timur	0,35	1,86	-
Kalimantan Utara	-	2,40	-
Sulawesi Utara	0,48	-	0,58
Sulawesi Tengah	0,27	-	-
Sulawesi Selatan	2,28	4,61	-
Sulawesi Tenggara	1,41	0,66	1,26
Gorontalo	-	0,44	6,06
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	1,76	0,85	0,12
Maluku Utara	3,16	1,08	2,30
Papua Barat	1,60	1,37	-
Papua Barat Daya	...	...	0,70
Papua	4,11	4,56	0,44
Papua Selatan	...	...	0,07
Papua Tengah	...	...	5,35
Papua Pegunungan	...	...	-
Indonesia	1,71	2,13	1,31

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
 Sumber: Susenas 2022-2024

Lampiran 59 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2021-2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	4,72	4,12	7,86
Sumatera Utara	7,43	4,38	9,17
Sumatera Barat	6,39	10,38	6,89
Riau	5,38	6,51	4,29
Jambi	10,04	5,65	4,35
Sumatera Selatan	6,57	8,05	8,23
Bengkulu	1,53	6,52	8,17
Lampung	11,11	6,18	10,20
Kep. Bangka Belitung	5,94	6,48	8,72
Kepulauan Riau	7,30	8,45	4,60
DKI Jakarta	12,15	15,85	14,56
Jawa Barat	18,36	11,71	11,71
Jawa Tengah	20,92	19,96	19,31
DI Yogyakarta	19,29	13,92	33,03
Jawa Timur	20,56	18,72	26,46
Banten	10,72	5,23	7,59
Bali	21,37	13,70	17,30
Nusa Tenggara Barat	4,93	8,77	5,98
Nusa Tenggara Timur	5,79	5,16	4,43
Kalimantan Barat	4,95	7,70	8,96
Kalimantan Tengah	11,55	5,79	10,90
Kalimantan Selatan	19,47	19,77	18,07
Kalimantan Timur	15,54	8,13	24,23
Kalimantan Utara	5,71	14,69	1,36
Sulawesi Utara	11,64	10,38	9,08
Sulawesi Tengah	7,03	5,26	5,79
Sulawesi Selatan	16,49	12,44	8,58
Sulawesi Tenggara	5,46	8,82	3,94
Gorontalo	5,55	4,89	8,81
Sulawesi Barat	10,79	8,07	12,81
Maluku	9,36	3,32	1,93
Maluku Utara	0,09	5,82	2,81
Papua Barat	10,81	3,91	7,44
Papua Barat Daya	...	...	8,03
Papua	10,63	9,15	8,96
Papua Selatan	...	...	1,47
Papua Tengah	...	...	29,65
Papua Pegunungan	...	...	1,74
Indonesia	13,21	11,40	12,47

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
Sumber: Susenas 2022-2024

Lampiran 60 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2021–2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	29,15	19,60	10,63
Sumatera Utara	14,54	17,16	20,19
Sumatera Barat	20,27	20,59	14,28
Riau	14,79	15,14	15,66
Jambi	17,40	19,45	20,54
Sumatera Selatan	20,07	14,87	23,53
Bengkulu	12,12	16,81	17,55
Lampung	14,64	21,70	23,06
Kep. Bangka Belitung	25,43	24,40	16,87
Kepulauan Riau	26,10	32,18	13,74
DKI Jakarta	33,90	29,32	23,96
Jawa Barat	32,82	31,09	26,60
Jawa Tengah	16,57	16,46	17,49
DI Yogyakarta	20,34	19,19	24,91
Jawa Timur	21,75	28,19	24,17
Banten	26,04	14,66	34,11
Bali	27,17	30,95	12,05
Nusa Tenggara Barat	18,10	13,71	27,12
Nusa Tenggara Timur	16,88	13,87	13,42
Kalimantan Barat	22,71	22,38	15,07
Kalimantan Tengah	28,53	20,39	33,50
Kalimantan Selatan	24,54	9,26	26,02
Kalimantan Timur	26,52	12,89	36,49
Kalimantan Utara	31,14	21,22	23,45
Sulawesi Utara	26,79	29,01	25,21
Sulawesi Tengah	31,96	32,48	24,88
Sulawesi Selatan	31,64	25,40	21,93
Sulawesi Tenggara	30,55	16,40	17,89
Gorontalo	24,08	27,14	42,46
Sulawesi Barat	23,79	26,51	25,27
Maluku	16,05	15,91	19,09
Maluku Utara	15,46	20,08	14,55
Papua Barat	28,72	44,67	35,75
Papua Barat Daya	...	...	56,51
Papua	30,57	28,37	39,05
Papua Selatan	...	...	26,74
Papua Tengah	...	...	17,29
Papua Pegunungan	...	...	1,74
Indonesia	23,31	22,98	23,36

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
Sumber: Susenas 2022–2024

Lampiran 61 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2022–2023

Provinsi	Pencurian		Penganiayaan		Pencurian dengan Kekerasan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	18,31	9,38	0,56	–	0,20	–
Sumatera Utara	16,41	18,02	0,80	1,85	0,54	0,97
Sumatera Barat	16,00	8,97	2,57	3,55	–	–
Riau	12,64	12,34	1,76	–	2,06	1,22
Jambi	17,61	18,50	1,03	–	0,98	0,03
Sumatera Selatan	12,77	18,91	1,32	2,60	0,18	1,03
Bengkulu	15,20	13,32	1,62	0,85	1,62	0,96
Lampung	17,25	20,46	1,00	2,87	2,64	2,34
Kep. Bangka Belitung	18,91	11,22	1,96	3,20	–	–
Kepulauan Riau	25,17	13,48	–	–	0,93	–
DKI, Jakarta	28,70	17,24	2,29	0,71	2,57	0,50
Jawa Barat	26,04	21,87	3,09	1,16	4,32	1,37
Jawa Tengah	12,32	11,37	1,00	0,78	0,75	0,51
DI, Yogyakarta	10,90	17,36	3,28	2,06	–	–
Jawa Timur	21,48	18,05	2,83	0,03	1,90	0,51
Banten	14,10	29,93	1,47	0,71	0,91	1,24
Bali	18,16	6,77	–	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	12,15	24,49	0,60	1,68	0,59	–
Nusa Tenggara Timur	9,10	3,71	3,50	6,65	0,02	2,05
Kalimantan Barat	19,98	14,14	0,29	1,83	–	–
Kalimantan Tengah	18,61	29,72	0,35	1,40	0,35	–
Kalimantan Selatan	9,26	17,47	–	7,70	–	5,33
Kalimantan Timur	12,08	31,72	1,83	0,13	1,83	–
Kalimantan Utara	16,62	19,18	0,43	4,28	–	–
Sulawesi Utara	18,17	18,86	6,77	4,68	2,93	0,58
Sulawesi Tengah	28,23	22,34	4,21	–	–	0,59
Sulawesi Selatan	21,41	15,15	5,96	6,18	5,66	–
Sulawesi Tenggara	12,70	13,66	0,25	1,86	–	–
Gorontalo	23,73	35,29	2,96	6,34	–	2,26
Sulawesi Barat	25,96	20,52	–	–	–	–
Maluku	12,08	16,64	2,02	0,85	0,57	0,17
Maluku Utara	14,62	12,18	3,80	3,53	0,12	1,62
Papua Barat	37,44	29,99	3,17	1,22	1,27	–
Papua Barat Daya	...	47,67	...	4,27	...	0,39
Papua	21,20	29,62	5,63	6,29	4,76	2,82
Papua Selatan	...	23,04	...	2,38	...	1,24
Papua Tengah	...	14,75	...	5,35	...	5,35
Papua Pegunungan	...	–	...	–	...	–
Indonesia	19,01	18,58	2,16	1,57	1,95	0,92

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Sumber: Susenas 2023–2024

Lanjutan Lampiran 61

Provinsi	Pelecehan Seksual		Lainnya	
	2022	2023	2022	2023
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
A c e h	1,12	-	0,79	1,25
Sumatera Utara	1,03	0,98	2,03	2,25
Sumatera Barat	0,30	1,34	2,41	1,31
Riau	2,40	-	3,43	2,09
Jambi	0,69	-	2,53	2,00
Sumatera Selatan	0,99	1,73	0,32	0,92
Bengkulu	1,62	1,63	1,62	1,86
Lampung	0,88	1,77	2,07	3,27
Kep. Bangka Belitung	-	-	3,53	2,46
Kepulauan Riau	7,77	0,04	0,17	0,22
DKI, Jakarta	2,29	-	2,62	5,51
Jawa Barat	3,37	0,94	6,66	4,64
Jawa Tengah	0,55	-	3,91	4,83
DI,Yogyakarta	2,02	2,24	2,99	5,38
Jawa Timur	1,56	0,03	7,84	5,91
Banten	0,91	0,71	1,58	4,37
Bali	-	-	12,79	10,86
Nusa Tenggara Barat	-	1,00	1,55	2,96
Nusa Tenggara Timur	0,06	2,40	1,24	2,89
Kalimantan Barat	-	-	2,40	0,42
Kalimantan Tengah	0,35	0,83	3,09	1,56
Kalimantan Selatan	-	5,33	-	15,41
Kalimantan Timur	1,83	-	2,94	6,25
Kalimantan Utara	2,40	-	1,77	1,36
Sulawesi Utara	-	0,58	7,25	3,55
Sulawesi Tengah	-	-	0,43	1,95
Sulawesi Selatan	4,61	-	6,18	0,79
Sulawesi Tenggara	0,26	1,26	3,74	2,61
Gorontalo	0,44	3,80	-	6,03
Sulawesi Barat	-	-	0,55	4,75
Maluku	0,72	0,12	2,24	1,65
Maluku Utara	1,08	1,62	0,94	2,08
Papua Barat	0,13	-	2,66	4,54
Papua Barat Daya		0,39		5,36
Papua	3,22	-	4,41	1,64
Papua Selatan		-		0,16
Papua Tengah		5,35		9,77
Papua Pegunungan		-		1,74
Indonesia	1,74	0,74	4,07	3,90

Catatan: Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk
Sumber: Susenas 2023-2024

DATA SDGS TERKAIT KEAMANAN



Lampiran 62 Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam 12 bulan Terakhir, 2021–2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,02	0,02	0,00
Sumatera Utara	0,04	0,02	0,01
Sumatera Barat	0,03	0,04	0,03
Riau	0,04	0,05	0,02
Jambi	0,02	0,01	0,02
Sumatera Selatan	0,02	0,03	0,02
Bengkulu	0,03	0,08	0,04
Lampung	0,02	0,05	0,03
Kep. Bangka Belitung	0,05	0,03	0,01
Kepulauan Riau	0,01	0,08	0,04
DKI Jakarta	0,05	0,02	0,03
Jawa Barat	0,04	0,04	0,03
Jawa Tengah	0,02	0,02	0,01
DI Yogyakarta	0,01	0,08	0,02
Jawa Timur	0,02	0,02	0,01
Banten	0,01	0,01	0,00
Bali	0,01	0,01	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,03	0,03	0,04
Nusa Tenggara Timur	0,04	0,04	0,04
Kalimantan Barat	0,01	0,02	0,03
Kalimantan Tengah	0,03	0,00	0,01
Kalimantan Selatan	0,03	–	0,02
Kalimantan Timur	0,02	0,01	0,01
Kalimantan Utara	0,03	0,02	0,04
Sulawesi Utara	0,05	0,06	0,05
Sulawesi Tengah	0,01	0,03	0,01
Sulawesi Selatan	0,03	0,04	0,03
Sulawesi Tenggara	0,04	0,01	0,02
Gorontalo	0,08	0,03	0,04
Sulawesi Barat	0,04	–	–
Maluku	0,06	0,06	0,02
Maluku Utara	0,02	0,05	0,02
Papua Barat	0,12	0,07	0,02
Papua Barat Daya	...	...	0,07
Papua	0,07	0,06	0,18
Papua Selatan	...	...	0,03
Papua Tengah	...	...	0,02
Papua Pegunungan	...	...	0,01
Indonesia	0,03	0,03	0,02

Sumber: Susenas 2022–2024

Lampiran 63 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian pada Siang Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	10,35	88,91	0,74
Sumatera Utara	11,69	87,86	0,45
Sumatera Barat	7,66	91,95	0,39
Riau	8,33	91,53	0,14
Jambi	6,26	93,15	0,59
Sumatera Selatan	5,13	94,69	0,18
Bengkulu	5,37	94,46	0,17
Lampung	6,03	93,85	0,12
Kep. Bangka Belitung	6,75	92,72	0,53
Kepulauan Riau	8,56	91,42	0,02
DKI Jakarta	22,61	76,24	1,15
Jawa Barat	16,52	83,37	0,11
Jawa Tengah	6,13	93,46	0,41
DI Yogyakarta	9,10	90,62	0,28
Jawa Timur	7,34	92,24	0,42
Banten	12,84	86,77	0,39
Bali	6,94	92,99	0,07
Nusa Tenggara Barat	7,08	92,72	0,20
Nusa Tenggara Timur	9,51	90,05	0,44
Kalimantan Barat	6,40	93,13	0,47
Kalimantan Tengah	7,35	91,56	1,09
Kalimantan Selatan	7,11	92,71	0,18
Kalimantan Timur	11,48	87,33	1,19
Kalimantan Utara	13,56	85,62	0,82
Sulawesi Utara	16,73	81,90	1,37
Sulawesi Tengah	20,45	79,34	0,21
Sulawesi Selatan	6,30	92,82	0,88
Sulawesi Tenggara	9,09	90,73	0,18
Gorontalo	10,35	89,65	-
Sulawesi Barat	8,00	91,76	0,24
Maluku	5,70	94,01	0,29
Maluku Utara	3,79	95,92	0,29
Papua Barat	9,27	90,57	0,16
Papua	9,74	89,65	0,61
Indonesia	10,30	89,31	0,39

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, 2020

Lampiran 64 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendirian pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	38,79	60,64	0,57
Sumatera Utara	44,93	54,00	1,07
Sumatera Barat	41,01	56,80	2,19
Riau	34,69	63,21	2,10
Jambi	34,22	64,54	1,24
Sumatera Selatan	28,70	70,90	0,40
Bengkulu	31,50	67,41	1,09
Lampung	27,26	72,55	0,19
Kep. Bangka Belitung	32,04	67,21	0,75
Kepulauan Riau	27,25	72,73	0,02
DKI Jakarta	57,88	40,89	1,23
Jawa Barat	47,60	51,70	0,70
Jawa Tengah	24,86	73,90	1,24
DI Yogyakarta	23,67	74,33	2,00
Jawa Timur	33,96	65,32	0,72
Banten	44,45	54,65	0,90
Bali	18,60	81,02	0,38
Nusa Tenggara Barat	33,67	65,71	0,62
Nusa Tenggara Timur	35,19	64,39	0,42
Kalimantan Barat	27,47	70,27	2,26
Kalimantan Tengah	29,44	68,93	1,63
Kalimantan Selatan	32,96	65,64	1,40
Kalimantan Timur	38,70	59,58	1,72
Kalimantan Utara	34,39	64,39	1,22
Sulawesi Utara	39,69	58,00	2,31
Sulawesi Tengah	45,54	53,74	0,72
Sulawesi Selatan	34,69	63,73	1,58
Sulawesi Tenggara	29,90	69,92	0,18
Gorontalo	46,42	53,24	0,34
Sulawesi Barat	22,95	76,28	0,77
Maluku	34,47	64,85	0,68
Maluku Utara	28,66	70,57	0,77
Papua Barat	40,33	59,19	0,48
Papua	29,11	67,07	3,82
Indonesia	36,72	62,27	1,01

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, 2020

Lampiran 65 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berkendara (Sepeda, Sepeda Motor, Mobil) Sendirian pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	35,71	60,00	4,29
Sumatera Utara	45,55	49,65	4,80
Sumatera Barat	37,95	56,32	5,73
Riau	32,40	63,68	3,92
Jambi	32,53	62,81	4,66
Sumatera Selatan	32,29	62,96	4,75
Bengkulu	30,66	62,36	6,98
Lampung	29,48	68,81	1,71
Kep. Bangka Belitung	27,46	67,89	4,65
Kepulauan Riau	24,78	74,25	0,97
DKI Jakarta	60,55	32,69	6,76
Jawa Barat	48,74	45,65	5,61
Jawa Tengah	25,01	68,99	6,00
DI Yogyakarta	23,93	69,44	6,63
Jawa Timur	34,79	58,15	7,06
Banten	51,92	43,63	4,45
Bali	17,56	79,92	2,52
Nusa Tenggara Barat	33,83	55,58	10,59
Nusa Tenggara Timur	27,99	54,67	17,34
Kalimantan Barat	25,74	68,50	5,76
Kalimantan Tengah	29,33	65,99	4,68
Kalimantan Selatan	31,35	65,69	2,96
Kalimantan Timur	36,81	60,70	2,49
Kalimantan Utara	33,32	61,57	5,11
Sulawesi Utara	36,64	54,77	8,59
Sulawesi Tengah	44,44	51,38	4,18
Sulawesi Selatan	35,29	58,29	6,42
Sulawesi Tenggara	27,49	66,05	6,46
Gorontalo	39,85	47,15	13,00
Sulawesi Barat	22,32	70,95	6,73
Maluku	30,20	55,85	13,95
Maluku Utara	27,41	61,33	11,26
Papua Barat	34,82	55,21	9,97
Papua	27,81	44,07	28,12
Indonesia	37,15	56,63	6,22

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, 2020

Lampiran 66 Proporsi Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	38,69	61,17	0,13
Sumatera Utara	45,81	53,94	0,25
Sumatera Barat	42,07	57,76	0,16
Riau	35,14	64,80	0,06
Jambi	34,26	65,56	0,18
Sumatera Selatan	29,12	70,82	0,06
Bengkulu	32,54	67,42	0,03
Lampung	28,18	71,70	0,13
Kep. Bangka Belitung	33,91	65,91	0,18
Kepulauan Riau	26,50	73,49	0,00
DKI Jakarta	59,74	40,17	0,09
Jawa Barat	48,20	51,78	0,01
Jawa Tengah	25,15	74,56	0,29
DI Yogyakarta	25,04	74,87	0,08
Jawa Timur	33,87	65,95	0,18
Banten	44,68	55,29	0,03
Bali	18,10	81,90	0,00
Nusa Tenggara Barat	32,60	67,27	0,13
Nusa Tenggara Timur	35,77	64,03	0,20
Kalimantan Barat	26,78	73,07	0,15
Kalimantan Tengah	30,00	69,59	0,41
Kalimantan Selatan	35,32	64,62	0,05
Kalimantan Timur	40,15	58,95	0,90
Kalimantan Utara	35,78	63,72	0,50
Sulawesi Utara	39,34	59,99	0,67
Sulawesi Tengah	46,64	53,25	0,11
Sulawesi Selatan	35,00	64,53	0,48
Sulawesi Tenggara	29,88	70,08	0,04
Gorontalo	48,28	51,72	0,00
Sulawesi Barat	22,95	77,03	0,02
Maluku	35,01	64,93	0,06
Maluku Utara	31,73	68,03	0,24
Papua Barat	41,60	58,40	0,00
Papua	30,10	69,31	0,59
Indonesia	37,22	62,62	0,16

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, 2020

Lampiran 67 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan Kepada Polisi Menurut Provinsi, 2021–2023

Provinsi	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	73,19	24,22	–
Sumatera Utara	70,91	45,60	54,78
Sumatera Barat	8,52	41,16	82,12
Riau	46,21	26,14	26,53
Jambi	18,22	92,54	0,84
Sumatera Selatan	44,74	37,61	92,12
Bengkulu	23,61	18,72	55,33
Lampung	8,93	51,18	68,38
Kep. Bangka Belitung	63,28	31,02	100,00
Kepulauan Riau	56,24	87,07	0,35
DKI Jakarta	46,89	65,89	23,19
Jawa Barat	57,16	76,60	41,56
Jawa Tengah	8,44	33,39	43,81
DI Yogyakarta	39,69	52,14	100,00
Jawa Timur	59,18	71,26	18,12
Banten	51,11	64,52	100,00
Bali	–	–	–
Nusa Tenggara Barat	55,25	36,59	42,81
Nusa Tenggara Timur	45,79	41,83	72,84
Kalimantan Barat	–	6,36	21,61
Kalimantan Tengah	55,77	46,75	68,81
Kalimantan Selatan	35,12	–	91,69
Kalimantan Timur	50,41	83,63	3,88
Kalimantan Utara	100,00	84,55	39,71
Sulawesi Utara	89,80	59,27	48,10
Sulawesi Tengah	79,32	69,40	44,46
Sulawesi Selatan	41,11	96,48	79,46
Sulawesi Tenggara	40,25	22,37	57,98
Gorontalo	79,32	44,31	100,00
Sulawesi Barat	71,58	–	–
Maluku	34,50	29,07	39,78
Maluku Utara	81,43	52,12	83,82
Papua Barat	45,92	41,17	22,55
Papua Barat Daya	...	...	78,75
Papua	32,49	73,04	53,10
Papua Selatan	...	...	98,18
Papua Tengah	...	...	40,28
Papua Pegunungan	...	...	–
Indonesia	46,71	57,75	48,88

Sumber: Susenas 2022–2024

ESTIMASI SAMPLING ERROR



Lampiran 68 Estimasi *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	0,315	0,033	10,314
Sumatera Utara	0,411	0,039	9,517
Sumatera Barat	0,564	0,051	9,012
Riau	0,451	0,054	12,042
Jambi	0,480	0,060	12,590
Sumatera Selatan	0,508	0,057	11,182
Bengkulu	0,665	0,068	10,264
Lampung	0,675	0,064	9,420
Kep. Bangka Belitung	0,373	0,064	17,285
Kepulauan Riau	0,404	0,090	22,191
DKI Jakarta	0,627	0,105	16,666
Jawa Barat	0,626	0,040	6,429
Jawa Tengah	0,366	0,023	6,322
DI Yogyakarta	0,415	0,072	17,311
Jawa Timur	0,288	0,022	7,533
Banten	0,338	0,054	15,874
Bali	0,071	0,019	26,014
Nusa Tenggara Barat	1,002	0,099	9,869
Nusa Tenggara Timur	0,392	0,037	9,569
Kalimantan Barat	0,297	0,051	17,210
Kalimantan Tengah	0,329	0,069	20,979
Kalimantan Selatan	0,262	0,040	15,166
Kalimantan Timur	0,214	0,042	19,418
Kalimantan Utara	0,414	0,082	19,808
Sulawesi Utara	0,488	0,067	13,800
Sulawesi Tengah	0,568	0,064	11,333
Sulawesi Selatan	0,334	0,031	9,359
Sulawesi Tenggara	0,336	0,044	12,992
Gorontalo	0,369	0,075	20,248
Sulawesi Barat	0,282	0,060	21,416
Maluku	0,729	0,095	13,003
Maluku Utara	0,460	0,075	16,215
Papua Barat	0,360	0,063	17,592
Papua Barat Daya	1,215	0,240	19,743
Papua	1,055	0,191	18,086
Papua Selatan	0,765	0,146	19,04
Papua Tengah	0,186	0,046	24,815
Papua Pegunungan	0,305	0,069	22,558
Indonesia	0,450	0,011	2,497

Catatan: Warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber: Susenas 2024

Lanjutan Lampiran 68

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	Observasi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	0,252	0,379	0,828	49.132
Sumatera Utara	0,334	0,487	2,500	77.836
Sumatera Barat	0,465	0,664	1,161	43.201
Riau	0,344	0,557	2,111	30.655
Jambi	0,361	0,598	1,245	23.978
Sumatera Selatan	0,397	0,619	2,496	39.277
Bengkulu	0,531	0,799	0,638	19.998
Lampung	0,550	0,800	2,313	35.390
Kep. Bangka Belitung	0,247	0,499	0,749	13.662
Kepulauan Riau	0,228	0,580	2,242	14.833
DKI Jakarta	0,422	0,832	8,262	19.004
Jawa Barat	0,547	0,705	5,851	84.220
Jawa Tengah	0,321	0,411	2,262	99.447
DI Yogyakarta	0,274	0,556	2,237	13.158
Jawa Timur	0,246	0,331	2,907	104.599
Banten	0,233	0,443	5,049	25.586
Bali	0,035	0,107	0,968	23.340
Nusa Tenggara Barat	0,808	1,196	2,359	22.878
Nusa Tenggara Timur	0,318	0,465	0,908	50.364
Kalimantan Barat	0,197	0,397	2,042	32.112
Kalimantan Tengah	0,194	0,464	1,784	26.626
Kalimantan Selatan	0,184	0,339	1,171	26.927
Kalimantan Timur	0,133	0,296	1,350	22.026
Kalimantan Utara	0,253	0,575	0,538	10.449
Sulawesi Utara	0,356	0,620	1,049	28.872
Sulawesi Tengah	0,442	0,694	1,031	27.205
Sulawesi Selatan	0,273	0,396	1,170	55.777
Sulawesi Tenggara	0,250	0,422	0,707	34.957
Gorontalo	0,223	0,516	0,808	12.671
Sulawesi Barat	0,164	0,401	0,818	13.902
Maluku	0,543	0,915	1,003	26.055
Maluku Utara	0,314	0,606	0,695	21.573
Papua Barat	0,236	0,484	0,248	14.552
Papua Barat Daya	0,745	1,685	1,177	12.793
Papua	0,681	1,429	1,345	17.315
Papua Selatan	0,479	1,05	0,643	8.957
Papua Tengah	0,095	0,276	0,517	14.047
Papua Pegunungan	0,17	0,44	0,751	14.020
Indonesia	0,428	0,472	3,426	1.211.394

Sumber: Susenas 2024

Lampiran 69 Sampling Error Persentase Penduduk Laki-Laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	70,246	4,517	6,430
Sumatera Utara	66,742	3,994	5,985
Sumatera Barat	51,025	4,155	8,142
Riau	59,005	5,635	9,550
Jambi	77,035	4,869	6,321
Sumatera Selatan	64,371	4,851	7,536
Bengkulu	65,572	5,092	7,766
Lampung	78,575	3,521	4,481
Kep. Bangka Belitung	65,374	8,799	13,459
Kepulauan Riau	68,586	9,135	13,319
DKI Jakarta	62,931	5,427	8,623
Jawa Barat	63,129	2,719	4,306
Jawa Tengah	55,192	3,064	5,551
DI Yogyakarta	56,613	8,588	15,169
Jawa Timur	58,335	3,417	5,858
Banten	68,524	6,827	9,963
Bali	59,500	12,759	21,444
Nusa Tenggara Barat	64,982	4,208	6,476
Nusa Tenggara Timur	71,996	3,933	5,463
Kalimantan Barat	70,884	5,572	7,861
Kalimantan Tengah	67,007	7,078	10,564
Kalimantan Selatan	67,173	6,447	9,597
Kalimantan Timur	76,717	7,184	9,364
Kalimantan Utara	74,898	7,853	10,484
Sulawesi Utara	53,003	6,559	12,374
Sulawesi Tengah	72,047	4,853	6,735
Sulawesi Selatan	56,711	4,553	8,029
Sulawesi Tenggara	63,444	5,190	8,180
Gorontalo	51,263	9,374	18,286
Sulawesi Barat	52,579	10,035	19,085
Maluku	60,513	5,028	8,309
Maluku Utara	63,365	6,092	9,614
Papua Barat	60,802	8,718	14,338
Papua Barat Daya	71,131	5,854	8,230
Papua	55,293	5,878	10,630
Papua Selatan	78,073	6,8	8,709
Papua Tengah	64,34	12,57	19,538
Papua Pegunungan	53,548	9,599	17,926
Indonesia	63,167	1,050	1,663

Sumber: Susenas 2024

Lanjutan Lampiran 69

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	Observasi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	61,391	79,102	0,765	168
Sumatera Utara	58,911	74,573	1,994	325
Sumatera Barat	42,881	59,170	0,991	295
Riau	47,958	70,052	1,919	128
Jambi	67,489	86,580	1,057	126
Sumatera Selatan	54,861	73,880	2,056	205
Bengkulu	55,589	75,554	0,697	155
Lampung	71,673	85,478	1,924	231
Kep. Bangka Belitung	48,124	82,624	0,862	57
Kepulauan Riau	50,677	86,495	1,772	61
DKI Jakarta	52,292	73,570	3,765	106
Jawa Barat	57,799	68,459	4,507	541
Jawa Tengah	49,186	61,198	2,159	390
DI Yogyakarta	39,778	73,449	2,252	59
Jawa Timur	51,636	65,034	2,476	320
Banten	55,140	81,907	4,354	82
Bali	34,487	84,513	0,974	20
Nusa Tenggara Barat	56,732	73,233	1,883	233
Nusa Tenggara Timur	64,285	79,707	0,765	219
Kalimantan Barat	59,960	81,809	1,044	94
Kalimantan Tengah	53,130	80,884	0,924	74
Kalimantan Selatan	54,534	79,812	0,966	82
Kalimantan Timur	62,634	90,801	1,041	42
Kalimantan Utara	59,504	90,293	0,452	44
Sulawesi Utara	40,145	65,861	0,955	147
Sulawesi Tengah	62,533	81,560	0,942	142
Sulawesi Selatan	47,785	65,638	1,134	237
Sulawesi Tenggara	53,270	73,618	0,489	130
Gorontalo	32,886	69,640	0,697	50
Sulawesi Barat	32,906	72,251	0,725	33
Maluku	50,656	70,370	0,629	178
Maluku Utara	51,422	75,308	0,424	95
Papua Barat	43,711	77,894	0,257	77
Papua Barat Daya	59,655	82,607	0,502	91
Papua	43,770	66,815	0,574	138
Papua Selatan	64,743	91,404	0,48	51
Papua Tengah	39,696	88,983	0,582	30
Papua Pegunungan	34,729	72,366	0,55	40
Indonesia	61,109	65,226	2,616	5.496

Sumber: Susenas 2024

Lampiran 70 *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	29,754	4,517	15,181
Sumatera Utara	33,258	3,994	12,011
Sumatera Barat	48,975	4,155	8,483
Riau	40,995	5,635	13,745
Jambi	22,965	4,869	21,201
Sumatera Selatan	35,629	4,851	13,614
Bengkulu	34,428	5,092	14,790
Lampung	21,425	3,521	16,433
Kep. Bangka Belitung	34,626	8,799	25,412
Kepulauan Riau	31,414	9,135	29,080
DKI Jakarta	37,069	5,427	14,639
Jawa Barat	36,871	2,719	7,373
Jawa Tengah	44,808	3,064	6,837
DI Yogyakarta	43,387	8,588	19,793
Jawa Timur	41,665	3,417	8,201
Banten	31,476	6,827	21,688
Bali	40,500	12,759	31,504
Nusa Tenggara Barat	35,018	4,208	12,018
Nusa Tenggara Timur	28,004	3,933	14,045
Kalimantan Barat	29,116	5,572	19,139
Kalimantan Tengah	32,993	7,078	21,454
Kalimantan Selatan	32,827	6,447	19,639
Kalimantan Timur	23,283	7,184	30,854
Kalimantan Utara	25,102	7,853	31,283
Sulawesi Utara	46,997	6,559	13,955
Sulawesi Tengah	27,953	4,853	17,360
Sulawesi Selatan	43,289	4,553	10,518
Sulawesi Tenggara	36,556	5,190	14,197
Gorontalo	48,737	9,374	19,233
Sulawesi Barat	47,421	10,035	21,161
Maluku	39,487	5,028	12,733
Maluku Utara	36,635	6,092	16,629
Papua Barat	39,198	8,718	22,241
Papua Barat Daya	28,869	5,854	20,278
Papua	44,707	5,878	13,147
Papua Selatan	21,927	6,8	31,011
Papua Tengah	35,66	12,57	35,250
Papua Pegunungan	46,452	9,599	20,665
Indonesia	36,833	1,050	2,851

Catatan: Warna kuning menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penggunaan hasil estimasi

Sumber: Susenas 2024

Lanjutan Lampiran 70

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	Observasi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	20,898	38,609	0,765	168
Sumatera Utara	25,427	41,089	1,994	325
Sumatera Barat	40,830	57,119	0,991	295
Riau	29,948	52,042	1,919	128
Jambi	13,420	32,511	1,057	126
Sumatera Selatan	26,120	45,139	2,056	205
Bengkulu	24,446	44,411	0,697	155
Lampung	14,522	28,327	1,924	231
Kep. Bangka Belitung	17,376	51,876	0,862	57
Kepulauan Riau	13,505	49,323	1,772	61
DKI Jakarta	26,430	47,708	3,765	106
Jawa Barat	31,541	42,201	4,507	541
Jawa Tengah	38,802	50,814	2,159	390
DI Yogyakarta	26,551	60,222	2,252	59
Jawa Timur	34,966	48,364	2,476	320
Banten	18,093	44,860	4,354	82
Bali	15,487	65,513	0,974	20
Nusa Tenggara Barat	26,767	43,268	1,883	233
Nusa Tenggara Timur	20,293	35,715	0,765	219
Kalimantan Barat	18,191	40,040	1,044	94
Kalimantan Tengah	19,116	46,870	0,924	74
Kalimantan Selatan	20,188	45,466	0,966	82
Kalimantan Timur	9,199	37,366	1,041	42
Kalimantan Utara	9,707	40,496	0,452	44
Sulawesi Utara	34,139	59,855	0,955	147
Sulawesi Tengah	18,440	37,467	0,942	142
Sulawesi Selatan	34,362	52,215	1,134	237
Sulawesi Tenggara	26,382	46,730	0,489	130
Gorontalo	30,360	67,114	0,697	50
Sulawesi Barat	27,749	67,094	0,725	33
Maluku	29,630	49,344	0,629	178
Maluku Utara	24,692	48,578	0,424	95
Papua Barat	22,106	56,289	0,257	77
Papua Barat Daya	17,393	40,345	0,502	91
Papua	33,185	56,230	0,574	138
Papua Selatan	8,596	35,257	0,48	51
Papua Tengah	11,017	60,304	0,582	30
Papua Pegunungan	27,634	65,271	0,55	40
Indonesia	34,774	38,891	2,616	5.496

Sumber: Susenas 2024

Lampiran 71 Sampling Error Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2023

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	91,169	2,897	3,177
Sumatera Utara	89,962	3,233	3,594
Sumatera Barat	88,996	2,434	2,735
Riau	95,335	2,138	2,243
Jambi	94,479	2,708	2,866
Sumatera Selatan	89,254	5,387	6,036
Bengkulu	88,532	3,554	4,015
Lampung	89,123	2,792	3,133
Kep. Bangka Belitung	90,382	4,984	5,515
Kepulauan Riau	86,235	6,190	7,178
DKI Jakarta	82,335	5,272	6,403
Jawa Barat	86,953	2,026	2,330
Jawa Tengah	78,785	2,576	3,270
DI Yogyakarta	64,807	8,596	13,264
Jawa Timur	72,209	3,622	5,016
Banten	93,118	3,512	3,772
Bali	88,281	7,976	9,035
Nusa Tenggara Barat	92,929	2,236	2,406
Nusa Tenggara Timur	89,133	3,177	3,565
Kalimantan Barat	91,043	3,835	4,212
Kalimantan Tengah	91,610	3,793	4,140
Kalimantan Selatan	88,088	4,263	4,840
Kalimantan Timur	75,002	8,987	11,982
Kalimantan Utara	95,406	3,505	3,674
Sulawesi Utara	87,411	4,549	5,204
Sulawesi Tengah	93,359	2,943	3,152
Sulawesi Selatan	84,584	3,531	4,174
Sulawesi Tenggara	92,176	2,639	2,863
Gorontalo	90,048	4,646	5,159
Sulawesi Barat	96,344	2,441	2,534
Maluku	97,184	1,225	1,261
Maluku Utara	96,231	1,734	1,802
Papua Barat	91,605	2,777	3,031
Papua Barat Daya	88,091	5,222	5,927
Papua	86,322	5,460	6,326
Papua Selatan	94,922	2,523	2,658
Papua Tengah	69,652	9,922	14,246
Papua Pegunungan	97,711	2,076	2,125
Indonesia	85,873	0,847	0,986

Sumber: Susenas 2024

Lanjutan Lampiran 71

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	Observasi
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	84,213	87,533	0,816	168
Sumatera Utara	85,490	96,848	3,211	325
Sumatera Barat	83,623	96,300	0,868	295
Riau	84,224	93,769	1,503	128
Jambi	91,143	99,528	1,108	126
Sumatera Selatan	89,171	99,787	6,063	205
Bengkulu	78,693	99,815	0,755	155
Lampung	81,563	95,500	2,101	231
Kep. Bangka Belitung	83,649	94,597	0,720	57
Kepulauan Riau	80,611	100,154	1,477	61
DKI Jakarta	74,100	98,371	5,698	106
Jawa Barat	72,000	92,670	5,135	541
Jawa Tengah	82,981	90,924	2,260	390
DI Yogyakarta	73,734	83,836	2,430	59
Jawa Timur	47,956	81,659	3,369	320
Banten	65,108	79,310	3,878	82
Bali	86,233	100,003	0,887	20
Nusa Tenggara Barat	72,644	103,917	1,841	233
Nusa Tenggara Timur	88,546	97,313	1,038	219
Kalimantan Barat	82,904	95,362	1,251	94
Kalimantan Tengah	83,526	98,561	0,763	74
Kalimantan Selatan	84,174	99,045	0,888	82
Kalimantan Timur	79,730	96,447	1,552	42
Kalimantan Utara	57,383	92,620	0,386	44
Sulawesi Utara	88,534	102,278	1,040	147
Sulawesi Tengah	78,493	96,330	1,125	142
Sulawesi Selatan	87,589	99,128	1,284	237
Sulawesi Tenggara	77,662	91,506	0,407	130
Gorontalo	87,003	97,348	0,477	50
Sulawesi Barat	80,940	99,155	0,304	33
Maluku	91,559	101,130	0,326	178
Maluku Utara	94,782	99,586	0,220	95
Papua Barat	92,831	99,631	0,081	77
Papua Barat Daya	86,161	97,049	0,782	91
Papua	77,855	98,328	1,037	138
Papua Selatan	75,618	97,027	0,235	51
Papua Tengah	89,974	99,869	0,394	30
Papua Pegunungan	50,2	89,104	0,286	40
Indonesia	93,641	101,781	3,264	5.496

Sumber: Susenas 2024

Lampiran 72 *Sampling Error* Proporsi Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya pada Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	60,641	2,477	4,085
Sumatera Utara	53,997	2,407	4,457
Sumatera Barat	56,804	2,868	5,049
Riau	63,206	2,856	4,518
Jambi	64,541	3,011	4,666
Sumatera Selatan	70,896	2,413	3,404
Bengkulu	67,405	3,238	4,805
Lampung	72,554	2,725	3,756
Kep. Bangka Belitung	67,211	3,700	5,505
Kepulauan Riau	72,733	4,692	6,451
DKI Jakarta	40,885	3,340	8,169
Jawa Barat	51,700	1,666	3,222
Jawa Tengah	73,896	1,252	1,695
DI Yogyakarta	74,330	3,344	4,499
Jawa Timur	65,320	1,419	2,172
Banten	54,650	3,155	5,772
Bali	81,025	3,368	4,157
Nusa Tenggara Barat	65,714	3,243	4,935
Nusa Tenggara Timur	64,387	2,260	3,509
Kalimantan Barat	70,273	2,710	3,857
Kalimantan Tengah	68,929	2,989	4,336
Kalimantan Selatan	65,640	2,864	4,363
Kalimantan Timur	59,578	3,605	6,050
Kalimantan Utara	64,386	5,282	8,204
Sulawesi Utara	57,996	3,064	5,283
Sulawesi Tengah	53,738	3,408	6,342
Sulawesi Selatan	63,732	2,193	3,442
Sulawesi Tenggara	69,924	2,937	4,200
Gorontalo	53,240	4,570	8,584
Sulawesi Barat	76,275	3,681	4,826
Maluku	64,851	3,745	5,775
Maluku Utara	70,569	3,762	5,330
Papua Barat	59,186	4,389	7,415
Papua	67,070	2,907	4,334
Indonesia	62,269	0,477	0,766

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, 2020

Lanjutan Lampiran 72

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan	Jumlah Observasi
	Batas Bawah	Batas Atas	Sampling	
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
A c e h	55,696	65,378	1,796	2.666
Sumatera Utara	49,258	58,665	2,824	4.287
Sumatera Barat	51,119	62,316	2,029	2.294
Riau	57,453	68,606	2,403	1.686
Jambi	58,443	70,201	1,878	1.410
Sumatera Selatan	65,950	75,391	2,392	2.270
Bengkulu	60,770	73,410	1,539	1.163
Lampung	66,905	77,563	2,810	2.132
Kep. Bangka Belitung	59,596	74,016	1,531	844
Kepulauan Riau	62,653	80,921	2,497	767
DKI Jakarta	34,534	47,556	3,537	990
Jawa Barat	48,432	54,953	3,756	5.334
Jawa Tengah	71,368	76,276	2,696	6.382
DI Yogyakarta	67,252	80,325	2,481	806
Jawa Timur	62,489	68,046	3,077	6.983
Banten	48,426	60,731	3,544	1.469
Bali	73,540	86,773	2,845	1.296
Nusa Tenggara Barat	59,108	71,762	2,579	1.441
Nusa Tenggara Timur	59,846	68,684	1,612	2.511
Kalimantan Barat	64,704	75,300	2,021	1.752
Kalimantan Tengah	62,791	74,466	1,691	1.487
Kalimantan Selatan	59,829	71,017	2,023	1.703
Kalimantan Timur	52,361	66,403	2,210	1.076
Kalimantan Utara	53,510	73,957	1,381	450
Sulawesi Utara	51,901	63,857	1,546	1.673
Sulawesi Tengah	47,030	60,313	1,855	1.378
Sulawesi Selatan	59,333	67,913	2,076	3.187
Sulawesi Tenggara	63,876	75,351	1,587	1.431
Gorontalo	44,274	62,002	1,573	680
Sulawesi Barat	68,333	82,729	1,534	664
Maluku	57,210	71,800	1,502	1.070
Maluku Utara	62,704	77,374	1,359	869
Papua Barat	50,389	67,433	1,265	807
Papua	61,144	72,498	1,824	2.322
Indonesia	61,329	63,200	2,554	67.280

Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial, 2020

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2089-5291



9 772089 529000